

**PENGEMBANGAN EKOWISATA (*ECOTOURISM*)
DI KAWASAN WADUK CACABAN
KABUPATEN TEGAL**



**Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat S-2
Pada Program Studi Ilmu Lingkungan**

**Imam Rudy Kurnianto
L4K007006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
200**

LEMBAR PENGESAHAN**PENGEMBANGAN EKOWISATA (*ECOTOURISM*)
DI KAWASAN WADUK CACABAN
KABUPATEN TEGAL**

Disusun oleh

Imam Rudy Kurnianto
L4K007006

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 12 September 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES. | |
| 2. Ir. Parfi Khadiyanto, MS. | |
| 3. Dr. Boedi Hendrarto, MSc. | |
| 4. Ir. Nany Yuliasuti, MSP. | |

TESIS

**PENGEMBANGAN EKOWISATA (*ECOTOURISM*)
DI KAWASAN WADUK CACABAN
KABUPATEN TEGAL**

Disusun oleh

Imam Rudy Kurnianto
L4K007006

Mengetahui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

Ir. Parfi Khadiyanto, MS

Ketua Program Studi
Ilmu Lingkungan

Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

KAMPANYE EKOWISATA

- *“Leave only footprints. Take everything out that you brought with you. No graffiti, no litter”*
- *“Take only photographs. Do not take “souvenir” from natural areas or historical areas”*

(Sumber : www.greenhotels.com)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Sekiranya dibelakang hari terdapat plagiasi, saya bersedia untuk dikenakan sanksi sebagaimana mestinya.

Semarang, September 2008

IMAM RUDY KURNIANTO, SPt.
NIM. L4K 007 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat. Atas perkenan-Nya, penyusun dapat menempuh studi di Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro dan menyelesaikan penyusunan Tesis ini sebagaimana diharapkan.

Dengan selesainya penyusunan Tesis ini, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Agus Riyanto, S Sos, MM. selaku Bupati Tegal beserta Pejabat Dinas/Instansi terkait yang telah memberikan ijin untuk mengikuti Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES. selaku Ketua Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro sekaligus sebagai Pembimbing Utama, beserta seluruh jajarannya baik Pengelola Administrasi maupun segenap Staf Pengajar, yang telah banyak membantu dalam proses belajar.
3. Ir. Parfi Khadiyanto, MSi. selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan Tesis ini.
4. Dr. Boedi Hendarto, MSc. dan Ir. Nany Yulastuti, MSP. selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk perbaikan tesis ini.
5. Kawan-kawan senasib seperjuangan di Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, yang telah mendorong semangat dengan segenap bantuannya.
6. Orang-orang tercinta terutama Orang Tua dan Istri tercinta Nur Rachmawati, SPt. serta anakku tercinta M. Arizqo Rizaldi Azhar beserta segenap keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan studi.

Penulis menyadari dalam penyusunan Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat, sehingga masukan dan arahan guna perbaikan sangat diharapkan.

Semarang, September 2008
Penulis,

Imam Rudy Kurnianto, SPT.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama lengkap Imam Rudy Kurnianto, lahir di Temanggung pada tanggal 9 September 1975. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan H. Suparto Amin dan Hj. Setyowati dan suami dari Nur Rachmawati, SPT. serta bapak dari seorang anak laki-laki bernama M. Arizqo Rizaldi Azhar. Penulis tinggal di Slawi, dan bekerja sebagai pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Riwayat pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Sekolah Menengah Pertama diselesaikan di Desa Demangan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung lulus tahun 1991 kemudian melanjutkan di SMA Negeri I Temanggung dan lulus pada tahun 1994. Pendidikan Diploma III ditempuh di Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 1997 dan melanjutkan pendidikan Strata I di Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang lulus pada tahun 1999. Pada Tahun 2007 melalui program beasiswa Bappenas menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.

Riwayat pekerjaan, setelah menyelesaikan pendidikan Strata I penulis diterima sebagai pegawai negeri di lingkungan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Tugas pertama dilaksanakan di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Lamunti II B 2 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2001 melaksanakan mutasi tugas ke Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal dan bertugas pada tempat yang sama sampai dengan sekarang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Manfaat Penelitian	7
5. Ruang Lingkup	7
6. Kerangka Pikir Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
1. Pembangunan Berkelanjutan.....	13
2. Perkembangan Pariwisata	18
3. Pola Pemanfaatan Lahan di Kawasan Wisata	24
4. Pola Pemanfaatan Lahan di Kawasan Waduk.....	26
5. Pengertian dan Potensi Ekowisata.....	31
6. Kebijakan Pengembangan Ekowisata.....	35
BAB III. METODE PENELITIAN	43
1. Wilayah Studi	43
2. Tipe Penelitian	45
3. Variabel Penelitian	46
4. Posisi Penelitian	48
5. Data dan Sampel	49
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	54
1. Gambaran Umum Kawasan Waduk Cacaban	54
2. Pola Pemanfaatan Lahan di Kawasan Waduk Cacaban	67

3.	Potensi Pengembangan Ekowisata di Kawasan Waduk Cacaban	89
4.	Kebijakan dan Peran Institusi dalam Pengembangan Ekowisata	102
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN		114
DAFTAR PUSTAKA		116
LAMPIRAN		120
1.	Daftar Pertanyaan untuk Wisatawan.....	120
2.	Daftar Pertanyaan untuk Pengelola.....	123
3.	Daftar Pertanyaan untuk Masyarakat.....	125
4.	Daftar Pertanyaan untuk Dinas/Instansi/Lembaga.....	127
5.	Daftar Pertanyaan untuk Pelaku Usaha.....	129
6.	Resume Hasil Wawancara Penelitian.....	130
7.	Dokumentasi Penelitian.....	137

DAFTAR TABEL

1.	Perbedaan Tipologi Model Pembangunan	16
2.	Model Pariwisata Global	23
3.	Deskripsi Kelas Lereng dan Skor Nilainya.....	27
4.	Deskripsi Jenis Tanah, Tingkat Erosivitas dan Skor	28
5.	Deskripsi Intensitas Hujan, Deskripsi dan Skor.....	28
6.	Kategori Kawasan Lindung	39
7.	Matrik Sasaran Manajemen dan Kategori Kawasan Pelestarian	39
8.	Indikator Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	41
9.	Kegiatan dan Penelitian di Kawasan Waduk Cacaban	48
10.	Jumlah Sampel Penelitian di Kawasan Wisata Waduk Cacaban..	50
11.	Jenis Tanah di Kawasan Waduk Cacaban.....	57
12.	Lapangan Usaha Penduduk	59
13.	Jarak Waduk Cacaban dengan kota di Kabupaten dan Kota Tegal.....	62
14.	Pemanfaatan Lahan	74
15.	Luas Lahan Kritis di <i>Catchment Area</i> Waduk Cacaban	76
16.	Pemanfaatan Lahan Hutan untuk Lahan Pertanian.....	79
17.	Pekerjaan Pokok Masyarakat	80
18.	Penghasilan Rata-rata Masyarakat	81
19.	Data Jumlah Pengunjung	89
20.	Minat Wisatawan terhadap Konservasi	91

DAFTAR GAMBAR

1.	Kerangka Alur Pikir	12
2.	Total Nilai Ekonomi dari Taman Nasional.....	21
3.	Komponen Pengembangan Pariwisata	22
4.	Lokasi Kawasan Waduk Cacaban	24
5.	Sistem Lingkungan Hidup	25
6.	Peta Lokasi Penelitian	44
7.	Variabel Penelitian	47
8.	Matrik SWOT	52
9.	Alur Analisa	53
10.	Peta Administrasi Kabupaten Tegal	55
11.	Persentase Lapangan Usaha Penduduk.....	60
12.	Akses Jalan Menuju Kawasan Waduk Cacaban	62
13.	Tipe Bendung dan Menara Pengambilan	64
14.	Wisata Air	66
15.	Sub Wilayah Pembangunan Kabupaten Tegal	68
16.	Peta Pengembangan Kawasan Waduk Cacaban	73
17.	Diagram Pemanfaatan Lahan	75
18.	Persentase Penggunaan Lahan	75
19.	Distribusi Lahan Kritis	77
20.	Persentase Lahan Kritis.....	77
21.	Penjarahan Hutan di Kawasan Waduk Cacaban	78
22.	Kondisi Rumah Penduduk	79
23.	Daerah Utama Waduk Cacaban	83
24.	Daerah Perairan di Waduk Cacaban	84
25.	Rencana Tapak Pengembangan Pariwisata Intensif	86
26.	Rencana Tapak Proyek Sirkuit Road Race	87
27.	Daerah Penyangga Pengembangan Pariwisata	89
28.	Peningkatan Jumlah Pengunjung Waduk Cacaban	90
29.	Kawasan Pengembangan Ekowisata	93
30.	Pembukaan Lahan Hutan Menjadi Lahan Pertanian	94
31.	Potensi Pengembangan Agroforest	97
32.	Potensi Perikanan dan Balai Pengembangan Benih Ikan	99
33.	Obyek wisata budaya, sejarah dan edukasi	101
34.	Matrik SWOT Penelitian	107
35.	Struktur Organisasi dan Pola Koordinasi BPEWC.....	111
36.	Diagram Model Pengembangan Ekowisata	112

ABSTRAK

Kawasan waduk Cacaban merupakan kawasan dengan perpaduan daerah daratan dengan daerah perairan. Kawasan waduk Cacaban juga memiliki perpaduan fungsi antara fungsi utama sebagai penyedia air irigasi dan fungsi sebagai daerah tujuan wisata. Berkaitan dengan hal tersebut wisata yang dikembangkan di kawasan waduk Cacaban haruslah wisata yang dapat mendukung fungsi utama waduk sebagai penyedia air irigasi dan mendukung konservasi tanah.

Ekowisata (*ecotourism*) merupakan jenis wisata yang mendukung upaya konservasi. Wisata ini juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap lingkungan, budaya, sejarah dan partisipasi penduduk lokal. Pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban dilaksanakan sebagai upaya pengembangan wisata yang dapat mendukung kelestarian waduk Cacaban.

Penelitian pengembangan ekowisata (*ecotourism*) di kawasan waduk Cacaban dilaksanakan dengan tipe deskriptif kualitatif. Ruang lingkup penelitian meliputi pola pemanfaatan lahan, potensi ekowisata dan konsep kebijakan pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban. Kawasan waduk Cacaban mempunyai potensi hutan dan pertanian. Kondisi saat ini dari luas daerah tangkapan air (*catchment area*) waduk Cacaban 6.792,71 hektar. Dari keseluruhan luas daerah tangkapan air waduk Cacaban, 49 % diantaranya berupa hutan dan dari luasan hutan yang ada 16 % diantaranya dalam kondisi kritis.

Pola pemanfaatan lahan kritis di daerah tangkapan air didominasi oleh terjadinya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian oleh petani penggarap / pesanggem (23 %). Sejauh ini upaya konservasi belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena adanya silang kepentingan antara pengembangan kehutanan dan pertanian. Pengembangan lahan hutan akan mengurangi lahan pertanian dan demikian sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut pendekatan konsep wanatani (*agroforest*) dapat dijadikan sebagai salah satu potensi pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban. Disamping itu masih terdapat potensi lain seperti wisata tirta, wisata budaya dan wisata edukasi.

Pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban sangat tergantung pada keterlibatan pengampu kepentingan (*stakeholder*). Berdasarkan hal tersebut diperlukan pembentukan Badan Pengelola Ekowisata Waduk Cacaban untuk mengakomodir kepentingan *stakeholder*. Rekomendasi dari penelitian ini adalah (a) pengembangan atraksi ekowisata di kawasan waduk Cacaban, (b) perbaikan infrastruktur dan pelayanan jasa yang mendukung atraksi ekowisata, (c) peningkatan promosi dan perluasan peluang pasar, (d) peningkatan ekonomi lokal dan penguatan sumberdaya manusia dan (e) dukungan kebijakan pemerintah setempat dalam pengembangan ekowisata.

Kata Kunci : kawasan waduk cacaban, kerusakan hutan dan lahan, pengembangan ekowisata

ABSTRACT

The Cacaban dam area consists of the main land and territorial waters. The Cacaban dam has also multifunction consisting of irrigation water supplier and tourism object area. Related to that point, the tourism which is developed in Cacaban dam area must be a tourism that can support the its function.

Ecotourism is one of the tourism which support conservation effort. This tourism is also give a good appreciation to its environment, culture, history and local community participation. The ecotourism development in Cacaban dam area is initiated as an effort for tourism development that can support the conservation of Cacaban dam.

The type of research is descriptive qualitative approach. The aspect of research include land's exploitation, ecotourism potential and the policy of ecotourism development concept in Cacaban dam area. The Cacaban has forestry and agriculture potential. The current condition of catchment area of Cacaban dam is 6.792,71 hectare. From all of the wide of catchment area 49 % is forestry and 16 % that is mostly in bad condition.

The utilization of bad land in catchment area is dominated by shifting function from forestry to agriculture by farmers (23 %). Up to now the efforts of conservation does not show the good result yet, because there are some conflict of interest between forestry development and agriculture. The development of forestry land will decrease the agricultural land and vice versa. Based on that point, the approach of agroforest (wanatani) can be used as one of the ecotourism development in Cacaban dam area. In addition, there are still more potential such as water tourism object, culture and education available there.

In developing an ecotourism in Cacaban dam area is really depend on stakeholder's participation. According to that point, it's needed an executive corporation of ecotourism in order to organize all stakeholder's interest. This research recommends (a) to develop ecotourism attraction in Cacaban dam area, (b) to improve infrastructure sevices and facilities supporting the attraction of ecotourism, (c) to improve of product promotion and provide market expansion, (d) to improve local economic and to

developed human resource and (e) to obtain support of local government in developing ecotourism.

Key Words : dam area of Cacaban, forest and land degradation, proposed ecotou

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan dan lingkungan mempunyai hubungan timbal balik dan interaksi yang sangat erat. Pelaku pembangunan berperan sebagai subyek yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan untuk menentukan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Sumberdaya alam merupakan salah satu komponen pokok dalam pembangunan dan kelestarian sumberdaya alam sangat dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan itu sendiri. Kegiatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan perekonomian harus disertai dengan upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas lingkungan.

Pola pembangunan yang berlangsung saat ini perlu diubah dan didefinisikan secara jelas. Aspek pembangunan tidak semata-mata hanya untuk pemenuhan kebutuhan aspek ekonomi namun juga perlu memberikan bobot yang setara pada aspek-aspek sosial dan lingkungan. Pembangunan yang dilakukan harus merupakan pembangunan yang membumi, yang selalu selaras dengan keseimbangan alam. Dimana pembangunan membumi dapat diidentikkan dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan berwawasan lingkungan.

Damanik dan Weber (2006) menyatakan bahwa, ide dasar pembangunan berkelanjutan adalah kelestarian sumberdaya alam dan budaya. Ide kemudian diturunkan ke dalam konsep pariwisata berkelanjutan. Artinya adalah pembangunan sumberdaya (atraksi, aksesibilitas, amenities) pariwisata yang bertujuan untuk memberikan keuntungan optimal bagi pemangku kepentingan dan nilai kepuasan optimal bagi wisatawan dalam jangka panjang.

Wisata pada awalnya digolongkan dalam kategori industri hijau (*green Industry*). Namun dengan besarnya pengembangan wisata yang menitikberatkan pada kepentingan ekonomi tanpa mengindahkan potensi lingkungan dan tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menimbulkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Lingkungan di beberapa obyek wisata rusak akibat besarnya volume pengunjung dan besarnya tekanan terhadap lingkungan.

Tourism is a vast growing industry in the world and the increasingly rapid economic growth in the Asia Pasific region has opened opportunities for tourism development in Indonesia. The potentials for tourism development in Indonesia are among others : (1) rich cultural heritage; (2) scientific landscape; (3) proximity to major growth markets of Asia; (4) large and increasingly wealthy population that will provide a strong dosmetic market; (5) large, relatively low cost and work force (Faulkner, 1997).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran berbagai pihak terhadap lingkungan dan isu-isu tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan telah memberikan kontribusi terhadap pandangan pentingnya prinsip-prinsip wisata berkelanjutan. Prinsip pariwisata yang diharapkan dapat mempertahankan kualitas lingkungan, mempertahankan budaya, memberdayakan masyarakat lokal dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal, kawasan dan pemerintah.

Wisata adalah industri yang kelangsungannya sangat ditentukan oleh baik dan buruknya lingkungan. Tanpa lingkungan yang baik tidak mungkin wisata berkembang. Oleh karena itu pengembangan wisata haruslah memperhatikan terjaganya mutu lingkungan, sebab dalam industri wisata, lingkungan itulah yang sebenarnya dijual (Soemarwoto, 2004). Kebijakan pembangunan pariwisata yang dikaitkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup, merupakan salah satu kebutuhan penting

bagi pelayanan para wisatawan. Pembangunan pariwisata dan pengelolaan lingkungan hidup laksana dua sisi mata uang. Saling melengkapi dan dapat menjadi daya tarik dan pesona bagi wisatawan.

Sejalan dengan Agenda 21 perlu dikembangkan kegiatan pariwisata yang bermanfaat untuk pengembangan kualitas hidup secara berkelanjutan. Salah satu kegiatan wisata yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini, bahkan telah menjadi isu global yaitu dengan berkembangnya ekowisata (*ecotourism*) sebagai kegiatan wisata alam yang berdampak ringan terhadap lingkungan. Menurut Hadi (2007), prinsip-prinsip ekowisata (*ecotourism*) adalah meminimalisir dampak, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan budaya, memberikan pengalaman positif pada turis (*visitors*) maupun penerima (*hosts*), memberikan manfaat dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ekowisata dalam era pembangunan berwawasan lingkungan merupakan suatu misi pengembangan wisata alternatif yang tidak menimbulkan banyak dampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kondisi sosial budaya.

Hutan saat ini telah menurun kualitasnya, untuk mengurangi tekanan masyarakat terhadap hutan, maka masyarakat perlu diberdayakan dalam kegiatan ekowisata. Dengan demikian masyarakat akan terserap dalam kegiatan ekowisata, sehingga secara tidak langsung kerusakan hutan lebih lanjut dapat dihindarkan. Ekowisata banyak memerlukan pelayanan yang dapat dilakukan oleh masyarakat lokal.

Pengembangan ekowisata dalam perspektif *alternative tourism* pada kawasan hutan pada tahap awal seolah-olah mengurangi kendali pemerintah terhadap kawasan hutan. Namun partisipasi masyarakat yang sangat besar, justru mengurangi beban pemerintah dalam pembinaan dan pelestarian lingkungan. Dalam jangka panjang peran pemerintah lebih besar pada fungsi koordinasi dan pembinaan.

Bapeda (2005), seiring dengan Program Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tegal yang terkenal Program PERTIWI (Pertanian, Industri dan Pariwisata), beragam daya tarik wisata sangat potensial dikembangkan di daerah tujuan wisata (DTW) di wilayah Kabupaten Tegal. Terdapat beberapa daerah tujuan wisata di Kabupaten Tegal yang telah dikembangkan diantaranya Obyek Pemandian Air Panas Guci, Obyek Wisata Pantai Purwahamba Indah, Obyek Wisata Waduk Cacaban.

Kawasan wisata waduk Cacaban apabila dikembangkan mempunyai mempunyai daya tarik wisata yang lebih besar dibanding dua obyek wisata yang lain. Disamping itu kawasan waduk Cacaban juga mempunyai fungsi utama sebagai penyedia air irigasi untuk sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Tegal, obyek wisata ini mempunyai daya tarik gabungan antara wisata darat dimana didominasi oleh hutan dan wisata air.

Berdasarkan pengamatan, kawasan waduk cacaban mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu tujuan ekowisata. Pada dasarnya ekowisata dapat dikembangkan dalam berbagai kawasan hutan seperti hutan produksi, hutan lindung dan konservasi. Hutan produksi merupakan kawasan yang mendominasi daerah tangkapan air (*catchment area*) waduk Cacaban. Ekowisata pada prinsipnya bukan menjual destinasi tetapi menjual ilmu pengetahuan dan filsafat lokal atau filsafat ekosistem dan sosiosistem.

Hutan di kawasan waduk Cacaban saat ini telah menurun kualitasnya, untuk mengurangi tekanan masyarakat terhadap hutan, maka masyarakat sekitar hutan perlu diberdayakan dalam kegiatan yang wisata. Dengan demikian masyarakat akan terserap dalam kegiatan wisata, sehingga secara tidak langsung kerusakan hutan lebih lanjut dapat dihindarkan.

Sementara ini pengelolaan kawasan waduk cacaban masih belum berjalan sebagaimana diharapkan. Pengembangan wisata kawasan waduk Cacaban mengacu pada Masterplan Kawasan Obyek Wisata Waduk Cacaban Kabupaten Tegal Tahun 1986 dan telah direvisi dengan Masterplan Kawasan Obyek Wisata Cacaban 2005 (Bapeda 2005). Kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Perum Perhutani selaku pengelola kawasan obyek wisata waduk Cacaban masih bersifat sektoral. Hal ini mengakibatkan koordinasi antar sektor atau lintas sektor menjadi tidak efektif. Disamping itu keterlibatan wisatawan dalam pengelolaan lingkungan juga masih rendah dan belum mendukung dalam melestarikan fungsi utama kawasan waduk Cacaban sebagai sarana irigasi dan fungsi sebagai daerah tujuan wisata.

Pola pemanfaatan sumberdaya oleh masyarakat dan pemerintah belum sepenuhnya dapat mendukung kelestarian di kawasan waduk Cacaban. Terjadinya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian oleh petani penggarap (pesanggem) dan pembukaan lahan oleh pengelola untuk berbagai fasilitas pendukung kegiatan wisata memberikan kontribusi terhadap terjadinya penurunan kualitas lingkungan di kawasan obyek wisata waduk Cacaban.

Alih fungsi lahan menimbulkan terjadinya pengurangan keragaman hayati dan hilangnya tutupan lahan sehingga menimbulkan terjadinya erosi. Erosi permukaan tanah berakibat pada tingginya tingkat sedimentasi di waduk Cacaban. Tingginya sedimentasi di waduk Cacaban berpengaruh terhadap umur waduk Cacaban dan daya tampung waduk cacaban serta kemampuan suplai air irigasi. Berkenaan hal tersebut diperlukan adanya upaya pengelolaan wisata yang dapat mendukung kelestarian lingkungan dan fungsi utama waduk Cacaban

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas telah diketahui terjadinya penurunan kualitas lingkungan di kawasan wisata waduk Cacaban. Terkait dengan hal tersebut dapat diinventarisir beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pola pemanfaatan lahan di kawasan waduk Cacaban?
- b. Apa potensi ekowisata yang dapat dikembangkan di kawasan waduk Cacaban?
- c. Bagaimana kebijakan dan peran institusi dalam pengelolaan kawasan wisata waduk Cacaban dalam mendukung pengembangan ekowisata?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan inventarisasi permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Melakukan kajian pola pemanfaatan lahan di kawasan waduk Cacaban yang dapat mendukung pengembangan ekowisata.
- b. Menginventarisir potensi ekowisata yang dapat dikembangkan di kawasan waduk Cacaban.
- c. Merumuskan konsep kebijakan dan peran institusi dalam pengelolaan kawasan wisata waduk Cacaban dalam mendukung pengembangan ekowisata.

4. Manfaat Penelitian

4.1. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuh kembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan wisata di kawasan

waduk Cacaban. Disamping itu, sekaligus memberikan pengetahuan pola pemanfaatan lahan yang dapat mendukung pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban.

4.2. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kajian penerapan kebijakan dan peran institusi dalam pengembangan ekowisata di kawasan waduk cacaban. Dimana kebijakan dan peran institusi yang dilaksanakan lebih menitikberatkan pada keterlibatan secara aktif masyarakat, wisatawan dan bersifat lintas sektor.

4.3. Manfaat Bagi Akademisi

Hasil kajian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi guna penelitian lebih lanjut tentang pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban berikut potensi pengembangannya di masa yang akan datang.

5. Ruang Lingkup Studi

Ruang lingkup dalam penyusunan penelitian ini meliputi ruang lingkup materi atau substansial dan ruang lingkup wilayah atau spasial. Penentuan ruang lingkup digunakan sebagai batasan operasional pelaksanaan penelitian

5.1. Ruang Lingkup Materi (Substansial)

Lingkup materi (substansial) dalam penelitian ini adalah berbagai hal terkait dalam pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban. Pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban tidak dapat terlepas dari kondisi kawasan, pola pemanfaatan

lahan, potensi ekowisata dan kebijakan serta peran institusi. Lingkup substansial keempat aspek tersebut adalah sebagai berikut :

- Kondisi Kawasan Waduk Cacaban

Kawasan waduk Cacaban meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya di daerah tangkapan air (*catchment area*) waduk Cacaban

- Pola pemanfaatan lahan

Pola pemanfaatan lahan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak diantaranya masyarakat, pemerintah dan swasta dengan memanfaatkan sumberdaya lahan di kawasan waduk Cacaban. Dalam pemanfaatan sumberdaya lahan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif bagi lingkungan. Dari berbagai dampak yang ada dilakukan kajian lebih lanjut guna mendukung pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban.

- Potensi ekowisata

Potensi ekowisata merupakan produk wisata unggulan yang dapat dikembangkan sesuai dengan pola pemanfaatan lahan di sekitar waduk Cacaban sejalan dengan kaidah pelestarian lingkungan dan tujuan pengembangan ekowisata. Potensi ekowisata tersebut merupakan potensi utama dimana lebih lanjut didalamnya dapat dikembangkan beberapa potensi ikutan.

- Kebijakan dan peran institusi

Kebijakan dan peran institusi dalam pengembangan ekowisata disusun sebagai alternatif kebijakan dari berbagai kebijakan yang telah diterapkan dalam pengembangan kawasan waduk Cacaban. Lebih lanjut berdasarkan konsep kebijakan yang disusun, dibentuk suatu pola peran institusi dalam suatu model organisasi pengelola kawasan ekowisata waduk Cacaban.

Keempat hal tersebut lebih lanjut akan dipaparkan, dan dan dilakukan analisa keterkaitan antar aspek. Sehingga diperoleh suatu konsep pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban yang dapat mengakomodir kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi.

5.2. Ruang Lingkup Wilayah (Spasial)

Batasan ruang lingkup wilayah penelitian Pengembangan Ekowisata (*Ecotourism*) di kawasan Waduk Cacaban meliputi kawasan pengembangan wisata intensif sesuai dengan Masterplan Kawasan Obyek Wisata Cacaban 2005 dan beserta kawasan sabuk hijau (*green belt*) di sekeliling waduk cacaban dan 3 Desa yang termasuk dalam daerah tangkapan air (*catchment area*) waduk Cacaban. Ketiga Desa tersebut meliputi :

1. Desa Wotgalih Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.

2. Desa Penujah dan Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal.

6. Kerangka Pikir Penelitian

Pola pemanfaatan sumberdaya dan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Tegal menjadi titik awal dimulainya penelitian. Di kawasan waduk Cacaban telah terjadi perubahan pola pemanfaatan lahan, dimana lahan hutan telah dibuka menjadi lahan pertanian oleh para petani penggarap (pesanggem). Disamping itu terdapat beberapa penerapan kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal dan instansi terkait dalam pengelolaan kawasan wisata yang belum mendukung kelestarian lingkungan. Secara khusus kebijakan pengembangan wisata di kawasan waduk Cacaban saat ini berdasarkan Masterplan Kawasan Obyek Wisata Waduk Cacaban Kabupaten Tegal Tahun 2005 yang merupakan revisi Masterplan Kawasan Obyek Wisata Waduk Cacaban Tahun 1986.

Pengembangan wisata kawasan waduk cacaban berpotensi menimbulkan beberapa perubahan di struktur masyarakat dan tata guna lahan. Dari berbagai perubahan yang ada, perubahan yang paling dominan adalah perubahan sosial ekonomi dan lingkungan. Perubahan tersebut dapat diamati dari perubahan pola pemanfaatan sumberdaya di kawasan waduk Cacaban.

Guna mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perubahan pola pemanfaatan sumberdaya alam khususnya

pola pemanfaatan lahan lebih lanjut dalam penelitian ini dilakukan kajian secara deskriptif. Berdasarkan kajian pola pemanfaatan lahan tersebut memberikan beberapa alternatif pemanfaatan lahan yang dapat mendukung kelestarian lingkungan dan kegiatan wisata di kawasan waduk Cacaban.

Beberapa alternatif pemanfaatan lahan yang mendukung kelestarian lingkungan merupakan bagian dari potensi pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban. Berkenaan dengan hal tersebut untuk mengetahui potensi ekowisata di kawasan waduk Cacaban perlu adanya inventarisasi potensi pengembangan ekowisata.

Berdasarkan inventarisasi potensi ekowisata di kawasan waduk Cacaban disusun alternatif kebijakan dan peran institusi yang mendukung pengembangan ekowisata. Kerangka alur pikir penelitian secara lengkap sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembangunan Berkelanjutan

Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Substansi pengelolaan lingkungan hidup menurut UU tersebut harus berasaskan pelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan manusia serta kesinambungan generasi (Ramly, 2007).

Keraf (2001), menyatakan bahwa terdapat 9 Prinsip Etika Lingkungan yang meliputi:

- Hormat terhadap alam (*respect for nature*).
- Bertanggung jawab pada alam (*reponsibility for nature*)
- Solidaritas kosmis
- Peduli kepada alam (*caring for nature*)
- Tidak merugikan (*no harm*)
- Hidup selaras dengan alam (*living harmony with nature*)
- Keadilan
- Demokrasi
- Integritas

Pembangunan berkelanjutan menghendaki penerapan perencanaan tata ruang (*spatial planning*) misalnya pembangunan sumber daya alam yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Penempatan beberapa macam aktivitas yang menggunakan sumber daya alam harus memperhatikan kapasitas lingkungan alam dalam

mengabsorpsi perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Untuk itu sumber daya alam di suatu negara bisa dieksploitasi. Sumber daya alam dialokasikan untuk beberapa zona seperti zona industri, zona suaka alam, daerah pengaliran sungai, zona perumahan, zona perdagangan, zona taman nasional, zona perkebunan, dan sebagainya. Perencanaan regional harus mendasarkan zona-zona di atas yang memasukkan muatan lingkungan di dalamnya (Salim, 1990).

Kualitas lingkungan dalam arti luas meliputi sumberdaya alam dan buatan yang memiliki hubungan kompleks dengan berbagai aktivitas. Hubungan dengan melibatkan beberapa aktifitas dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif (Ramly 2007).

Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju maupun berkembang membawa kesejahteraan tetapi juga ketidakmerataan dan kerusakan lingkungan. Dampak pada lingkungan meliputi : (a) pencemaran atmosfer seperti menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, hujan asam, perubahan iklim; (b) kenaikan permukaan air laut, pencemaran laut karena “oil spill”, penangkapan ikan yang berlebihan atau “over fishing”; (c) penggundulan hutan; (d) merosotnya keragaman hayati; (e) degradasi tanah, erosi lahan karena eksploitasi yang berlebihan (Hadi, 2005¹)

Pembangunan pada hakekatnya melibatkan tiga *stakeholder* utama yaitu negara, masyarakat dan swasta. Bagaimana proporsi peran masing-masing elemen tersebut akan ditentukan oleh paradigma pembangunan yang digunakan. Implementasi model pembangunan *top down* menyebabkan Negara dan swasta menjadi sangat dominant, sedangkan masyarakat berada posisi *marginal*. Model pembangunan tersebut cenderung memberikan akses pada sekelompok kecil

masyarakat untuk menguasai perekonomian dan meniadakan partisipasi pada level akar rumput (*grass roots*). Bertilik dari paparan di atas, maka diperlukan suatu pembangunan alternative yang lebih berorientasi pada usaha menghilangkan marginalisasi dan memperkuat sector masyarakat. Pada aras ini maka pembangunan yang berbasis masyarakat (*community-based development*) menjadi relevan diimplementasikan.

Konsep pembangunan masyarakat perlu dibedakan dengan konsep pembangunan pada umumnya, karena titik temu dari pembangunan masyarakat ini mengacu pada upaya pelayanan manusia berbasis pada masyarakat (*community-based human services*). Pembangunan masyarakat pada hakekatnya menjadi antitesis dari pembangunan yang dibimbing oleh Negara (*state-led development*) dan bukan pula pembangunan yang digerakkan oleh pasar (*market-driven development*) (Suparjan dan Suyatno, 2003).

Pembangunan masyarakat pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan, dari masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindarkan kemungkinan tersudutnya masyarakat sebagai penanggungung eksese dari pembangunan. Soelaiman (1998) menyatakan bahwa pembangunan masyarakat mengandung makna, betapa pentingnya inisiatif lokal, partisipasi masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Pembangunan konvensional mengutamakan pertumbuhan sedangkan pembangunan alternatif mengutamakan pemberdayaan. Perbedaan dua tipologi model pembangunan sebagaimana tersaji dalam table berikut :

Tabel. 1. Perbedaan Tipologi Model Pembangunan

Konvensional (Pertumbuhan)		Alternatif (Pemberdayaan)
Masyarakat tidak maju karena pengetahuan rendah atau bodoh dan terbelakang	Asumsi	Masyarakat tidak maju bukan karena bodoh tetapi karena tekanan, penindasan atau paksaan struktural
Top down, sentralistik, menciptakan homogenitas, monologis	Perencanaan	Bottom Up, parsial, otonomi, akomodatif terhadap semua kepentingan, dialogis
Pertumbuhan ekonomi secepatnya, rakyat mengikuti pemerintah melalui mobilisasi, pada umumnya dilakukan dengan paksaan	Orientasi	Pertumbuhan ekonomi tidak terabaikan, tetapi masyarakat diberi kebebasan berinisiatif, partisipatif
Birokrasi dilayani masyarakat melalui birokrat	Pelayanan	Birokrasi melayani kebutuhan masyarakat, kontrol dilakukan oleh masyarakat
Terbentuknya manusia teknis, pasif, tidak kritis, ketergantungan dan menyimpan konflik	Implikasi Sosial	Masyarakat kritis dan pebuh inisiatif

Sumber : Susetiawan (2001).

Definisi lingkungan sangat luas, dan mencakup kondisi sosial dan budaya yang mempengaruhi kehidupan manusia dan masyarakat (Hadi, 2005²). Lebih lanjut Hadi (2005²) menyatakan bahwa, salah satu konsep tentang studi dampak sosial bertolak dari pemikiran bahwa masyarakat itu dipandang sebagai suatu bagian dari ekosistem. Perubahan dari salah satu sub sistem akan mempengaruhi sub sistem yang lain. Di dalam masyarakat terdapat tiga subsistem yang saling interaktif yakni sosial, sistem ekonomi dan sistem fisik atau lingkungan.

Tiga teori sosial dan ekonomi yang mendukung lingkungan hidup, dikemukakan Paulston sebagaimana dikutip oleh Sudjana (2000)

terdiri dari, teori fungsi (*functional theory*), teori modal manusia (*human capital theory*) dan teori gerakan masyarakat (*social movement theory*).

Hadi (2005¹) menyatakan bahwa dampak sosial muncul ketika terdapat aktivitas proyek, program atau kebijaksanaan yang akan ditetapkan pada suatu masyarakat. Bentuk intervensi ini mempengaruhi keseimbangan pada suatu sistem (masyarakat). Pengaruh ini bisa positif, bisa juga negatif. Hal ini dapat diuji dari nilai, norma, aspirasi dan kebiasaan dari masyarakat yang bersangkutan.

Ada beberapa tehnik yang digunakan untuk memperkirakan dampak sosial. Pertama adalah scenario masa depan (*future scenario*). Dalam tehnik ini peneliti menyajikan sebuah cerita tentang potensi dampak yang akan terjadi yang didasarkan pada kondisi sekarang dan mengasumsikan kemungkinan yang terjadi di masa depan (Hadi 2005²). Kedua adalah tehnik permainan dan simulasi. Menurut Lang dan Armour (1980), pada prinsipnya tehnik ini mempertautkan interaksi antar *events*. Ketiga, adalah menggunakan tehnik delphi. Melalui tehnik delphi, consensus di antara *partisipants* tentang keadaan di masa datang disusun (Hadi, 2005²). Selanjutnya Hadi,(2005²) menyatakan bahwa, tehnik keempat adalah proyeksi *time series*. Tehnik kelima adalah model input – output yang mencari hubungan spesifik dari pembangunan dengan antisipasi hasil. Connor (1988), mengajukan tehnik keenam yaitu tehnik dimana para ahli mengestimasi masa depan dengan menarik pengalaman tentang pembangunan sejenis di tempat lain. Disamping beberapa tehnik di atas, Krawetz (1988), mengajukan teknik perkiraan dampak dapat pula menggunakan tehnik kunjungan lapang dan penilaian para ahli (*professional judgement*).

2. Perkembangan Pariwisata

Pariwisata (*tourism*) sering diasosiasikan sebagai rangkaian perjalanan seseorang atau kelompok orang (wisatawan, turis) ke suatu tempat untuk berlibur, menikmati keindahan alam dan budaya (*sightseeing*), bisnis, mengunjungi kerabat dan tujuan lainnya (Ramly, 2007).

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait di bidang tersebut. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala yang menjadi sasaran wisata. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk mamenuhi kebutuhan pariwisata.

Tourism is a vast growing industry in the world and the increasingly rapi economic growth in the Asia Pasific region has opened opportunities for tourism development in Indonesia are among others : (1) rich cultural heritage; (2) scientific landscape; (3) proximity to major growth markets of Asia; (4) large and increasingly wealthy population that will provide a strong domestic market; (5) large, relatively low cost and work force (Faulkner, 1997).

Dampak atau isu yang berkembang seiring dengan perkembangan pariwisata antara lain : penguasaan ekonomi yang tidak

seimbang, terbatasnya nilai tambah lokal (*local added value*), minimnya keterlibatan masyarakat lokal, dampak lingkungan pariwisata, terkikisnya kearifan sosial dan nilai budaya serta meningkatkan biaya hidup dan beban bagi penduduk lokal (Hadi, 2007).

Lebih lanjut Hadi (2007) menyatakan bahwa, pariwisata dewasa ini cenderung memberikan manfaat kepada perusahaan global (imperialisme baru) dan bersifat wisata masal (*mass tourism*), yang berorientasi hanya sekedar menikmati keindahan alam (*sea, sand and sun*), tanpa mempertimbangkan pengembangan nilai tambah untuk masyarakat lokal (*local value added*), nilai sosial budaya dan dampak lingkungan.

Pengembangan kawasan wisata merupakan alternatif yang diharapkan mampu mendorong baik potensi ekonomi maupun upaya pelestarian. Pengembangan kawasan wisata dilakukan dengan menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam dan hayati secara terpadu. Pada tahap berikutnya dikembangkan model pengelolaan kawasan wisata yang berorientasi pelestarian lingkungan (Ramly, 2007).

Lebih lanjut Ramly (2007) menyatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi penting dan strategis di masa datang. Identifikasi dan perencanaan pengembangan industri pariwisata perlu dilakukan secara lebih terperinci dan matang. Pengembangan industri pariwisata ini diharapkan juga mampu menunjang upaya pelestarian alam, kekayaan hayati dan kekayaan budaya. Pengembangan kawasan wisata merupakan alternatif yang diharapkan mampu mendorong baik potensi ekonomi daerah maupun upaya-upaya pelestarian lingkungan.

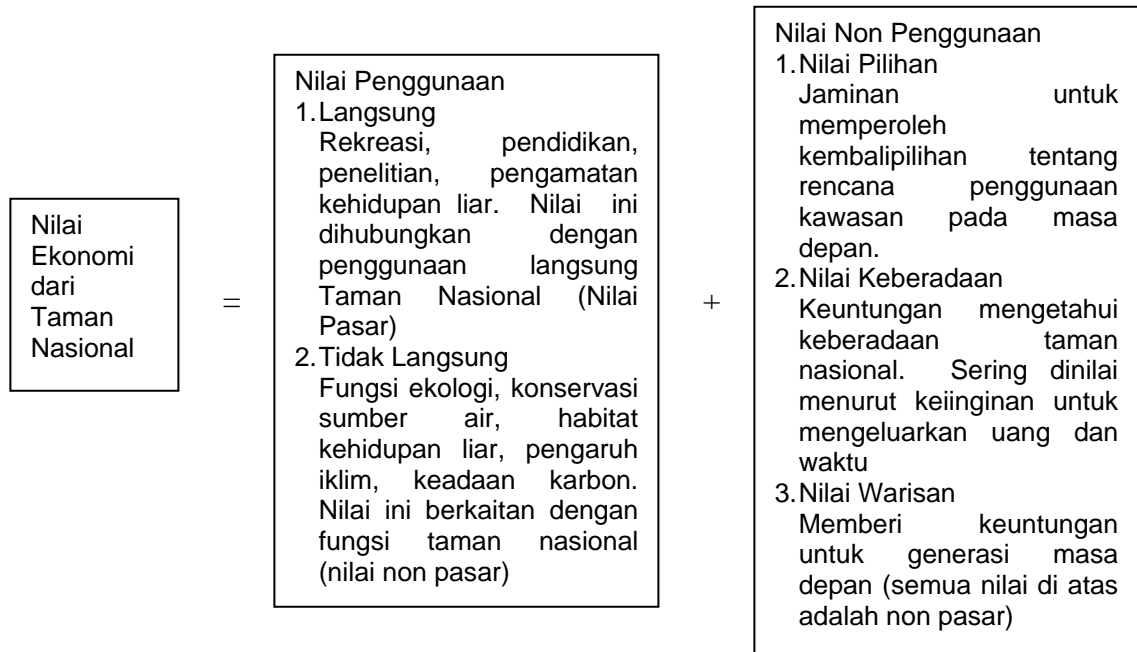
Fandeli dan Nurdin (2005) menyatakan bahwa, pariwisata selama ini telah terbukti menghasilkan beberapa keuntungan ekonomi. Namun bentuk pariwisata yang menghasilkan wisatawan massal telah

menimbulkan berbagai masalah utamanya menyebabkan terjadinya dampak negatif terhadap sosial budaya dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian pariwisata massal ini tidak sesuai dengan sebutan *green industry*. *Green industry* sangat sesuai dengan pariwisata yang berbasis alam utamanya ekowisata.

Pembangunan pariwisata hendaknya dilaksanakan secara bertahap/gradual, disertai dengan pengukuran dampak ekonomi untuk menimbang sejauhmana pariwisata telah mampu meningkatkan PAD dan perbandingannya dengan anggaran yang telah dikeluarkan. Pengukuran ekonomis lain yang diperlukan adalah sejauhmana pengeluaran masyarakat terserap dalam perekonomian lokal (*retention*) dan sejauhmana tingkat kebocoran ekonomi (*leakages*) yang diakibatkan oleh sektor pariwisata (Gunawan, dkk. 2000).

Menurut Mitchell, Setiawan dan Rahmi (2000), dampak ekonomi suatu kegiatan dapat diketahui dengan menggunakan Analisis Untung Rugi (*benefit-cost analysis*). Dalam bentuknya yang paling sederhana analisis untung rugi meliputi identifikasi semua keuntungan dan kerugian selama jangka waktu tertentu, menjabarkan nilai-nilai keuntungan dan kerugian serta menghitung perbandingan antara keuntungan dan kerugian.

Pariwisata di suatu kawasan sering dianggap sebagai nilai penggunaan langsung, tetapi kunjungan ke kawasan pariwisata mempengaruhi nilai yang lain. Setelah wisatawan mengunjungi suatu kawasan mereka menyadari keberadaan kawasan tersebut dan mendorong untuk menyumbangkan dana dan meminta untuk dilindungi untuk generasi yang akan datang. Dalam hal ini dapat dipahami adanya nilai penggunaan dan nilai non penggunaan. Total Nilai Ekonomi sebagaimana gambar berikut :



Sumber : IUCN (1998) dalam Fandeli dan Nurdin (2005)

Gambar 2. Total Nilai Ekonomi dari Taman Nasional

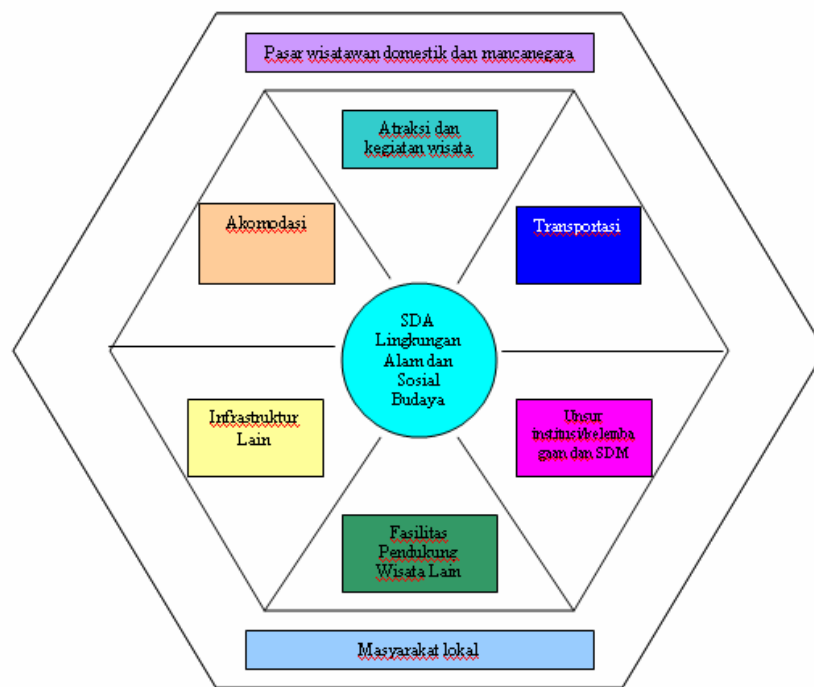
Pembangunan pariwisata telah mengubah lingkungan alami di lokasi tertentu sehingga perlu dipantau dan diikuti perkembangannya, agar dampak negatif yang mungkin terjadi dapat segera ditanggulangi sebelum menjadi lebih parah dan makin mahal penanganannya (Gunawan, dkk. 2000).

Pengembangan pariwisata dapat menimbulkan dampak negatif yang disebabkan oleh kunjungan wisatawan. Untuk penanganan dampak negatif dapat dianggarkan dari penghasilan yang didapat oleh kawasan. Biaya yang timbul dari pengembangan pariwisata ada tiga macam yaitu : biaya finansial dan ekonomi, biaya sosial budaya dan biaya lingkungan (Fandeli dan Nurdin, 2005).

Gunawan, dkk. (2000) menyatakan bahwa pengembangan industri pariwisata berkelanjutan berarti mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan ke dalam proses pengambilan

keputusan pengelolaan / manajemen di seluruh komponen industri pariwisata. Untuk itu perlu dilakukan program-program sebagai berikut ; (1) pengembangan system manajemen pariwisata berkelanjutan, (2) pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, (3) minimisasi dan pengelolaan limbah (4) perencanaan dan pengelolaan tata guna lahan (5) pelestarian sumberdaya alam dan warisan budaya serta (6) pengembangan sistem dan mekanisme keamanan dan keselamatan.

Kompenen pengembangan pariwisata sebagaimana tergambar dalam diagram berikut :



Sumber : Inskeep (1990) dalam Kuswara (2007) dengan modifikasi.

Gambar 3. Komponen Pengembangan Pariwisata

Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) memenuhi kebutuhan wisatawan dan daerah penerima saat ini, sambil melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan datang. Mengarah

pada pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dapat terpenuhi sambil memelihara integritas kultural, proses ekologi yang esensial, keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan (Gunawan, dkk., 2000)

Kepariwisata global telah mengalami pergeseran pola wisata dari mass tourism ke individual atau small group tourism. Di Indonesia kedua pola wisata tersebut berjalan bersamaan.

Tabel. 2 Model Pariwisata Global

	Pariwisata Masal	Pariwisata Baru
Permintaan Produk Wisata	Paket dalam grup	Wisatawan bebas
	Orientasi mendapat kesenangan	Orientasi pengalaman baru
	Berjemur, bersantai	Mencari variasi obyek minat khusus
Penawaran Pasar Wisata	Skala luas	Skala kecil
	Gaya Eropa	Gaya setempat
	Pelayanan standar	Pelayanan lokal
	Jaringan internasional	Pemilihan fasilitas lokal
	Obyek buatan	Obyek alami, masyarakat dan lingkungan alam

Sumber : Faulkner (1997)

Konsep pengembangan kepariwisataan Jawa Tengah merupakan landasan ideal untuk pengembangan program pariwisata Kabupaten Tegal, terutama pengembangan obyek wisata cacaban. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Jawa Tengah, obyek wisata cacaban termasuk dalam Wilayah Pariwisata Potensial (WPP) F dengan basis pengembangan produk wisata alam dan agro (Bapeda Kabupaten Tegal, 2005).

Lokasi Kawasan Waduk Cacaban secara lengkap sebagaimana tersaji dalam gambar 4.

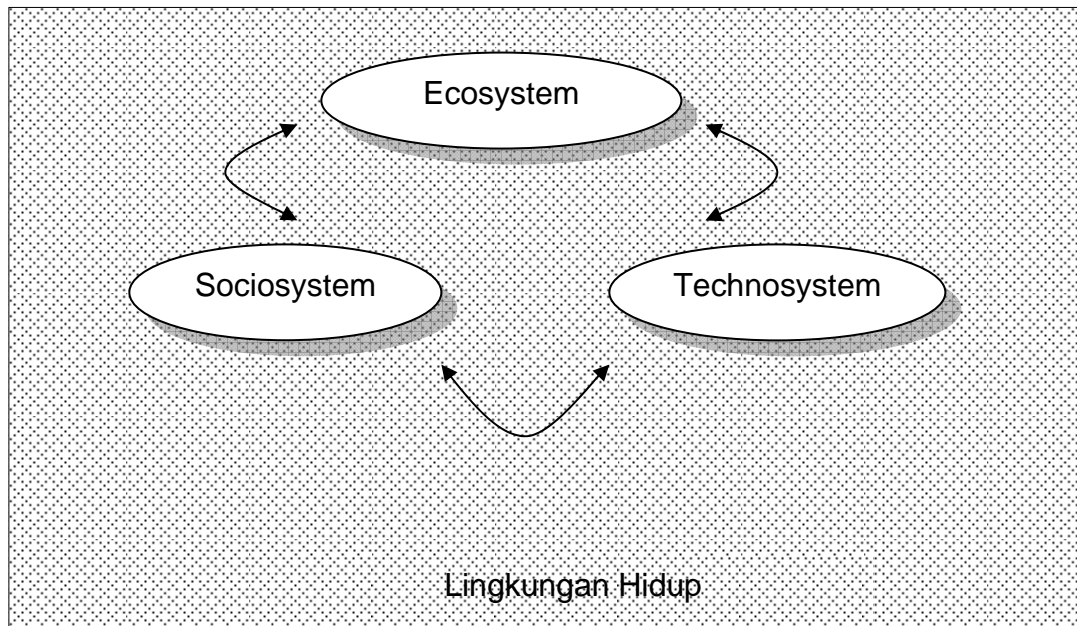


Sumber : Bapeda Kabupaten Tegal (2003).

Gambar 4. Lokasi Kawasan Waduk Cacaban

3. Pola Pemanfaatan Lahan di Kawasan Wisata

Lingkungan hidup adalah lingkungan di sekitar manusia, tempat organisme dan anorganisme berkembang dan saling berinteraksi (Borong, 1999). Sebagai suatu sistem, lingkungan hidup terdiri atas lingkungan sosial (*sociosystem*), lingkungan buatan (*technosystem*) dan lingkungan alam (*ecosystem*) (Soerjani, 1997). Ketiga subsistem tersebut saling berinteraksi dalam membentuk satu kesatuan lingkungan hidup :



Sumber : <http://www.freewebs.com/mastomi>

Gambar 5. Sistem Lingkungan Hidup

Menurut Ramly (2007), lingkungan alami (ekosistem) adalah lingkungan yang tidak terlalu didominasi manusia sehingga makhluk hidup lainnya mempunyai kesempatan dan ruang untuk hidup wajar. Lingkungan sosial (sosiosistem) adalah lingkungan yang di dalamnya manusia berinteraksi dengan sesamanya baik berdasarkan pola hubungan struktural maupun fungsional. Lingkungan buatan atau lingkungan binaan (tekno sistem) adalah lingkungan tempat manusia memenuhi kebutuhannya dengan menerapkan teknologi seperti pertanian, perumahan, transportasi, perindustrian, kawasan wisata dan lainnya. Lingkungan buatan didominasi oleh manusia.

Berdasarkan sifat dan komponennya, ada dua jenis lingkungan : lingkungan bio-geo-kimia-fisika dan lingkungan sosial budaya. Berdasarkan perubahan yang terjadi ada tiga kategori lingkungan : lingkungan alami, lingkungan sosial dan lingkungan buatan (Sugandhy, 1999).

Kaplan dan Manner (2000), menyatakan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap budaya atau budaya berpengaruh terhadap lingkungan, dalam istilah modern disebut kausalitas timbal balik (*reciprocal causality*).

Ramly (2007) menyatakan bahwa, pariwisata sebagai lingkungan hidup binaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata lingkungan binaan, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut tanpa merusak lingkungannya.

4. Pola Pemanfaatan Lahan di Kawasan Waduk

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 17 menyebutkan bahwa, dalam rangka pelestarian lingkungan, dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan undang-undang dimaksud bahwa penetapan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daerah aliran sungai dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan tata air, karena sebagian wilayah Indonesia mempunyai curah hujan dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi serta kekurangan air.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Selanjutnya pada pasal 5 kawasan perlindungan setempat terdiri dari :

- a. Sempadan Pantai.
- b. Sempadan Sungai.
- c. Kawasan Sekitar Danau/Waduk.
- d. Kawasan Sekitar Mata Air.

Berdasarkan Kepres 32 Tahun 1990 Pasal 8 , kriteria kawasan hutan lindung adalah :

- a. Kawasan hutan dengan faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi skor 175 dan atau;
- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih dan atau;
- c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

Suatu bentang lahan akan ditetapkan sebagai kawasan lindung terhadap bawahannya kalau skor dari tiga kriteria mencapai 175, jika nilainya antara 125-174 ditetapkan sebagai kawasan penyangga sedangkan apabila nilainya di bawah 125 maka bentang lahan tersebut menjadi lahan dengan fungsi budidaya. Untuk lebih jelasnya deskripsi kelas lereng, jenis tanah dan curah hujan beserta skornya akan disajikan dalam tabel berikut :

- a. Kelas Lereng

Tabel 3. Deskripsi Kelas Lereng dan Skor Nilainya

No.	Kelas	Interval (%)	Deskripsi	Skor
1	I	0-8	Datar	20
2	II	8-15	Landai	40
3	III	15-25	Agak Curam	60
4	IV	25-40	Curam	80
5	V	> 40	Sangat Curam	100

Sumber : Khadiyanto (2005)

b. Jenis Tanah

Tabel 4. Deskripsi Jenis Tanah, Tingkat Erosivitas dan Skor

No.	Jenis Tanah	Kepekaan Erosi	Skor
1	Aluvial, Tanah Glej, Planosol, Hydromorf kelabu	Tidak Peka	15
2	Latosol	Agak Peka	30
3	Brown forestsoil, non calcic brown, mediteran	Kurang Peka	45
4	Andosol, laterrite, gamosol, pedosol, podsolik	Peka	60
5	Regosol, litosol, organosol, renzina	Sangat Peka	75

Sumber : Khadiyanto (2005)

c. Curah Hujan

Tabel 5. Deskripsi Intensitas Hujan, Deskripsi dan Skor

No.	Intensitas Hujan (mm/th)	Deskripsi	Skor
1	0-1.500	Sangat Rendah	10
2	1.500-2.000	Rendah	20
3	2.000-2.500	Sedang	30
4	2.500-3.000	Tinggi	40
5	>3.000	Sangat Tinggi	50

Sumber : Khadiyanto (2005)

Lebih lanjut pasal 17 dan 18 Kepres 32 Tahun 1990 menyatakan bahwa, perlindungan kawasan sekitar danau/waduk dilakukan untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk. Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah darat sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proposional

dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pengelolaan sumberdaya lahan dipandang penting dan didasari oleh pertimbangan bahwa proses-proses pembangunan yang akan terjadi di Indonesia masih akan ditumpukan pada potensi sumberdaya tanah. Empat sub agenda dirumuskan dalam hal ini yakni : (1) penatagunaan sumberdaya tanah (2) pengolahan hutan, (3) pengembangan pertanian dan perdesaan dan (4) pengelolaan sumberdaya air (Mitchell, Setiawan dan Rahmi, 1997).

Tema-tema utama dalam pengelolaan ekosistem meliputi : (1) konteks yang hirarki, (2) batas-batas ekologi, (3) keterpaduan ekologi, (4) pengumpulan data, (5) pemantauan, (6) pengelolaan adaptif, (7) kerjasama antar lembaga, (8) perubahan organisasi, (9) manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari alam dan (10) nilai (Grumbine, 1994).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah pasal 16, bahwa penggunaan dan pemafaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk dan atau sempadan sungai harus memperhatikan :

- a. Kepentingan umum.
- b. Keterbatasan daya dukung, pembangunan berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keaneka ragaman hayati serta kelestaraan fungsi lingkungan.

Lebih lanjut pada pasal 18 menyebutkan bahwa pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung dapat ditingkatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ekowisata apabila tidak mengganggu fungsi lindung.

Pola pemanfaatan lahan di sekitar kawasan waduk diutamakan untuk upaya konservasi tanah. Menurut Suripin (2002), konservasi tanah

dapat dilakukan dengan cara agronomis, mekanis dan kimia. Konservasi tanah secara agronomis dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain :

- a. Pertanaman tanaman secara terus menerus (*permanent plant cover*).
- b. Pertanaman dalam strip (*strip cropping*).
- c. Pertanaman berganda (*multiple cropping*).
- d. Pertanaman bergilir (*rotation cropping*).
- e. Pemanfaatan mulsa (*residue management*).
- f. Sistem pertanian hutan (*agroforestry*).

Penggundulan hutan yang mencapai titik terburuk pada 1998 tepat pada awal masa reformasi. Kawasan *catchment area* waduk sebagian besar mengalami kerusakan. Penggundulan hutan yang menyebabkan turunnya debit air tanah serta pendangkalan waduk akibat erosi membuat permukaan air waduk surut tajam. Salah satunya terjadi di kawasan waduk Pondoh di Jawa Timur.

Lahan gundul di hutan milik negara kemudian digarap masyarakat petani di kawasan itu untuk bercocok tanam. Mereka menanam palawija jagung, kedelai, kacang tanah, cabai, dan pisang, dengan pola tumpangsari di antara tanaman pokok Perhutani (*agroforestry*). Keberhasilan inisiatif menghutankan kembali kawasan waduk juga akan menambah eksotisme Waduk Pondok. Perpaduan unsur hutan dan danau buatan tersebut dapat menjadi obyek wisata (www.perumperhutani.co.id).

Kawasan waduk juga memiliki potensi perikanan yaang dapat dikembangkan secara intensif. Menurut Krismono (1995), luas perairan danau dan waduk di Indonesia adalah 2,6 juta hektar. Pengelolaan perikanan di perairan waduk penting dan perlu dikembangkan karena sumberdaya alam perikanan akan merupakan sumberdaya hayati pengganti dari lahan daratan yang digenangi. Pola produktivitas perikanan

di waduk dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: tipe waduk, kesuburan, dan pengelolaan perikanan.

Pengelolaan perairan waduk sebagai salah satu sumberdaya alam, untuk keperluan lain di luar perikanan, diarahkan untuk menjaga keserasian antara kegiatan-kegiatan manusia dan pembinaan mutu lingkungannya. Sebagai modal dasar, sumberdaya alam harus dimanfaatkan sepenuhnya tetapi dengan cara-cara yang tidak merusak (Sarnita, 1986).

5. Pengertian dan Potensi Ekowisata

Berdasarkan dua kata *eco* dan *tourism*, yang ketika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *eko* dan *turisme* atau *eko* dan *wisata*. Makna dasar dari 2 kata tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, *eko* yang dalam bahasa Greek (Yunani) berarti rumah, dan *tourism* yang berarti wisata atau perjalanan. Pengertian selanjutnya oleh beberapa ahli kata *Eco* dapat diartikan sebagai *Ecology* atau *Economy* sehingga dari kedua kata tersebut akan memunculkan makna Wisata ekologis (*Ecological Tourism*) atau Wisata Ekonomi (*Economic Tourism*) dan hal ini masih terus diperdebatkan oleh para ahli mengenai makna dari kata dasar tersebut (Dirawan, 2003).

Ecotourism is responsible travel to natural areas that conserves the environment and improved the well being of local people (Hadi, 2007). Selanjutnya Hadi (2007) menyatakan bahwa prinsip-prinsip ekowisata adalah meminimalkan dampak, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan budaya, memberikan pengalaman positif baik kepada turis (*visitors*) maupun penerima (*host*) dan memberikan manfaat dan keberdayaan masyarakat lokal.

Untuk lebih jelas mengenai beberapa pendapat para ahli *ecotourisme*. World Tourism Organisation (WTO) dan United Nations

Environment Program (UNEP) menyatakan “*Ecotourism involves traveling to relatively undisturb natural areas with the specific objective of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plants and animals as well as any existing cultural aspect found in those area*”

Selanjutnya , Ziffer (1989) menyatakan “ *a form of tourism inspired primary by the natural history of an area , including its indegeniouse cultures , the ecotourist visit underdeveloped areas in the spirit of the appreciation , participation and sensivity*”.

Namun, pada hakekatnya, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian alam (natural area), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Pendekatan lain bahwa ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan. Maksud dari menjamin kelestarian ini seperti halnya tujuan konservasi (UNEP, 1980) sebagai berikut:

1. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan.
2. Melindungi keanekaragaman hayati.
3. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya.

Menurut *The International Ecotourism Society* atau TIES (1991), ecotourism adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah alami dalam rangka mengkonservasi atau menyelamatkan lingkungan dan memberi penghidupan penduduk lokal. Menurut *World Conservation Union* (WCU), *ecotourism* adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah yang lingkungan alamnya masih asli, dengan menghargai warisan budaya dan alamnya, mendukung upaya-upaya konservasi, tidak menghasilkan dampak negatif, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi serta menghargai partisipasi penduduk lokal.

Ecotourism adalah sebagian dari *sustainable tourism*. *Sustainable tourism* sektor ekonomi yang lebih luas dari *ecotourism* yang mencakup sektor-sektor pendukung kegiatan *tourism* secara umum. Menurut deklarasi Quebec (hasil pertemuan dari anggota TIES di Quebec, Canada tahun 2002), *Ecotourism* adalah *sustainable tourism* yang secara spesifik memuat upaya-upaya:

1. Kontribusi aktif dalam konservasi alam dan budaya
 2. Partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan, pembangunan dan operasional kegiatan wisata serta meninkamti kesejahteraan.
 3. Transfer pengetahuan tentang warisan budaya dan alam kepada pengunjung
 4. Bentuk wisata independen atau kelompok wisata berukuran kecil
- Sementara itu WCD (2000) menyatakan bahwa *ecotourism*

adalah *sustainable tourism* yang dapat :

1. Menjamin partisipasi yang setara, efektif dan aktif dari seluruh stakeholder
2. Menjamin partisipasi penduduk lokal menyatakan yess atau no dalam kegiatan pengembangan masyarakat, lahan dan wilayah
3. Mengangkat mekanisme penduduk lokal dalam hal kontrol dan pemeliharaan sumberdaya.

Sementara itu Wood (2002) mendefinisikan *ecotourism* sebagai bentuk usaha atau sektor ekonomi wisata alam yang dirumuskan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan definisi, konsep atau pengertian di atas, maka dapat disusun difinisi baru sebagai berikut:

Ecotourism adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya,

partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan (Nugroho, 2004)

Ekowisata merupakan sebuah istilah baru yang masih sangat sering dibicarakan di berbagai Negara saat ini karena melihat potensi untuk mengembangkan pariwisata baru dan mempromosikan konservasi alam disamping dapat memberikan keuntungan pada masyarakat lokal (Ziffer, 1989) menyatakan bahwa *“Ecotourism no seen as model of development in which natural areas are planned as part of the tourism base and biologicall resources are clearly liked to social economic sector”*.

Pada saat ini ekowisata telah berkembang. Wisata ini tidak hanya sekedar untuk melakukan pengamatan burung, mengendarai kuda, penelusuran jejak hutan belantara, tetapi terkait dengan konsep pelestarian hutan dan penduduk lokal. Ekowisata ini kemudian merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial. Ekowisata tidak dapat dipisahkan dengan konservasi. Oleh karenanya, ekowisata disebut sebagai bentuk perjalanan wisata bertanggung jawab (Fandeli dan Mukhlison, 2000).

Ekowisata diberi batasan sebagai bentuk dan kegiatan wisata yang bertumpu pada lingkungan dan bermanfaat secara ekologi, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat lokal serta bagi kelestarian sumberdaya alam dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Lima aspek utama untuk berkembangnya ekowisata adalah : (1) adanya keaslian lingkungan alam dan budaya (2) keberadaan dan daya dukung masyarakat (3) pendidikan dan pengalaman (4) berkelanjutan dan (5) kemampuan manajemen dalam pengelolaan ekowisata (Choy, 1997).

Menurut Damanik dan Weber (2006), potensi kawasan ekowisata di Indonesia sangat besar. Objek tersebut tersebar di darat (dalam kawasan hutan konservasi) maupun di lau (dalam bentuk taman nasional laut). Potensi ekowisata terdiri dari beberapa elemen penawaran wisata yang sering disebut sebagai triple A`s yang terdiri dari atraksi, aksesibilitas dan amenitas.

Atraksi dapat dibagi menjadi tiga yakni alam, budaya dan buatan. Atraksi alam meliputi pemandangan alam seperti danau Kelimutu atau Gunung Bromo. Atrakasi budaya meliputi peninggalan sejarah seperti candi Prambanan, adat istiadat masyarkat seperti Pasar Terapung di Kalimantan.

Aksesiblitas mencakup infrastruktur transportasi yang menghubungkan wisatawan "dari", "ke" dan "selama di" daerah tujuan wisata (Inskeep, 1994). Amenitas adalah infrastruktur yang sebenarnya tidak langsung terkait dengan pariwisata tetapi sering menjadi bagian dari kebutuhan wisatawan seperti, bank, telekomunikasi, buku panduan wisata dan seni pertunjukan.

6. Kebijakan pengembangan Ekowisata

Pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat pada suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik, memajukan sesuatu yang lebih awal kepada yang lebih akhir atau dari yang sederhana kepada yang lebih kompleks. Pengembangan meliputi kegiatan mengaktifkan sumberdaya, memperluas kesempatan mengakui keberhasilan dan mengintegrasikan kemajuan (Ramly, 2007).

Lebih lanjut Ramly (2007) menyatakan bahwa, dari segi kualitatif, pengembangan berfungsi sebagai upaya peningkatan yang meliputi penyempurnaan program kearah yang lebih baik. Dimana hal-hal yang dikembangkan meliputi aktivitas manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

Model-model perencanaan telah dikembangkan, masing-masing merefleksikan nilai-nilai yang berbeda, aumsi dan keyakinan tentang hakekat dari dunia perencanaan dilakukan. Beberapa model perencanaan diantaranya perencanaan sinoptik, perencanaan bertahap (*incremental*), *mixed scanning* dan perencanaan transaktif (Mitchell, Setiawan dan Rahmi, 1997).

Implementasi pembangunan top down telah menyebabkan proporsi dan konstelasi peranan tiga *stakeholder* pembangunan menjadi timpang. Negara dan swasta menjadi sangat dominan sedangkan masyarakat berada pada posisi marjinal. Bertolak dari hal tersebut diperlukan sebuah pembangunan alternatif yang lebih berorientasi pada usaha menghilangkan marginalisasi dan memperkuat sektor masyarakat. Pada aras ini maka pembangunan yang berbasis masyarakat (*community-based development*) menjadi sangat relevan untuk diimplementasikan (Suparjan dan Suyatno, 2003).

Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat salah satunya menggunakan metode 7 (tujuh) langkah perencanaan (*seven magic step*) yang meliputi tahap definisi masalah, tujuan, analisis kondisi, alternatif kebijakan, pilihan alternatif, implementasi dan pemantauan (Hadi, 2005).

Boothroyd (1991), *the nature of each seven magic step can be elaborated as (1) define your palnning task, (2) Identify your goals, (3) appraise the relevant fact, (4) generate many action possibilities, (5) package the possibilities in terms of compatible and mutually options, (6) Assess the pros and cons of each option and (7) decide on an option to adopt (or to recommend) using culturally appropriate procedures.*

Kualitas lingkungan menurun pada dasarnya dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu meningkatnya kebutuhan ekonomi (*economic requirement*) dan gagalnya kebijakan yang diterapkan (*policy failure*) (Ramly, 2007).

Peningkatan kebutuhan yang tak terbatas sering membuat tekanan yang besar terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada. Lingkungan masih dipandang sebagai instrumen ekonomi, bukan sebagai fungsi intrinsiknya. Akar masalah kerusakan lingkungan selama ini berasal dari kesalahan cara pandang manusia tentang dirinya, alam dan hubungan manusia dengan alam. Oleh karena itu, percepatan pembangunan ekonomi selayaknya diimbangi dengan ketersediaan sumber daya dan lingkungan yang lestari.

Penduduk lokal akan memiliki insentif konservasi lingkungan apabila ia dilibatkan dalam jasa-jasa ekowisata, pemberian informasi dan memperoleh benefit yang pantas (Nugroho, 2004)

Fandeli dan Mukhlison (2000), untuk dapat melihat sisi positif dan sisi negatif dari pengembangan pariwisata terlebih dahulu perlu diperhatikan beberapa hal bagi setiap perencana wisata karena hal ini akan menyangkut kelangsungan pertumbuhan kawasan wisata dan juga tentunya akan menyangkut kelangsungan para pelaku wisata yang berada dalam kawasan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- Volume atau Jumlah dari wisatawan
- Karakteristik dari wisatawan dengan berbagai keinginan untuk berwisata
- Type dari aktifitas wisata yang dapat ditawarkan pada sebuah kawasan
- Wisata beserta dengan variasi wisata yang mungkin dilakukan
- Struktur masyarakat yang berada pada kawasan wisata tersebut
- Kondisi lingkungan sekitar yang berada pada kawasan tersebut
- Kemampuan masyarakat untuk dapat mengadaptasi dari perkembangan kepariwisataan

Fandeli dan Nurdin (2005), menyatakan bahwa apakah wisata itu berbentuk alamiah maupun buatan manusia merupakan hal yang terpenting dalam pembangunan industri wisata hanya saja ketika wisatawan mulai datang perubahan terhadap lingkungan baik itu berupa lingkungan fisik maupun biologis tentunya akan berubah . Dari sisi positif adanya keinginan dari pihak pengelola untuk :

- Mempreservasi dan restorasi benda budaya seperti bangunan dan kawasan bersejarah
- Pembangunan taman nasional dan taman suaka margasatwa
- Melindungi pantai dan taman laut
- Mempertahankan hutan

Dari sisi negatifnya kegiatan wisata akan menyebabkan :

- Polusi suara , air dan tanah
- Perusakan secara fisik lingkungan sekitarnya
- Pembangunan hotel hotel yang megah tanpa melihat kondisi lingkungan
- Perusakan hutan, perusakan monumen bersejarah, vandalisme

Sehingga dibutuhkan sebuah kebijakan dalam menata sebuah perjalanan wisata yang dapat memberikan efek positif dibandingkan dengan efek negatifnya.

Peningkatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan meliputi insiatif pembangunan kepariwisataan oleh pemerintah daerah, menggalang kesepakatan dengan para pihak, mengintegrasikan pariwisata dalam rencana pembangunan daerah yang komprehensif, memaksimalkan keterkaitan antar sektor pembangunan di daerah dan mengangkat identitas lokal dalam kepariwisataan daerah (Gunawan, dkk. 2000)

Dalam perencanaan diperlukan adanya definisi atau kategori dari suatu kawasan. Kategori kawasan yang dilindungi menurut (IUCN, 1994) adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Kategori Kawasan Lindung

Kategori	Deskripsi
I	Kawasan pelestarian atau hutan rimba yang benar-benar tidak boleh dimanfaatkan kecuali hanya untuk perlindungan satwa liar dan penelitian
Ia	Kawasan pelestarian yang hanya boleh dimanfaatkan untuk penelitian saja
Ib	Kawasan hutan rimba atau alam liar; hanya untuk pelestarian satwa liar saja (wilderness area)
II	Kawasan yang dikelola terutama untuk keseimbangan ekosistem dan rekreasi (national park)
III	Kawasan yang diperuntukkan untuk konservasi spesies tertentu (natural monument)
IV	Kawasan konservasi yang mengizinkan campur tangan manusia dalam pengelolaan konservasi (habitat/ species management area)
V	Kawasan lanskap yang dilindungi dan dikelola untuk konservasi dan rekreasi (protected landscape/seascape)
VI	Kawasan yang dikelola terutama untuk menyokong keberlanjutan suatu ekosistem alami

Sumber : IUCN (1994)

Kawasan waduk cacaban berdasarkan kategori sebagaimana di atas tergolong dalam kategori V. Kawasan waduk cacaban merupakan kawasan lanskap yang dilindungi dan dikelola untuk konservasi dan rekreasi. Lebih lanjut IUCN (1994), menyusun matrik sasaran manajemen dan kategori kawasan pelestarian sebagai berikut :

Tabel 7. Matrik Sasaran Manajemen dan Kategori Kawasan Pelestarian

Sasaran Manajemen	Kategori						
	Ia	Ib	II	III	IV	V	VI
Penelitian ilmiah	1	3	2	2	2	2	3
Perlindungan hutan rimba	2	1	2	3	3	-	2
Preservasi keanekaragaman spesies dan hayati	1	2	1	1	1	2	1
Perlindungan lingkungan	2	1	1	-	1	2	1
Perlind lingk alami dan budaya spesifik	-	-	2	1	3	1	3
Pariwisata dan rekreasi	-	2	1	1	3	1	3
Pemnafaatan ekosistem berkelanjutan	-	3	3	-	2	2	1
Pengelolaan budaya tradisional	-	-	-	-	-	1	2
Pendidikan	-	-	2	2	2	2	3

Keterangan : 1; sasaran utama, 2; sasaran kedua, 3; sasaran potensial dan dapat dicapai, - ; tidak dapat dilaksanakan.

Sumber : IUCN (1994)

Pariwisata dalam kawasan yang dikonservasi memiliki keuntungan banyak dan sebagai sumber pembiayaan kawasan. Interaksi kedua faktor ini sering terjadi secara rumit. Pada dasarnya menjadi tanggung jawab perencana kawasan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Walaupun perencana tidak menyediakan analisis secara detail tentang semua pengaruh pariwisata dan biaya, tetapi dapat dilaksanakan identifikasi biaya-biaya dan keuntungannya antara lain (1) meningkatkan pengembangan di di bidang ekonomi, (2) Konservasi alam dan budaya dan (3) Meningkatkan kualitas kehidupan dalam masyarakat lokal (Fandeli dan Nurdin, 2005).

Pengembangan produk-produk pariwisata dan aktivitas wisata pada suatu kawasan dapat dirinci terdiri dari (1) atraksi-atraksi yang dikembangkan dipilih yang memiliki nilai jual tinggi baik atraksi alam, heritage, budaya dan obyek buatan, (2) infrastruktur (fasilitas, utilitas) dibangun sesuai dengan budaya dan tradisi lokal serta terpadu dengan lingkungannya, (3) kelembagaan lokal diperkuat dan diberikan peranan yang lebih besar, (4) sumberdaya Manusia merupakan penentu keberhasilan pariwisata sesuai dengan sasarannya, (5) aspek ekonomi yang dikembangkan adalah ekonomi kerakyatan. Penghasilan kawasan dimaksud untuk dapat mempertahankan atau mengkonservasi kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, (6) Lingkungan kawasan pariwisata perlu dikaji kelayakannya, terutama dampak positif dan dampak negatif yang akan muncul. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan instrumen untuk mengkaji dampak lingkungan dan bagaimana menanganinya (Fandeli dan Nurdin, 2005).

Untuk dapat mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan harus ditetapkan indikator. Indikator ini dapat dipergunakan sebagai bahan untuk monitoring dan evaluasi. Ada 11 (sebelas) indikator yang dapat ditentukan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8. Indikator Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

No	Indikator	Ukuran Spesifik
1	Perlindungan lokasi	Menurut IUCN ada 3 aspek yaitu daya dukung, tekanan terhadap areal dan daya tarik.
2	Tekanan/cekaman	Jumlah wisatawan yang berkunjung per tahun / bulan / masa puncak
3	Intesitas pemanfaatan	Intensitas pemanfaatan pada waktu puncak (wisatawan/ha)
4	Dampak sosial	Rasio antara wisatawan dan penduduk lokal (pada waktu puncak / rata-rata)
5	Pengawasan pembangunan	Adanya prosedur secara formal terhadap pembangunan di lokasi dan pemanfaatannya.
6	Pengelolaan limbah	Persentase limbah terhadap kemampuan pengolahan. Demikian pula terhadap rasio kebutuhan dan suplai air bersih.
7	Proses perencanaan	Mempertimbangkan perencanaan regional termasuk perencanaan wisata (regional).
8	Ekosistem kritis	Jumlah species yang jarang dan dilindungi
9	Kepuasan pengunjung	Tingkat kepuasan pengunjung didasarkan pada kuisoner terhadap wisatawan.
10	Kepuasan penduduk lokal	Tingkat kepuasan penduduk lokal berdasarkan kuisoner
11	Kontribusi pariwisata terhadap ekonomi lokal	Proporsi antara pendapatan total dengan pendapatan dari pariwisata.

Sumber : World Tourism Organization (1996)

Menurut Ishak (2000), model adalah representasi yang diperkecil dari suatu benda atau suatu keadaan yang dimaksudkan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau menemukan sifat-sifat bentuk aslinya. Model juga diartikan sebagai representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu.

Salah satu model operasional yang dikembangkan oleh Knowles sebagaimana dikutip oleh Ramly (2007), terdiri atas lima tahap kegiatan : (1) definisi masalah, (2) pengumpulan informasi, (3) indentifikasi alternatif pemecahan masalah, (4) pembuatan keputusan dan (5) implementasi tindakan.

BAB III

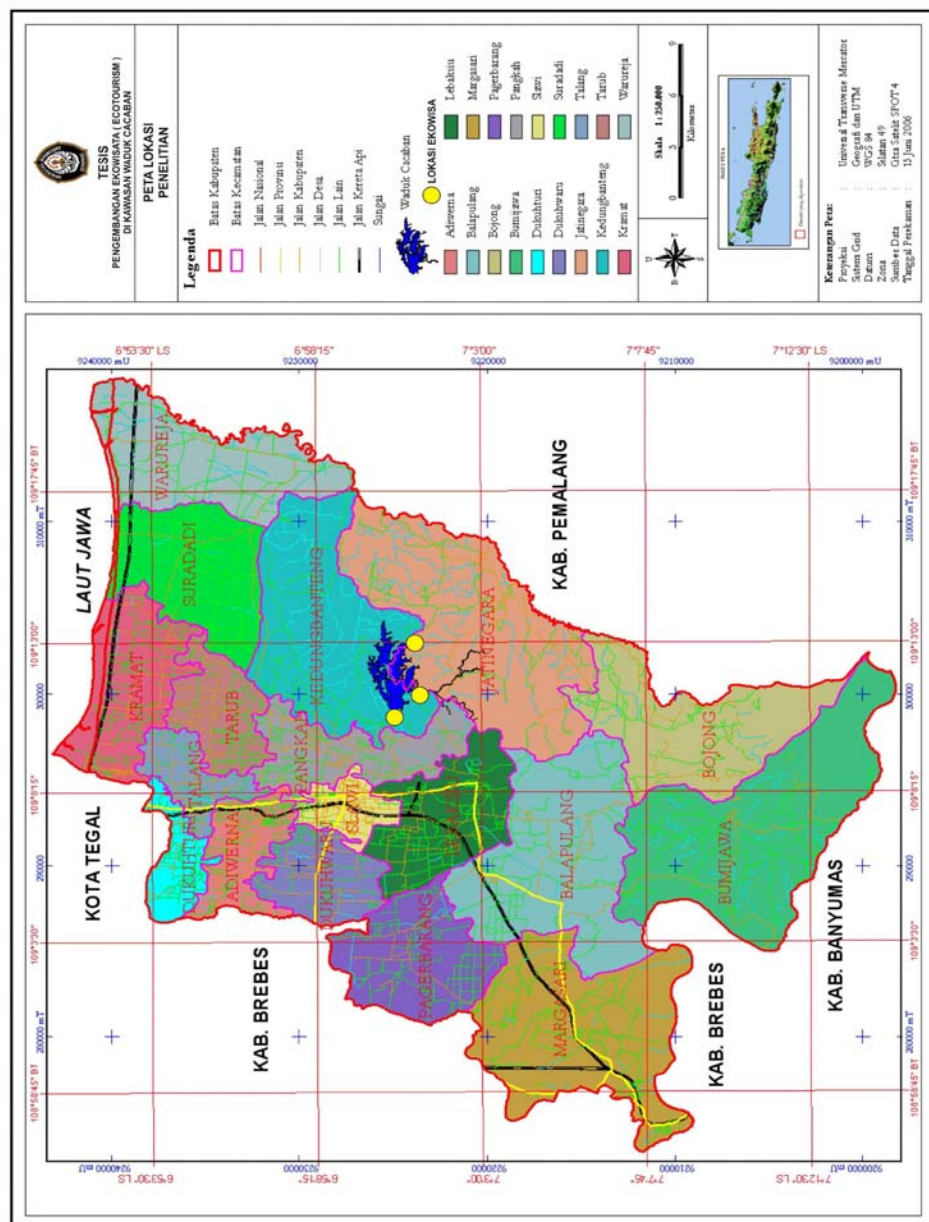
METODE PENELITIAN

1. Wilayah Studi

Dalam membatasi daerah studi, peneliti harus mampu menentukan batas geografis studi sehingga dapat mengkonsentrasikan pada area yang paling penting. Wilayah studi dapat berupa dukuh, desa atau kecamatan. Peneliti dapat menentukan apa yang disebut *study zone* didasarkan pada dampak yang akan mempengaruhi (Hadi, 2005²). Dalam penelitian ini digunakan dua batasan wilayah studi, yang pertama adalah batasan wilayah studi berdasarkan pertimbangan hidrologi waduk Cacaban dan yang kedua batasan wilayah studi berdasarkan wilayah geografis.

Batas wilayah hidrologi ditentukan berdasarkan cakupan daerah tangkapan air (*catcment area*) waduk Cacaban yang masuk dalam kawasan sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cacaban Wetan. Sedangkan batasan wilayah studi secara geografis ini meliputi 3 desa di 2 wilayah kecamatan, yaitu desa Wotgalih di kecamatan Jatinegara, desa Penujah serta desa Karanganyar di kecamatan Kedungbanteng.

Wilayah studi ditentukan berdasarkan keterkaitan wilayah terhadap obyek penelitian. Ketiga desa tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat terhadap keberadaan waduk Cacaban. Keterkaitan tersebut dapat dipertimbangkan dari jarak ketiga desa yang relatif dekat dengan waduk Cacaban, pola mata pencaharian penduduk di ketiga desa dalam memanfaatkan sumberdaya di kawasan waduk dan ketiga desa tersebut termasuk dalam daerah tangkapan air (*catchment area*) waduk Cacaban. Lokasi penelitian Pengembangan Ekowisata (*ecotourism*) di Kawasan Waduk Cacaban sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



Gambar 6. Lokasi Penelitian

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian Pengembangan Ekowisata (*ecotourism*) di Kawasan Waduk Cacaban adalah penelitian deskriptif kualitatif. Nazir (2005), menguraikan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Metode deskriptif mempunyai beberapa kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum metode deskriptif meliputi ; (1) masalah yang dirumuskan harus patut, ada nilai ilmiah serta tidak terlalu luas, (2) tujuan penelitian dinyatakan dengan tegas dan tidak terlalu umum, (3) data yang digunakan berupa fakta-fakta yang terpercaya dan bukan merupakan opini, (4) standar yang digunakan untuk membuat perbandingan harus mempunyai validitas, (5) ada deskripsi yang terang tentang tempat serta waktu penelitian dan (6) hasil penelitian harus berisi secara detail, dalam pengumpulan data maupun menganalisa data (Nazir, 2005).

Penelitian ini secara detail akan memaparkan mengenai keadaan dan kondisi pengembangan pariwisata di kawasan waduk cacaban, disertai dengan data-data dan fakta-fakta yang berhubungan dengan pola pemanfaatan lahan di kawasan waduk Cacaban, potensi kawasan, kebijakan dan peran institusi dalam pengembangan kawasan waduk Cacaban dan beberapa faktor lain yang mempengaruhi, antara lain sikap dan perilaku masyarakat, wisatawan, peran lembaga dan partisipasi masyarakat.

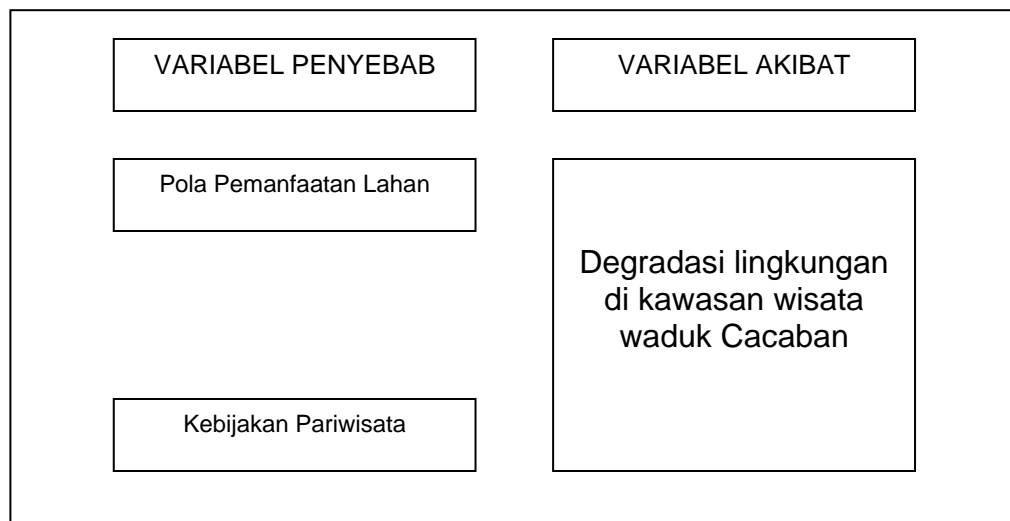
Apabila dilakukan pendekatan berdasarkan jenis-jenis penelitian deskriptif sesuai dengan pendapat Nazir (2005), yang mengelompokkan jenis-jenis penelitian deskriptif menjadi, metode survei, metode deskriptif berkesinambungan, penelitian studi kasus, penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas, penelitian tindakan (*action research*) dan penelitian perpustakaan serta dokumenter, maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif dengan metode studi survey. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual tentang pola pemanfaatan lahan, potensi dan kebijakan serta peran institusi. Dalam penelitian ini juga dilakukan evaluasi dan perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal yang telah dilaksanakan oleh pihak lain dalam menangani situasi atau masalah serupa yang dapat digunakan untuk pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa datang. Penelitian di kawasan waduk cacaban di batasi pada fase dimana pariwisata dikembangkan dan berimplikasi pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Sehingga hasil dari penelitian dimaksud merupakan suatu generalisasi dari pola-pola yang merupakan tipikal dari individu, kelompok dan lembaga. Ruang lingkup studi hanya mencakup segmen atau bagian tertentu dari siklus kehidupan individu, kelompok dan lembaga. Penelitian ini tidak dilaksanakan terhadap setiap individu atau unit, penelitian dilaksanakan dengan menggunakan sampel.

3. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini beberapa variabel yang diamati antara lain, pola pemanfaatan lahan, potensi kawasan dan kebijakan serta peran institusi dalam pengembangan ekowisata (*ecotourism*). Dalam penelitian diteliti bagaimana ketiga variabel tersebut dapat

mendukung pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban. Dengan pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban setidaknya dapat menjawab tantangan bagaimana pariwisata dapat berkontribusi secara nyata terhadap kelestarian fungsi utama kawasan waduk Cacaban sebagai salah satu kawasan penyedia sumberdaya air di Kabupaten Tegal. Keterkaitan ketiga variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Penelitian (2008)

Gambar 7. Variabel Penelitian

Ketiga variabel penelitian tersebut merupakan komponen utama pengembangan ekowisata, dimana pola pemanfaatan lahan diarahkan secara berkelanjutan dapat mendukung pelestarian lingkungan di kawasan waduk Cacaban. Demikian juga dengan kebijakan pengembangan pariwisata di kawasan waduk Cacaban dapat mendukung upaya pengembangan ekowisata. Kebijakan pengembangan pariwisata lebih banyak melibatkan peran institusi dan masyarakat. Sehingga peran serta masyarakat dapat terlihat nyata dalam upaya pengembangan ekowisata di waduk Cacaban.

4. Posisi Penelitian

Di dalam kawasan obyek wisata waduk Cacaban telah dilakukan beberapa penelitian dari berbagai aspek. Penelitian Pengembangan Ekowisata (ecotourism) di Kawasan Waduk Cacaban dilaksanakan lebih menekankan pada aspek lingkungan. Beberapa penelitian yang dilaksanakan di kawasan waduk Cacaban antar lain sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 9. Kegiatan dan Penelitian di Kawasan Waduk Cacaban

No	TAHUN	KEGIATAN
1	1952	Dimulai pembangunan fisiknya dengan peletakan batu pertama oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno.
2	1958	Dimulai dioperasikan ditandai dengan peresmian penggunaanya oleh Mr. Sartono.
3	1959	Dilakukan monitoring operasional waduk, pemeriksaan rembesan dan pemasangan <i>poezometer</i> .
4	1972	Dilakukan survey kapasitas tampungan waduk oleh Prosida Pemali-Comal.
5	1974	Penelitian terhadap kebocoran operasional pintu <i>tower</i> pada <i>barrel culvert</i> .
6	1977	Dilakukan survey tampungan waduk oleh Universitas Gajahmada Yogyakarta.
7	1982	Dilakukan penyelidikan geoteknik dan rencana penambahan <i>poezometer</i> oleh DPMA Bandung.
8	1986	Dibuat Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata Waduk cacaban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
9	1988	Dikunjungi tim konsultan dari jepang yang memberikan rekomendasi studi dan rehabilitasi waduk.
10	1991	Dilaksanakan rehabilitation for central and west java dams oleh Associated Consulting Engineerrs (PVT) Ltd dan pelaksanaan fisiknya dimulai tahun 1996.
11	2003	Dibuat design bendung Rambut suplesi waduk Cacaban, sebagai upaya untuk menambah jumlah air waduk.
12	2005	Disusun Revisi <i>master plan</i> kawasan obyek wisata waduk Cacaban Tahun 1986 oleh Pemerintah Daerah kabupaten Tegal.
13	2008	Penelitian Pengembangan Ekowisata (ecotourism) di Kawasan Waduk Cacaban

Sumber : Diolah dalam Penelitian (2008)

5. Data dan Sampel

5.1.Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan digolongkan dalam data primer dan data sekunder. Data primer difokuskan dengan observasi dan wawancara terhadap wisatawan, masyarakat, instansi terkait, pengelola dan pelaku usaha di kawasan waduk Cacaban.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait dari tingkat Desa, Kecamatan, Perhutani, Bappeda, DPU, Dinas Tanbunhut, Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan, Balai PSDA, BMG dan LSM terkait.

5.2.Populasi Sampel

Kusmayadi dan Sugiarto (2000), menyatakan bahwa prosedur penarikan contoh dapat digolongkan dalam *probability sampling* dan *non probability sampling*. Penarikan contoh dengan prosedur *non probability sampling* membuat peluang seseorang untuk menjadi responden tidak diketahui. Non probability sampling dibedakan menjadi 3 yaitu ; metode penarikan contoh secara kebetulan (*accidental sampling*), *quota sampling* dan *purposive sampling*.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan sampel yang diambil dengan metode *purposive sampling* untuk mengelompokkan sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya setelah sampel dikelompokkan dilakukan penarikan sampel dengan prosedur *accidental sampling* untuk menentukan responden dalam populasi besar, sedangkan untuk populasi kecil dilaksanakan dengan metode sensus. Sampel meliputi wisatawan, pelaku wisata, masyarakat dan dinas/instansi/lembaga.

Sampel dari dinas/instansi/lembaga terkait terdiri dari : Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan dan Kelautan,

Dinas Lingkungan Hidup Kota dan Pertamanan, Bapeda, Komisi A DPRD, Balai PSDA Pemali Comal, Perum Perhutani KPH Pemalang, Kepala Desa Karanganyar, Kepala Desa Penujah, Kepala Desa Wotgalih, LMDH Karanganyar, LMDH Penujah, LMDH Wotgalih, Paguyuban Cacaban Indah Lestari dan Kelompok Sadar Wisata Cacaban.

Tabel 10. Jumlah Sampel Penelitian di Kawasan Wisata Waduk Cacaban

No	Kelompok Sampel	Jumlah Responden
		Sampel (n)
1	Masyarakat	100
2	Wisatawan	100
3	Pelaku Usaha	14
4	Pengelola	13
5	Dinas/Instansi/Lembaga	18
Jumlah		245

Sumber : Penelitian (2008)

5.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, khususnya data primer dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi yang secara simultan. Wawancara ditujukan pada responden yang diyakini sebagai individu yang paham akan dirinya sendiri. Sehingga apa yang dinyatakan oleh responden dapat diyakini sebagai kebenaran dan dapat dipercaya. Kunci dari keberhasilan wawancara dititik beratkan pada faktor interpretasi. Interpretasi responden terhadap suatu kondisi harus sama dengan interpretasi peneliti.

Wawancara dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa pedoman pertanyaan sebagaimana lampiran 1. Pedoman pertanyaan secara umum hanya digunakan sebagai panduan namun demikian jawaban responden atau nara sumber diusahakan lebih terbuka. Melalui wawancara akan dapat dihimpun kondisi riil yang bersifat umum. Untuk menjaga validitas data wawancara

diprioritaskan pada beberapa wisatawan, pelaku wisata, tokoh masyarakat, perangkat desa dan pengelola kawasan wisata di waduk cacaban.

Selain wawancara pengumpulan data juga dilakukan dengan observasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dari berbagai gejala yang diamati. Observasi dapat dilakukan bersamaan dengan wawancara dengan responden sekaligus peneliti melakukan pengamatan tentang lingkungan secara umum dari lingkungan dimana responden berada. Menurut Singha (1989) dalam Hadi (2005²), teknik observasi memiliki beberapa kelebihan antara lain peneliti dapat memahami konteks dimana kegiatan dilaksanakan, informasi dan pengetahuan diperoleh dari sumber pertama, peneliti akan memperoleh informasi/data yang tidak mungkin / tidak bisa dihimpun melalui wawancara atau kuisioner dan peneliti akan mampu melihat rutinitas di luar perhatian responden yang berharga dalam penelitian.

Adapun data sekunder dilakukan berdasarkan data atau dokumentasi dari berbagai individu atau lembaga terkait. Disamping itu juga dilengkapi dengan kajian dan telaah pustaka yang terkait dengan topik penelitian baik melalui media cetak maupun berbagai website di internet.

5.4. Teknik Analisis Data

Penelitian pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban menggunakan analisis deskriptif. Gibson (1993) dalam Micthell, Setiawan dan Rahmi (2000), menyarankan bahwa seperangkat prinsip dapat diidentifikasi untuk merancang analisis dampak. Meskipun setiap rancangan tidak mungkin sempurna untuk semua situasi. Delapan prinsip untuk membantu memperbaiki rancangan antara lain (1) satu pendekatan terpadu; (2) semua bentuk keputusan harus ramah lingkungan; (3) analisis dampak harus menekankan pada identifikasi kemungkinan terbaik; (4) analisis dampak harus berdasarkan hukum, serta harus spesifik, wajib dan harus diterapkan; (5) proses analisis dan

pengambilan keputusan yang terkait harus terbuka partisipatif dan adil; (6) kondisi dan syarat penerimaan harus dapat dijalankan, kapasitas harus ada untuk memantau efek dan pentaatan terhadap peraturan pelaksanaan; (7) penerapan yang efisien dan berbagai cara disusun untuk menghubungkan analisa faktor internal dan faktor eksternal

Untuk memberikan alternatif pengambilan keputusan dilakukan analisa SWOT. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), Rangkuti (1997).

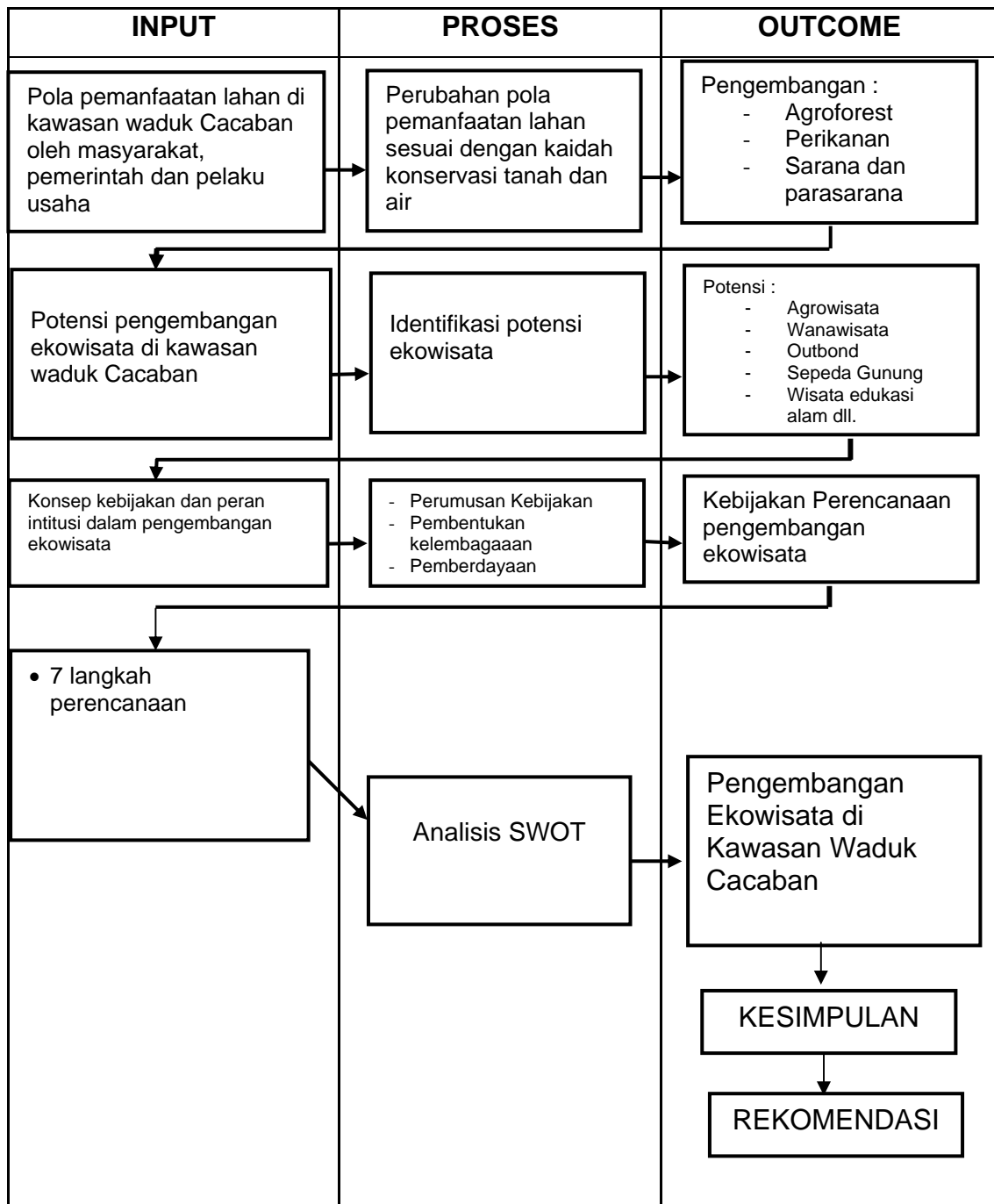
Dalam analisa SWOT faktor internal dan faktor eksternal disusun dalam matrik sebagai berikut :

Internal Eksternal	Strengths Susunan Daftar Kekuatan	Weaknesses Susunan Daftar Kelemahan
	Opportunities Susunan Daftar Peluang	Threats Susunan Daftar Ancaman
	Strategi SO Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
	Strategi ST Menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi WT Memperkecil kelemahan untuk menghindari ancaman

Sumber : Diolah dalam Penelitian (2008).

Gambar 8 . Matrik SWOT

Berdasarkan matrik tersebut disusun berbagai strategi pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban. Alur proses analisa dimulai dari aspek pemanfaatan lahan. Berdasarkan aspek pemanfaatan lahan dinventarisir potensi ekowisata yang dapat dikembangkan. Selanjutnya potensi ekowisata di kawasan waduk Cacaban digunakan sebagai acuan penentuan kebijakan dan peran institusi dalam pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban. Alur analisa secara lengkap tersaji sebagai berikut :



Sumber : Penelitian (2008)

Gambar 9 . Alur Analisis

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kawasan Waduk Cacaban

1.1. Kondisi Fisik Kawasan Waduk Cacaban.

A. Letak dan Luas.

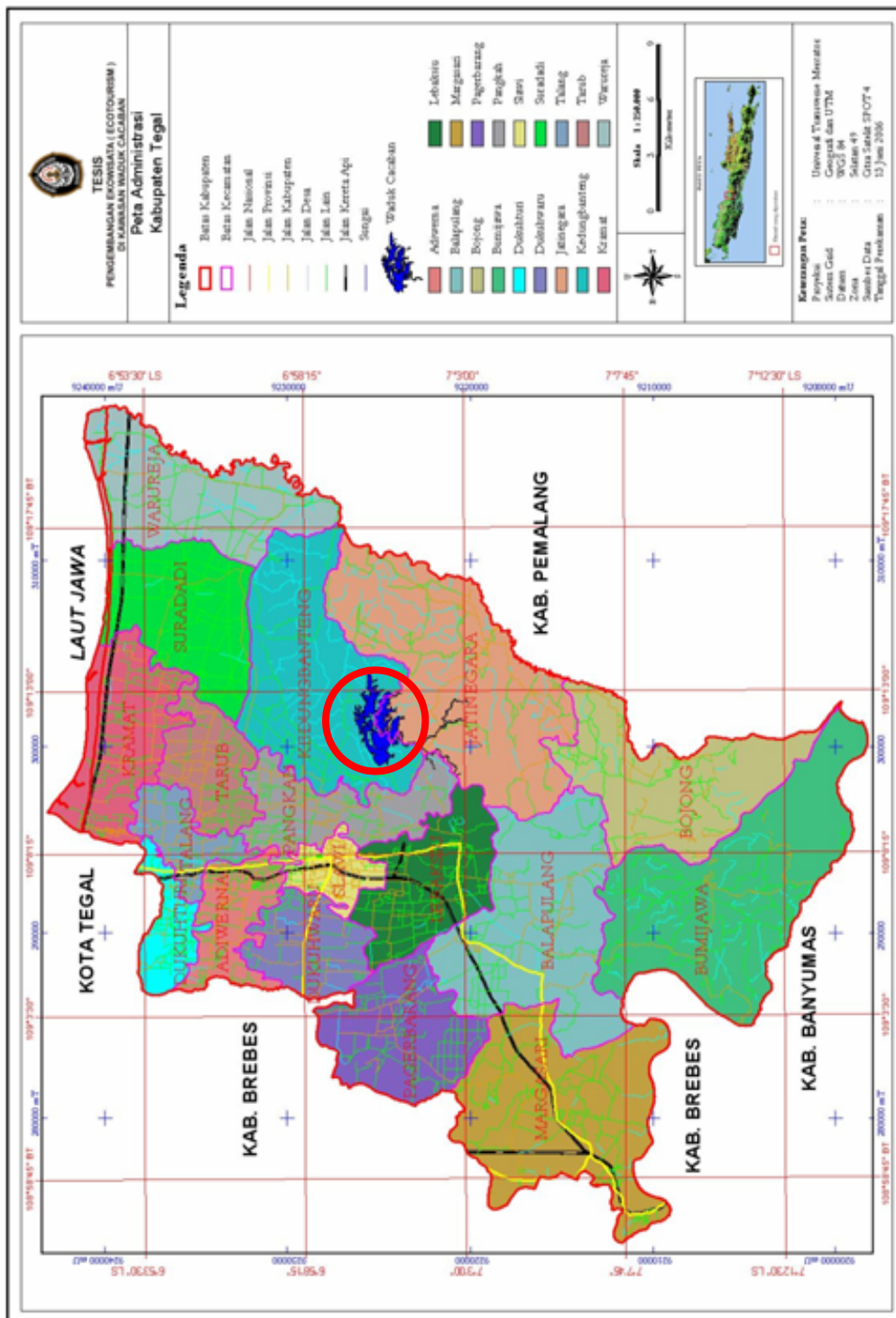
Waduk Cacaban secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal. Waduk Cacaban terletak kurang lebih 13 kilometer sebelah tenggara kota Slawi ibu kota Kabupaten Tegal. Akses menuju waduk Cacaban dapat ditempuh melalui 2 arah yaitu :

- a. Dari arah Slawi ke arah tenggara, melalui kecamatan Pangkah menuju waduk Cacaban.
- b. Dari arah jalar pantai utara (pantura) ke arah selatan, melalui kecamatan Pangkah menuju waduk Cacaban.

Waduk Cacaban dikelilingi oleh beberapa desa antara lain :

- a. Desa Penujah, Karanganyar, Tonggara dan Karangmalang di wilayah kecamatan Kedungbanteng
- b. Desa Jatinegara, Dukuhbangsa, Lebakwangi, Capar, Padasari dan Wotgalih di wilayah kecamatan Jatinegara.
- c. Desa Dermasuci di wilayah kecamatan Pangkah..

Waduk Cacaban secara geografis terletak antara $109^{\circ} 11' 28''$ BT sampai dengan $109^{\circ} 14' 58''$ BT dan $7^{\circ} 1' 31''$ LS sampai dengan $7^{\circ} 2' 18''$ LS. Waduk Cacaban memiliki daerah tangkapan air (*catchment area*) seluas 6.792,71 hektar. Adapun luas genangan waduk pada kondisi maksimal seluas 928,70 hektar. Pada kondisi tersebut waduk Cacaban mampu mengaliri lahan sawah irigasi teknis seluas kurang lebih 17.500 hektar. Secara detail lokasi kawasan waduk Cacaban sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Gambar 10. Peta Administrasi Kabupaten Tegal

B. Iklim.

Stasiun penakar curah hujan yang terdekat dengan DAS Cacaban ada enam stasiun yaitu stasiun penakar hujan Jatinegara,

Sirampok, Ciperio, Pangkah, Gegerbuntu dan Warurejo. Dari data sekunder pada keenam stasiun tersebut diperoleh data curah hujan tahunan rata-rata di stasiun pengamat Jatinegara 2.942 mm/tahun. Stasiun pengamat Sirampog rata-rata curah hujan tahunan 2.474 mm/tahun. Stasiun pengamat Ciperio mempunyai rata-rata curah hujan tahunan 2.108 mm/tahun. Stasiun pengamat Pangkah mempunyai rata-rata curah hujan tahunan 2.221 mm/tahun. Stasiun pengamat Gegerbuntu mempunyai rata-rata curah hujan tahunan 2.444 mm/tahun. Stasiun pengamat Warurejo mempunyai rata-rata curah hujan tahunan 1.912 mm/tahun.

Rata-rata curah hujan dengan kisaran 1.912 mm/ tahun sampai dengan 2.942 mm/tahun di 6 (enam) stasiun pengamatan, menunjukkan curah hujan yang cukup tinggi di kawasan waduk Cacaban. Curah hujan yang tinggi berpotensi mengakibatkan terjadinya erosi di *catchment area* waduk Cacaban apabila vegetasi di kawasan tersebut berkurang. Hal tersebut dapat mempengaruhi daya tampung waduk Cacaban.

C. Tanah.

Jenis tanah di Kawasan Waduk Cacaban didominasi oleh kompleks Latosol merah kekuningan, Latosol coklat tua, berikutnya adalah kompleks Podsolik merah kekuningan, Podsolik kuning dan Regosol. Secara rinci sebaran jenis tanah pada kawasan waduk Cacaban disajikan pada tabel berikut :

Tabel 11. Jenis Tanah di Kawasan Waduk Cacaban

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	%
1	Komplek podsolik merah kekuningan, podsolik kuning dan regosol	636,03	36,19
2	Assosiasi latosol coklat dan regosol kelabu	30,92	1,76
3	Komplek latosol merah kekuningan, latosol coklat	1.078,78	61,37
4	Grumusol kelabu tua	11,87	0,68

Jumlah	1.757,60	100,00
--------	----------	--------

Sumber : Bappeda (2005)

D. Topografi.

Kawasan Waduk Cacaban bertopografi berombak sampai berbukit dengan ketinggian bervariasi antara 85 sampai 600 meter di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan sebagian besar daerah tangkapan air (*catchment area*) merupakan daerah dengan kelas lereng IV - V, dengan interval 25 – 40 % sampai dengan > 40 % tergolong daerah curam sampai dengan sangat curam. Kemiringan lahan yang curam dan sangat curam dapat meningkatkan potensi terjadinya erosi apabila tidak dilakukan konservasi tanah secara benar.

E. Hidrologi.

Sumber air bagi Waduk Cacaban terdiri dari beberapa sungai dan anak sungai yang terdapat dalam daerah tangkapan air. Umumnya sungai-sungai melalui tanah-tanah yang dikuasai penduduk dan Perum Perhutani. Sungai-sungai tersebut adalah:

- Sungai Cacaban
- Sungai Panto
- Sungai Menyawak
- Sungai Curugagung
- Sungai Kedondong

Disamping itu terdapat alur-alur air yang terbentuk pada saat musim hujan dengan jumlah kurang lebih 40 alur, dimana 23 alur diantaranya berada di tanah penduduk.

F. Flora dan Fauna.

Keadaan flora di sekitar waduk merupakan vegetasi-vegetasi umum daerah tropis basah, disamping tanaman/hutan jati, pinus dan mahoni. Disamping itu banyak terdapat areal-areal hutan yang

digunakan untuk ladang dan sawah. Fauna yang ada di sekitar waduk terutama adalah burung-burung seperti katik (*Muntiacus muncak*), tilang (*Munis*) dan lain-lain. Adanya berbagai jenis ikan di dalam waduk memperbanyak fauna yang ada di kawasan waduk Cacaban.

1.2. Kondisi Sosial Masyarakat

A. Kependudukan.

Jumlah penduduk di *catchment area* Waduk Cacaban sekitar 29.859 jiwa yang tersebar di 9 (sembilan) desa. Berdasarkan jumlah penduduk usia produktif (>15 tahun) sebesar 14.399 jiwa lapangan usaha penduduk di kawasan waduk sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, lainnya tersebar pada berbagai sektor. Sektor non pertanian yang mempunyai potensi cukup besar sektor perdagangan. Lapangan usaha penduduk di kawasan waduk Cacaban sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 12. Lapangan Usaha Penduduk

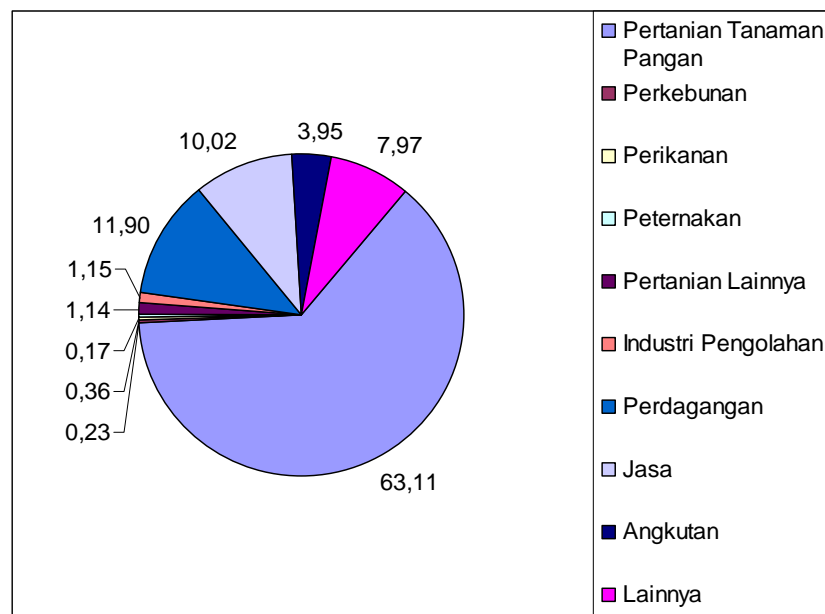
Desa	Jumlah Penduduk (>15th)	Pertanian Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan	Peternakan	Pertanian Lainnya	Industri Pengolahan	Perdagangan	Jasa	Angkutan	Lainnya
Jatinegara	964	225	4	0	3	2	10	333	186	89	112
Dukuhbangsa	1.681	1.087	7	1	0	19	6	57	147	16	341
Lebakwangi	1.713	1.144	1	2	5	12	20	211	274	37	7
Capar	701	604	0	0	1	0	0	44	28	6	18
Padasari	2.612	1.881	4	2	4	56	5	339	118	13	190
Wotgalih	2.084	1.941	8	0	2	0	3	49	25	4	52
Dermasuci	1.173	637	0	3	3	9	23	128	262	25	83
Penujah	943	686	1	13	1	13	27	58	98	29	17
Karanganyar	2.528	882	8	31	6	53	71	494	305	350	328
Jumlah	14.399	9.087	33	52	25	164	165	1.713	1.443	569	1.148

Sumber : Diolah dari Monografi Desa (2007)

Potensi yang ada pada daerah ini yang paling menonjol adalah bidang pertanian, meliputi produksi tanaman pangan (padi,

jagung, ketela dan sebagainya) dan beberapa tanaman perkebunan / pekarangan seperti kelapa, cengkeh dan sebagainya. Hingga saat ini belum ada potensi lain sebagai pemasukan baik bagi desa maupun penduduk, kecuali dari sektor perdagangan.

Perdagangan mempunyai potensi cukup besar di kawasan waduk Cacaban. Dengan berkembangnya kawasan wisata waduk Cacaban tidak menutup kemungkinan meningkatnya kontribusi dari sektor perdagangan selain kontribusi dari sektor pertanian. Berdasarkan persentase, mata pencaharian masyarakat di kawasan waduk Cacaban sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Sumber : Diolah dalam Penelitian (2008)

Gambar 11. Persentase Lapangan Usaha Penduduk

Berdasarkan diagram di atas 63,11 % lapangan usaha penduduk di kawasan waduk Cacaban adalah pertanian tanaman

pangan. Besarnya jumlah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha pertanian dengan jumlah lahan pertanian yang terbatas, berpotensi mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan hutan di *catchment area* waduk Cacaban menjadi lahan pertanian. Untuk mengurangi hal tersebut dapat diupayakan dengan mengembangkan potensi sektor lain, salah satunya adalah sektor perdagangan dan jasa. Saat ini masyarakat kawasan waduk Cacaban yang bekerja pada lapangan usaha perdagangan mencapai jumlah 11,90 % dari total jumlah penduduk dan di lapangan usaha jasa sebesar 10,02 %. Lapangan usaha perdagangan dan jasa sangat berpotensi dikembangkan seiring dengan pengembangan potensi wisata di kawasan waduk Cacaban.

B. Kondisi Sarana dan Prasarana

a. Perekonomian.

Sarana dan prasarana perekonomian merupakan faktor penunjang bagi kelangsungan proses produksi, baik produksi sektor pertanian maupun diluar sektor pertanian. Sarana dan prasarana perekonomian yang tersedia di kawasan obyek wisata Waduk Cacaban antara lain, toko, warung makan dan pedagang makanan kecil (asongan).

b. Transportasi.

Sarana transportasi yang tersedia untuk menuju kawasan obyek wisata Waduk Cacaban cukup memadai, diantaranya kendaraan roda empat angkutan pedesaan (angkudes) dan kendaraan roda dua (ojek) meskipun dengan jumlah yang masih terbatas.

Sedangkan prasarana transportasi yang ada berupa jalan raya, hampir seluruhnya telah beraspal meskipun ada beberapa jembatan yang masih cukup sempit. Sehingga pada saat kendaraan berpapasan di atas badan jembatan harus berjalan secara bergantian.

Hal tersebut mengurangi aksesibilitas wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata waduk Cacaban, terutama wisatawan secara berombongan dan menggunakan kendaraan bus atau kendaraan lain yang berkapasitas besar. Guna meningkatkan aksesibilitas wisatawan perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana terutama peningkatan jembatan untuk dapat dilalui kendaraan-kendaraan besar.



Sumber : Penelitian (2008)

Gambar 12. Akses Jalan Menuju Kawasan Waduk Cacaban

Jarak obyek wisata waduk Cacaban dengan kota-kota sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Jarak Waduk Cacaban dengan Kota di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal

No.	Kota Kecamatan	Jarak dari obyek wisata (km)
1	Sumur Panggang	31
2	Kramat	21
3	Surodadi	28
4	Warurejo	40
5	Adiwerna	19
6	Dukuhturi	25
7	Talang	21
8	Tarub	15
9	Slawi	13
10	Lebaksiu	19
11	Pangkah	9
12	Kedungbanteng	6
13	Jatinegara	25
14	Balapulang	36
15	Margasari	36
16	Pagerbarang	27
17	Bumijawa	31
18	Bojong	33

Sumber : Peta Jaringan Jalan DPU Kab. Tegal, 2007

Berdasarkan jarak tempuh dari beberapa kota di sekitarnya kawasan waduk Cacaban relatif mudah dijangkau dan didukung dengan sarana jalan yang sudah beaspal memudahkan akses menuju kawasan tersebut. Kemudahan akses menuju waduk Cacaban dapat meningkatkan potensi kunjungan wisata. Peningkatan kunjungan wisatawan sangat berpengaruh terhadap pengembangan wisata secara berkelanjutan.

c. Kesehatan.

Pelayanan kesehatan masyarakat dan pengunjung obyek wisata waduk cacaban dilakukan di 1 (satu) Puskesmas di Kecamatan Jatinegara. Sedangkan tenaga paramedis yang tersedia adalah 2 (dua) orang Dokter dan 6 (enam) paramedis dan bidan.

Secara kuantitas sarana kesehatan yang ada masih relatif kurang. Namun demikian secara kualitas kesehatan masyarakat di sekitar kawasan Cacaban sudah cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari adanya Puskesmas Pembantu (Pustu) di beberapa desa serta keberadaan Posyandu disetiap pedukuhan atau Rukun Warga (RW).

C. Kondisi Teknis Waduk Cacaban

Data teknis Waduk Cacaban di Kecamatan Kedungbanteng berdasarkan data BPSDA Pemali Comal sebagaimana berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Ketinggian puncak bendung | : 80,50 m dpl |
| 2) Ketinggian muka air normal | : 75,42 m dpl |
| 3) Ketinggian muka air rendah | : 67,60 m dpl |
| 4) Tinggi bendungan | : 40,00 m |
| 5) Tinggi menara pengambilan | : 38,50 m |
| 6) Diameter menara pengambilan | : 5,00 m |
| 7) Diameter terowongan pengeluaran air | : 2,10 m |
| 8) Panjang puncak bendung | : 180,00 m |
| 9) Jumlah terowongan pengeluaran air | : 2 buah |
| 10) Panjang puncak bendung | : 180,00 m |
| 11) Volume waduk | : 90 juta m ³ |
| 12) Luas genangan | : 928,7 ha |
| 13) Perkiraan umur penggunaan | : 100 tahun |
| 14) Luas daerah irigasi yang dialiri | : 17.500 ha |
| 15) Tipe bendung | : Urugan tanah |
| 16) Total luas pulau-pulau | : 80 ha |



Sumber Penelitian (2008).

Gambar 13. Tipe Bandung dan Menara Pengambilan

D. Kondisi Pengelolaan Waduk Cacaban

Waduk Cacaban selain mempunyai fungsi utama sebagai sumber air untuk irigasi, juga dikembangkan potensi wisata. Wisata

yang dikembangkan di waduk Cacaban adalah wisata air dan panorama alam, disamping itu dikembangkan atraksi wisata, olahraga dan pengenalan alam. Dengan demikian secara garis besar pola aktivitas wisata di daerah waduk Cacaban yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

a. Wisata Air.

Wisata air yang dikembangkan di obyek wisata waduk Cacaban meliputi rekreasi dan olahraga. Fasilitas penunjang wisata air di obyek wisata waduk Cacaban masih sangat terbatas. Waduk Cacaban mempunyai potensi wisata air yang cukup besar karena didukung keberadaan beberapa daratan berbentuk pulau-pulau kecil di tengah-tengah waduk Cacaban.

Sedikitnya ada 4 (empat) pulau yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata air, pengembangan flora maupun fauna. Pengembangan pulau-pulau di kawasan waduk Cacaban perlu melibatkan Balai Pengelolaan Sumberdaya Air (PSDA) Pemali Comal sebagai pengelola waduk Cacaban.

Sedangkan pengelolaan wisata air berupa area pemancingan sesuai dengan rencana induk dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Tegal.

Wisata kuliner juga telah dikembangkan di kawasan waduk Cacaban. Keberadaan rumah makan apung di beberapa titik kawasan waduk Cacaban memungkinkan wisatawan menikmati hidangan menu ikan air tawar di atas warung yang mengapung di atas genangan waduk. Wisata air yang telah dikembangkan di kawasan waduk Cacaban sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Sumber : Penelitian (2008)

Gambar 14. Wisata Air

b. Wisata Darat.

Aset wisata darat yang terdapat di obyek wisata waduk Cacaban sebagian merupakan milik Pemerintah Kabupaten Tegal yang dikelola secara terpisah oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan dan Dinas Perhubungan dan Pariwisata. Sebagian milik Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA) Propinsi Jawa Tengah dan sebagian lagi milik Perum Perhutani KPH Pemalang.

- Sistem pengelolaan yang ditangani Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan berada di zona penyangga berupa pemulihan dan pengembangan daerah *green belt*, hutan wisata, pengembangan sub-sub DAS Cacaban Wetan dan pengembangan kawasan pulau di tengah waduk berupa wisata agro meskipun kepemilikan pulau tersebut milik PSDA Propinsi Jawa Tengah.
- Sistem pengelolaan yang ditangani Dinas Perhubungan dan Pariwisata berada di zona konservasi berupa area pariwisata diantaranya *shelter-shelter*, jalan lingkungan, jalan setapak,

area bernain, taman, area *grasstrack*, area *road race* dan hutan lindung.

- Sistem pengelolaan dalam kawasan milik PSDA Propinsi Jawa Tengah berupa panggung terbuka. Area berkemah dan jalan setapak di sekitar badan bendung atau pada zona utama waduk.

2. Pola Pemanfaatan Lahan di Kawasan Waduk Cacaban

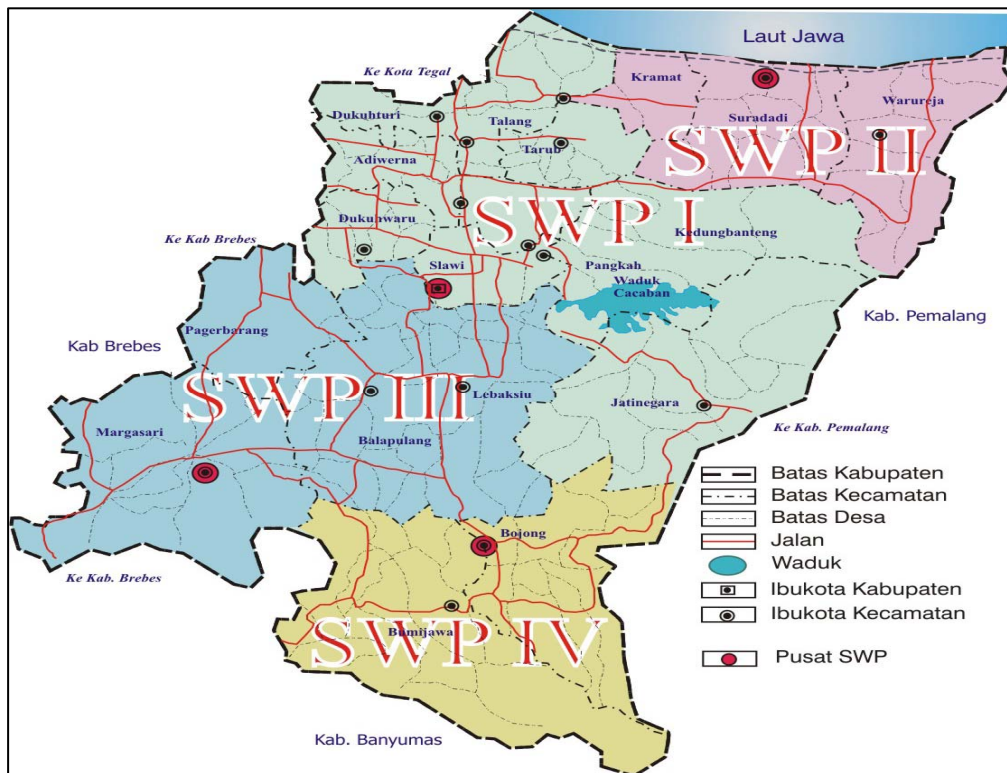
Pemerintah Kabupaten Tegal dalam upaya melengkapi dan meningkatkan fasilitas pariwisata untuk menambah daya tarik pengunjung berdasarkan pada arahan pengembangan wilayah Kabupaten Tegal dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan tata ruang daerah untuk mengoptimasi daerah berdasarkan potensi dan kendala yang ada wilayah Kabupaten Tegal.

Berdasarkan pada potensi kegiatan dan permasalahan yang dihadapi sistem perwilayahan di Kabupaten Tegal terbagi menjadi Sub Wilayah Pembangunan (SWP) yaitu :

1. SWP 1 berpusat di Kota Slawi, meliputi Kecamatan Slawi, Kecamatan Pangkah, Kecamatan Dukuhwaru, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Talang, Kecamatan Tarub, Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Jatinegara. Fungsi utama yang dikembangkan : pemerintahan, perdagangan regional, perhubungan, pendidikan, industri kecil, pariwisata, hutan produksi dan pengumpul hasil pertanian.
2. SWP II berpusat di kota Suradadi terdiri dari Kecamatan Kramat, Kecamatan Warurejo, Kecamatan Suradadi, dengan fungsi utama : Pariwisata, Perikanan, Industri, perhubungan dan pertanian lahan basah.
3. SWP III berpusat di Kota Margasari, terdiri dari Kecamatan Margasari, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan Balapulang dan Kecamatan Lebaksiu dengan fungsi utama : industri, pertanian lahan basah, kawasan lindung, hutan produksi dan perhubungan.

4. SWP IV, berpusat di Kota Bojong, dan terdiri dari Kecamatan Bojong, dan Kecamatan Bumijawa dengan fungsi utama : pariwisata, pangumpul hasil pertanian dan perkebunan.

Penggolongan wilayah pembangunan di Kabupaten Tegal berdasarkan Sub Wilayah Pembangunan (SWP) Kabupaten Tegal sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Sumber : Bappeda (2003)

Gambar 15. Sub Wilayah Pembangunan Kabupaten Tegal

Berdasarkan rencana alokasi penggunaan ruang di Kabupaten Tegal kawasan waduk Cacaban meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Yang dimaksud dengan kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan lindung terbagi atas kawasan hutan lindung, sempadan sungai, sekitar waduk, sekitar mata air serta kawasan rawan bencana alam. Sedangkan kawasan budidaya merupakan kawasan yang kondisi fisik dan

potensi sumber daya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan guna kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia termasuk pemukiman dan pembangunan. Kawasan budidaya meliputi pertanian dan non pertanian. Adapun kriteria-kriteria yang terdapat di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang sesuai untuk wilayah kabupaten tegal adalah sebagai berikut :

A. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya

Yang dimaksudkan dengan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya adalah kawasan hutan lindung yang berada di kawasan dengan kelerengan $> 40\%$ dan ketinggian diatas 2.000 m dpl. Kawasan ini terdapat di sebagian Kecamatan Kedungbanteng, sebagian Margasari, sebagian Bumijawa dan sebagian Bojong, sebagian Jatinegara, sebagian Pangkah dan sebagian Balapulang.

B. Kawasan perlindungan setempat

Perlindungan ini bertujuan melindungi wilayah pantai, Sungai, Danau/Waduk dan mata air. Daerah sempadan waduk terdapat di Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Kedungbanteng yaitu di sekitar Waduk Cacaban. Sempadan waduk ditetapkan 50-100 meter kearah darat dari titik permukaan air tertinggi. Sempadan waduk di sekitar waduk Cacaban telah dikategorikan dalam kawasan lindung. Kawasan sempadan waduk berfungsi untuk melindungi wilayah tersebut dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi , waduk.

C. Kawasan suaka alam

Yang termasuk kawasan ini adalah kawasan cagar alam dan hutan wisata. Perlindungan kawasan ini dimaksudkan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.

D. Kawasan rawan bencana alam

Kawasan ini terdapat di Kecamatan Margasari. Bencana yang mungkin terjadi adalah tanah longsor akibat penebangan batu

kapur/gamping di Desa Karangdowo. Selain itu kawasan rawan bencana alam berupa tanah longsor lainnya terdapat di Kecamatan Jatinegara dan Kecamatan Pangkah.

Secara khusus pemanfaatan lahan di kawasan waduk Cacaban ditentukan berdasarkan Masterplan Pengembangan Kawasan Wisata Alam Waduk Cacaban Tahun 2005. Dalam rencana induk tersebut pemanfaatan lahan di kawasan waduk Cacaban dibedakan dalam 5 (lima) daerah peruntukan. Pembagian daerah peruntukan tersebut berdasarkan fungsi kawasan dalam mendukung keberadaan waduk Cacaban. Kelima daerah peruntukan terdiri dari daerah A yang merupakan daerah lindung/konservasi, daerah B merupakan daerah fungsi utama waduk, daerah C merupakan daerah perairan, daerah D merupakan daerah pengembangan pariwisata dan daerah E merupakan daerah penunjang / penyangga pariwisata.

Daerah peruntukan A meliputi sebagian besar daerah tangkapan air (*catchment area*) waduk Cacaban. Daerah ini dominan merupakan kawasan hutan yang masuk dalam area KPH Pemalang dan wilayah beberapa desa di sekitar waduk Cacaban dengan berbagai peruntukan seperti sawah, tegalan, pekarangan dan lain-lain. Daerah peruntukan A, sebagai daerah preservasi (perlindungan alam), merupakan daerah yang dilindungi dengan tidak memperbolehkan adanya penambahan bangunan buatan manusia. Daerahnya meliputi hutan, pegunungan, sungai, sumber air waduk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah pasal 16, bahwa penggunaan dan pemafaatan tanah pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang tanah yang berada di sempadan pantai, sempadan danau, sempadan waduk dan atau sempadan sungai harus memperhatikan :

- c. Kepentingan umum.
- d. Keterbatasan daya dukung, pembangunan berkelanjutan, keterkaitan ekosistem, keaneka ragaman hayati serta kelestaraan fungsi lingkungan.

Lebih lanjut pada pasal 18 menyebutkan bahwa pemanfaatan tanah dalam kawasan lindung dapat ditingkatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

ekowisata apabila tidak mengganggu fungsi lindung. Sesuai dengan peraturan tersebut kawasan lindung di sepadan waduk Cacaban mempunyai potensi dikembangkan untuk kepentingan ekowisata.

Daerah peruntukan B, sebagai daerah fungsi utama waduk berupa bangunan utama bendung dan area limpasan. Daerah fungsi utama waduk juga meliputi kawasan kantor pengelola dan fasilitas lain yang berada di sekitar bangunan waduk.

Daerah peruntukan C, daerah genangan waduk yang berfungsi untuk menampung air hingga air tersebut dibutuhkan terutama untuk irigasi.

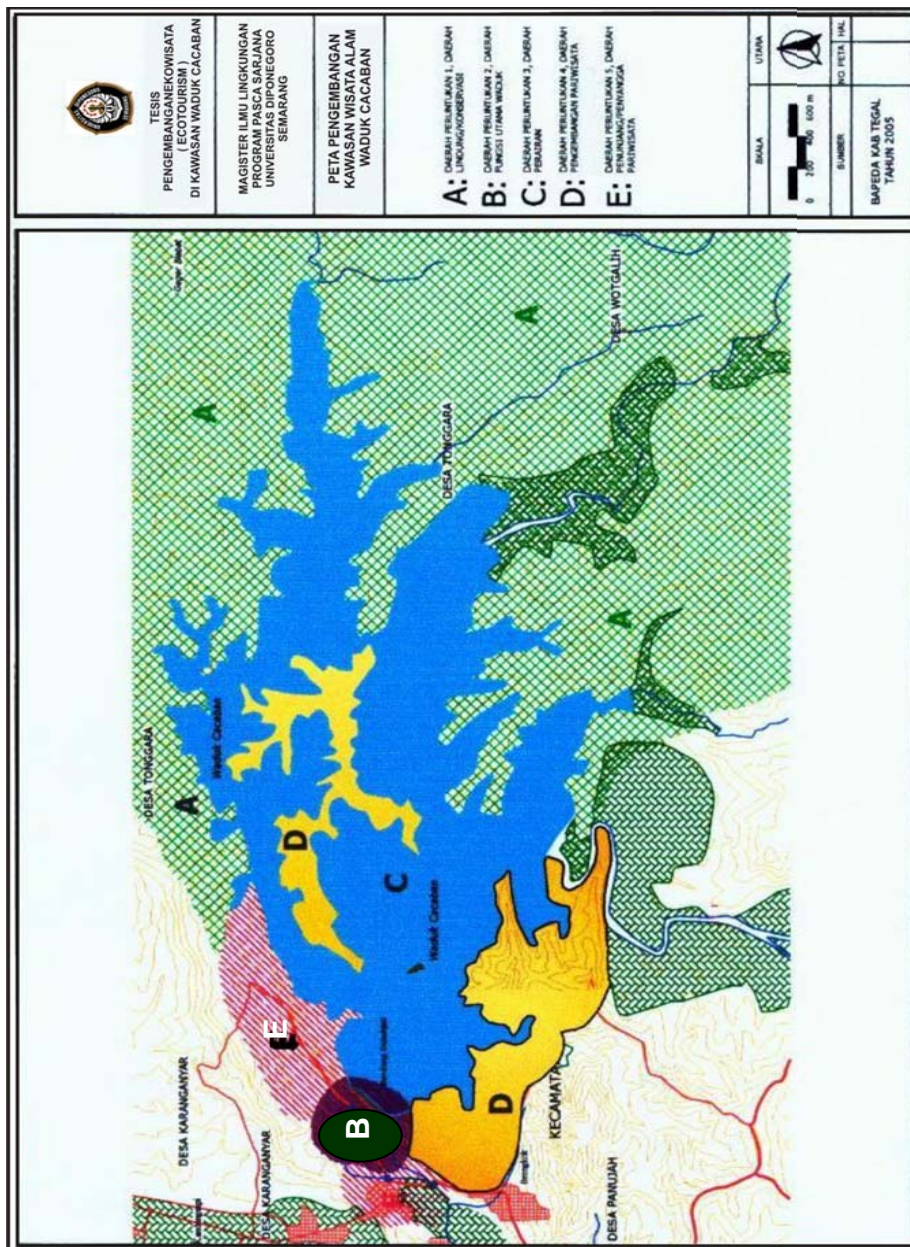
Disamping untuk mendukung fungsi utama waduk daerah perairan juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan.

Budidaya perikanan merupakan fungsi sekunder dari pembangunan waduk, oleh karena itu, pengelolaan waduk secara terpadu, masyarakat yang tergusur dapat bekerja dalam kegiatan perikanan baik kegiatan di waduk itu sendiri, maupun kegiatan perikanan di sekitar waduk, terutama daerah yang mendapat sistem pengairan dari waduk tersebut. Pengembangan perikanan di waduk dapat memberikan kontribusi yang optimal jika diterapkan suatu bentuk atau pola pengelolaan perikanan yang rasional dan terpadu sesuai dengan fungsi waduk yang bersifat serbaguna (Kartamihardja, 1993).

Daerah peruntukan D, sebagai daerah pengembangan pariwisata, merupakan daerah yang dapat dikembangkan secara lebih intensif. Pengembangannya meliputi pengembangan sarana wisata, pengembangan fasilitas-fasilitas rekreasi, pengembangan utilitas lingkungan, pengembangan sarana penunjang rekreasi, pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara intensif guna menunjang kegiatan wisata. Daerahnya meliputi, daerah perbukitan dan lembah sekitar Waduk Cacaban yang berada diantara kendali waduk dengan hutan wisata dan merupakan daerah pengembangan yang sudah ada. Pengembangan daerah peruntukan D berdasarkan Masterplan Kawasan Wisata Alam Waduk Cacaban Tahun 2005.

Daerah peruntukan E, sebagai daerah penyangga, merupakan daerah yang memberi dukungan terhadap pengembangan kegiatan wisata yang berlangsung. Arahannya meliputi penataan lingkungan pedesaan yang akan berkembang dikemudian hari, pelestarian arsitektur

tradisional setempat, pemanfaatan perlindungan sumber daya alam - sumber daya manusia, dukungan terhadap kegiatan wisata yang berlangsung, serta pelestarian alam. Daerahnya meliputi daerah di luar daerah-daerah peruntukan tersebut diatas, daerah pertanian dan perkebunan produktif, daerah pedesaan disekitar obyek wisata. Pola pemanfaatan lahan di kawasan waduk Cacaban sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Gambar 16. Peta Pengembangan Kawasan Waduk Cacaban

A. Daerah Lindung / Konservasi

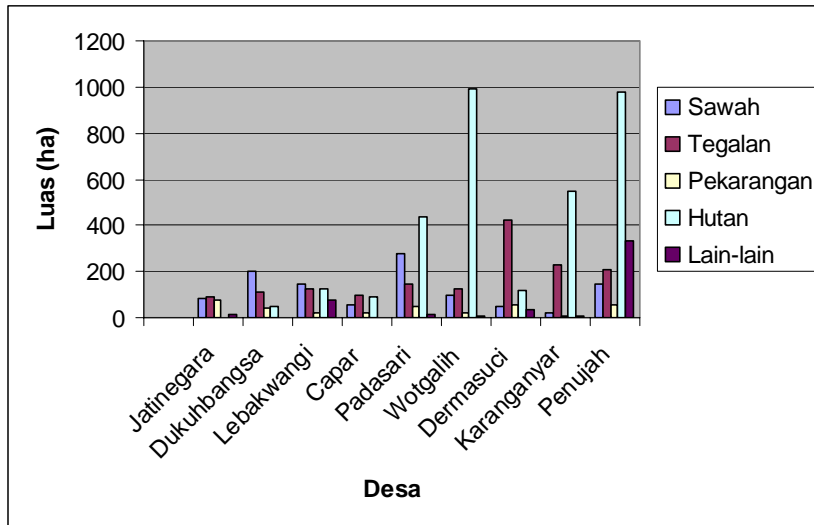
Daerah lindung di kawasan waduk Cacaban sebagian besar dimanfaatkan untuk hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Pemalang. Pemanfaatan lahan di kawasan waduk Cacaban sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 14. Pemanfaatan Lahan

Desa	Lahan (Ha)					
	Sawah	Tegalan	Pekarangan	Hutan	Lain-lain	Jumlah
Jatinegara	85,65	89,61	78,06	0,00	16,24	269,56
Dukuhbangsa	198,16	109,14	40,20	50,00	2,50	400,00
Lebakwangi	147,46	125,31	20,42	124,50	73,35	491,04
Capar	52,72	99,83	23,00	89,00	2,13	266,68
Padasari	278,40	146,67	50,01	440,00	12,00	927,08
Wotgalih	94,64	125,35	20,40	990,00	5,00	1.235,39
Dermasuci	47,52	422,54	53,38	115,00	33,82	672,26
Karanganyar	22,03	228,99	7,43	547,20	4,68	810,33
Penujah	144,70	209,98	58,21	977,00	330,49	1.720,38
Total	1.071,28	1.557,42	351,11	3.332,70	480,20	6.792,71

Sumber : Diolah dari Daftar Isian Potensi dan Perkembangan Desa (2007)

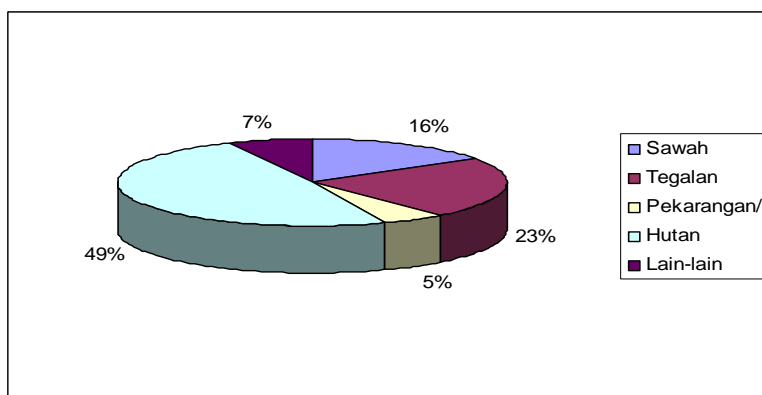
Berdasarkan data sebagian besar lahan di *catchment area* waduk Cacaban dimanfaatkan untuk hutan. Dari 9 (sembilan) desa yang masuk dalam *catchment area* waduk Cacaban desa Wotgalih, desa Penujah dan desa Karanganyar merupakan 3 desa dengan lahan hutan terluas. Desa Wotgalih mempunyai luasan hutan 990,00 Ha, desa Penujah 977,00 Ha dan desa Karanganyar 574,20 Ha. Perbandingan luasan lahan hutan dengan pemanfaatan lahan untuk keperluan lain seperti sawah, tegalan, pekarangan dan lain-lain sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Sumber : Penelitian (2008).

Gambar 17. Diagram Pemanfaat Lahan

Dominasi terbesar tata guna lahan di Kawasan Obyek Wisata Waduk Cacaban adalah hutan, sawah, tegalan dan sebagian kecil adalah pemukiman. Tata guna lahan di *cathment area* waduk Cacaban 49 % berupa area hutan, 23 % tegalan, 16 % sawah, 5 % pekarangan dan 7 % untuk pemanfaatan lain. Persentase sebaran tataguna lahan sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Sumber : Penelitian (2008)

Gambar 18. Persentase Penggunaan Lahan

Berdasarkan data tersebut, secara kuantitas tutupan vegetasi di *cathment area* masih relatif bagus. Namun demikian

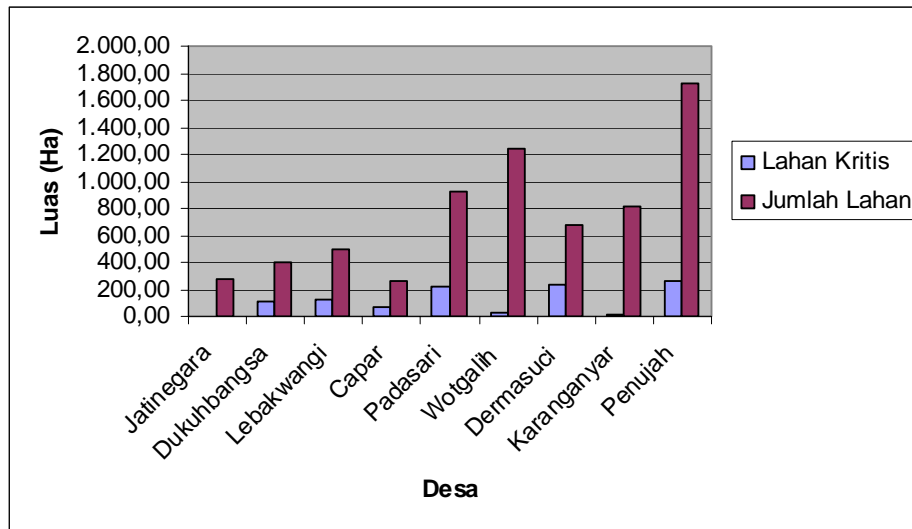
secara kualitas, dari kawasan hutan yang ada telah mengalami kerusakan dan dalam kondisi kritis. Data luas lahan kritis sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 15 . Luas Lahan Kritis di *Catchment Area* Waduk Cacaban

Desa	Luas (Ha)		Persentase Lahan Kritis
	Lahan Kritis	Jumlah Lahan	
Jatinegara	0,00	269,56	0,00
Dukuhbangsa	109,14	400,00	27,28
Lebakwangi	125,30	491,04	25,52
Capar	70,81	266,68	26,55
Padasari	227,31	927,08	24,52
Wotgalih	28,00	1235,39	2,27
Dermasuci	240,00	672,26	35,70
Karanganyar	15,00	810,33	1,85
Penujah	260,00	1720,38	15,11
Jumlah	1.075,56	6792,71	15,83

Sumber : Penelitian (2008)

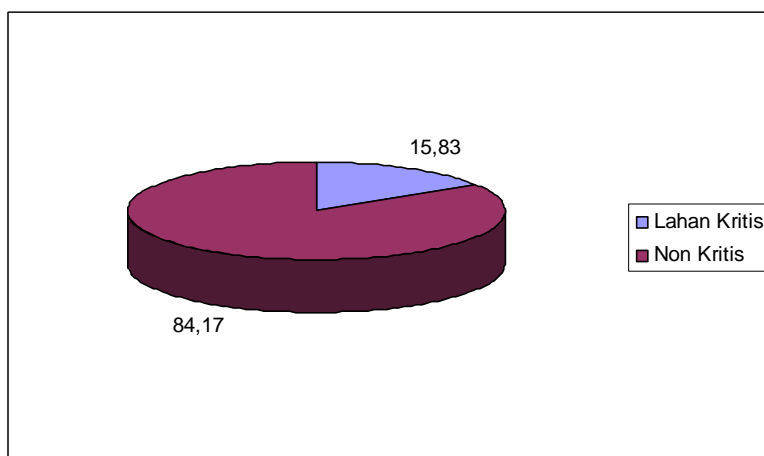
Total lahan hutan di daerah tangkapan air waduk Cacaban sebesar 6.792,71 hektar. Dari jumlah tersebut 1.075,56 hektar atau 15,83 % dalam kondisi kritis. Lahan kritis di daerah tangkapan air waduk Cacaban tersebar hampir merata di 9 wilayah desa yang masuk dalam daerah tangkapan air. Distribusi lahan kritis paling tinggi terjadi desa Dermasuci sebesar 35,70 % dari area hutan yang ada di desa tersebut. Sedangkan lahan kritis untuk 3 desa yang berbatasan langsung dengan waduk Cacaban berturut-turut adalah desa Penujah 260 hektar atau 15,11 %, desa Wotgalih 28 hektar atau 2,27 % dan desa Karanganyar 15 hektar atau 1,85 %. Distribusi lahan kritis pada masing-masing desa sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Sumber : Penelitian (2008)

Gambar 19 . Distribusi Lahan Kritis

Secara komulatif luas lahan kritis di daerah tangkapan air waduk Cacaban mencapai 1.075,56 hektar dari luas daerah tangkapan air 6.792,71 atau mencapai 15,83 %. Persentase lahan kritis pada area hutan di daerah tangkapan air waduk Cacaban sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



Sumber : Penelitian (2008)

Gambar 20 . Persentase Lahan Kritis

Lahan kritis di daerah tangkapan air waduk Cacaban sebagian besar diakibatkan oleh adanya penjarahan hutan. Jumlah

penjarahan hutan semakin meningkat sejak tahun 1998 bersamaan dengan adanya *euforia* reformasi. Kegiatan penjarahan hutan dalam skala kecil masih terjadi hingga sekarang.



Sumber : Penelitian (2008)

Gambar 21 . Penjarahan Hutan di Kawasan Waduk Cacaban

Hutan jati di daerah tangkapan air waduk Cacaban ditebang dan kayunya dimanfaatkan untuk perabotan rumah tangga dan sebagian besar di jual ke perusahaan-perusahaan mebel jati. Berdasarkan observasi di lapangan terdapat beberapa rumah tidak layak yang menggunakan kusen berbahan kayu jati. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sekitar hutan juga memanfaatkan kayu hutan untuk bahan bangunan dan juga perabotan sebagaimana tampak pada gambar berikut



Sumber : Penelitian (2008)

Gambar 22. Kondisi Rumah Penduduk

Lahan hutan yang telah dibuka selanjutnya ditanami tanaman pertanian oleh para petani penggarap (pesanggem). Luas lahan hutan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sebesar 23 % dari luas hutan. Pemanfaatan lahan hutan untuk lahan pertanian di kawasan waduk Cacaban sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 16. Pemanfaatan Lahan Hutan untuk Lahan Pertanian

Desa	Lahan Pertanian di Kawasan Hutan (Ha)
Jatinegara	0,00
Dukuhbangsa	93,16
Lebakwangi	77,63
Capar	67,41
Padasari	133,46
Wotgalih	26,67
Dermasuci	128,99
Karanganyar	13,80
Penujah	240,06
Jumlah	781,18

Sumber : Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal (2007)

Komposisi pekerjaan pasca terjadinya pembukaan lahan kehutanan menjadi lahan pertanian berdasarkan penelitian juga

mengalami perubahan. Tabel berikut ini menunjukkan perubahan komposisi pekerjaan dari responden.

Tabel 17. Pekerjaan Pokok Masyarakat

No.	Pekerjaan Pokok	1987-1997		1998-2008	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1	Petani	49	49	61	61
2	Pedagang	12	12	17	17
3	Buruh	33	33	13	13
4	Pegawai	6	6	9	9
		100	100	100	100

Sumber : Penelitian (2008)

Berdasarkan data tersebut sebagian besar responden bekerja sebagai petani 49 % untuk kurun waktu 1987-1997 dan meningkat pada kurun waktu 1998-2008 menjadi 61 %. Peningkatan jumlah petani merupakan hal yang luar biasa di tengah arus modernisasi. Hal ini tidak terlepas dari pemanfaatan lahan hutan menjadi lahan pertanian (pesanggem).

Disamping itu terjadi peningkatan pada jenis pekerjaan pedagang dari 12 % pada kurun waktu 1987-1997 menjadi 17 % pada kurun waktu 1998-2008. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perdagangan di sekitar kawasan obyek wisata cacaban.

Guna mengetahui perubahan penghasilan responden selama kurun waktu 1987-1997 dan 1998-2008 berikut tabel 18 menyajikan data penghasilan responden.

Tabel 18. Penghasilan Rata-rata Masyarakat

No.	Penghasilan Rata-rata (Rp/bulan)	1987-1997		1998-2008	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
1	< 500.000	57	57	36	36
2	501.000 –	35	35	53	53

	1.000.000				
3	> 1.001.000	8	8	11	11
		100	100	100	100

Sumber : Penelitian (2008)

Berdasarkan data tersebut penghasilan responden sebagian besar meningkat. Pada kurun waktu tahun 1998-2008 sebagian besar responden berpenghasilan Rp. 501.000 – Rp. 1.000.000 per bulan. Penghasilan ini tergolong tinggi untuk masyarakat yang sebagian besar menggeluti usaha pertanian di areal hutan (pesanggem).

Peningkatan pendapatan disekitar kawasan cacaban tidak hanya dirasakan oleh Rumah Tangga namun juga dirasakan oleh lembaga-lembaga yang ada di Desa, salah satunya adalah LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Berikut petikan wawancara dengan pengurus LMDH Desa Karanganyar :

“Pesanggem itu penggarap abadi, dia tidak mau lepas dari tanah perhutani, Saat ini para pesanggen di kawasan waduk cacaban diwadahi dalam forum LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). LMDH akan memperoleh kontribusi dari perhutani pada setiap tebang kayu, besar kontribusi bervariasi antara 2 s/d 12 juta sekali tebang.”

B. Daerah Utama Waduk

Pola aktivitas wisatawan yang berkunjung ke waduk Cacaban saat ini masih terkonsentrasi di daerah utama waduk. Konsentrasi wisatawan di daerah utama waduk tidak terlepas dari pola pengembangan kawasan wisata yang berpusat pada daerah utama waduk. Sebagian besar sarana wisata tersedia di daerah utama waduk seperti keberadaan beberapa warung makan, fasilitas parkir, tempat berkemah, kantor pengelola, jasa penyewaan kapal dan *shelter-shelter*. Konsentrasi wisatawan perlu diarahkan ke lokasi di luar daerah utama waduk, karena aktivitas wisatawan dan adanya beberapa bangunan daerah utama waduk dapat membahayakan keberadaan bangunan utama bendung.

Aktifitas wisatawan dan pola pengembangan wisata perlu dikembangkan ke kawasan pengembangan intensif pariwisata, kawasan penyangga, kawasan perairan dan kawasan lindung yang akan dikembangkan melalui konsep ekowisata. Pola aktifitas wisatawan dapat dipindahkan secara bertahap ke kawasan pengembangan pariwisata intensif, selanjutnya ke kawasan penyangga, kawasan perairan dan kawasan lindung.

Pergeseran pola aktifitas wisatawan sangat dimungkinkan dengan sudah tersedianya akses jalan yang cukup memadai ke kawasan pengembangan pariwisata intensif dan daerah penyangga. Sedangkan akses ke kawasan lindung dimungkinkan dengan membuka akses melalui kawasan pengembangan intensif dan daerah penyangga. Khusus akses untuk kawasan lindung dapat menggunakan jalan setapak yang sementara ini dimanfaatkan masyarakat setempat menuju kawasan lindung. Akses jalan setapak ini melalui konsep ekowisata dapat dikembangkan menjadi *joging-tract* atau jalur sepeda gunung yang mengelilingi kawasan waduk Cacaban. Berikut gambar daerah utama waduk Cacaban :



Sumber : www.google.com (2008)

Gambar 23. Daerah Utama Waduk Cacaban

C. Daerah Perairan

Potensi daerah perairan selama ini belum dimanfaatkan secara optimal baik oleh masyarakat, pengunjung maupun pengelola. Daerah perairan saat ini dimanfaatkan oleh wisatawan untuk menikmati panorama alam dengan menggunakan kapal atau rekreasi pancing. Sedangkan masyarakat setempat masih sangat terbatas memanfaatkan potensi perikanan yang ada di waduk Cacaban. Masyarakat setempat memanfaatkan potensi perikanan dengan cara yang tradisional seperti memancing dan menjaring ikan.

Daerah perairan dapat dimanfaatkan lebih maksimal dengan mengembangkan potensi perikanan secara intensif seperti budidaya perikanan dengan metode keramba ikan yang terintegrasi dengan rumah makan apung sehingga meningkatkan daya tarik wisatawan untuk menikmati wisata air sekaligus menikmati sajian khas masakan ikan yang dapat diperoleh langsung dari keramba-keramba ikan.

Budidaya ikan menggunakan keramba di daerah perairan waduk Cacaban dapat meningkatkan pendapatan nelayan setempat dan sekaligus menambah keanekaragaman jenis ikan yang berkembang di waduk Cacaban. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu potensi pengembangan ekowisata di waduk Cacaban.



Sumber : Penelitian (2008)

Gambar 24. Daerah Perairan di Waduk Cacaban

Daerah perairan di waduk Cacaban saat ini secara kuantitas relatif berkurang dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan terjadinya pengurangan luasan hutan di daerah tangkapan air (*catchment area*) sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya, yang mengakibatkan menurunnya debit sumber air ke waduk Cacaban dan terjadinya sedimentasi.

D. Daerah Pengembangan Pariwisata Intensif

Daerah pengembangan pariwisata intensif terletak di sebelah selatan bangunan utama waduk Cacaban. Daerah ini sesuai dengan rencana induk akan dikembangkan sebagai daerah wisata dengan berbagai fasilitas pendukung untuk menarik minat wisatawan. Berbagai fasilitas yang akan dikembangkan diantaranya beberapa bangunan penginapan, plaza wisata, kantor pengelola, monumen, area parkir, berbagai wahana wisata, sirkuit *roadrace*, arena *grasstrack* dan area parkir.

Pengembangan daerah wisata intensif sebagaimana rencana yang ada perlu kajian yang mendalam dari aspek lingkungan. Hal ini berkaitan dengan dibukanya lahan yang didominasi oleh berbagai macam tanaman keras dan pembukaan lahan di kawasan sabuk hijau *green belt* yang berbatasan langsung dengan daerah perairan waduk.

Rencana tapak pengembangan pariwisata intensif sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Sumber : Bapeda (2005)

Gambar 25. Rencana Tapak Pengembangan Pariwisata Intensif

Salah satu rencana pengembangan pariwisata intensif yang telah dilaksanakan adalah pembanguna sirkuit *road race*. Sirkuit ini dibangun di daerah *green belt* yang berbatasan langsung dengan daerah perairan. Hal ini mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan *green belt* menjadi lahan terbuka dan perluasan daratan dengan pengurugan tanah ke daerah perairan. Rencana tapak proyek sirkuit *road race* sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Sumber : Penelitian (2008)

Gambar 26. Rencana Tapak Proyek Sirkuit *Road Race*

Pengembangan daerah pariwisata intensif lebih lanjut seharusnya lebih memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan. Pengembangan daerah pariwisata intensif masih tetap dapat dilaksanakan namun dengan meminimalisir alih fungsi lahan dan pembukaan daerah lindung menjadi lahan terbuka. Sehingga dampak berkurangnya tutupan lahan yang berpengaruh terhadap keberadaan waduk dapat dikurangi.

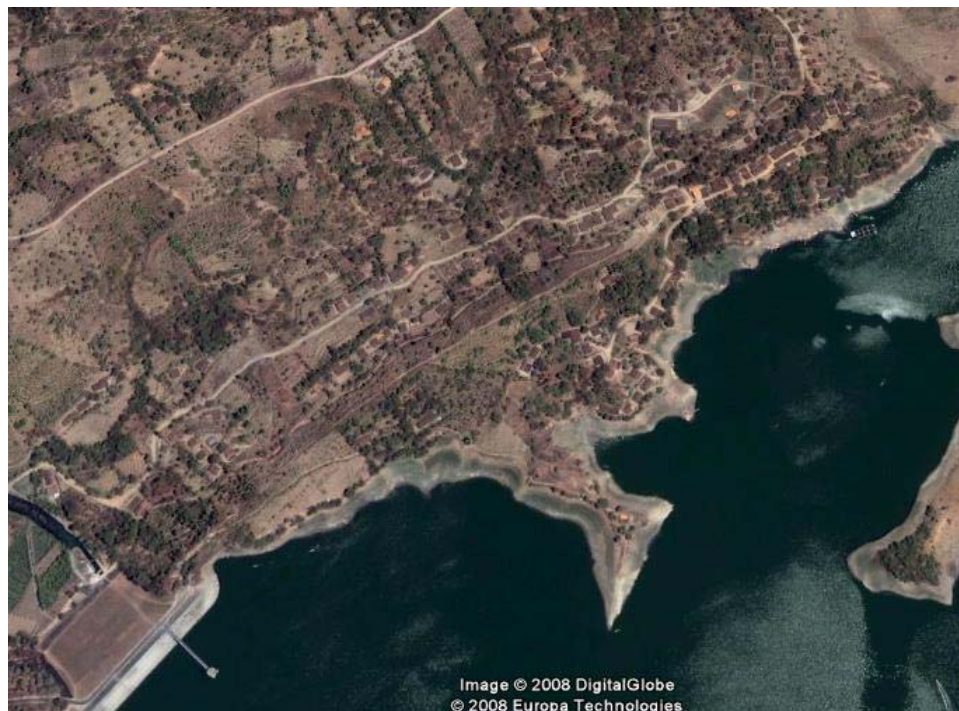
Dengan konsep ekowisata pengembangan daerah pariwisata intensif dapat diarahkan dengan memanfaatkan ruang di bawah tegakan-tegakan yang ada dan membangun fasilitas-fasilitas dengan desain yang lebih ramah lingkungan dan memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada. Dengan demikian pengembangan daerah pariwisata intensif dapat sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan.

E. Daerah Penyangga Pengembangan Pariwisata

Dominasi pemanfaatan lahan di kawasan daerah penyangga pengembangan pariwisata adalah pemukiman dan pekarangan. Daerah ini merupakan pemukiman masyarakat setempat dengan bangunan rumah yang sebagian besar masih sederhana dan berbahan kayu. Lahan pekarangan di sekitar rumah dimanfaatkan untuk budidaya tanaman hortikultura dan sebagian dimanfaatkan untuk kandang-kandang ternak.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, lingkungan di daerah ini secara kualitatif relatif lebih baik dibanding dengan daerah sekitarnya. Berbagai macam tanaman keras masih terpelihara dengan baik diselingi dengan berbagai tanaman hortikultura di bawahnya dan beberapa kandang ternak sekitarnya. Daerah ini juga telah didukung dengan infrastruktur jalan yang relatif baik. Hal ini mempermudah akses wisatawan yang akan mengunjungi dan menikmati suasana lingkungan di daerah tersebut.

Pemanfaatan lahan di daerah penyangga pengembangan pariwisata sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Sumber : www.google.com (2008)

Gambar 27. Daerah penyangga pengembangan pariwisata.

3. Potensi Pengembangan Ekowisata di Kawasan Waduk Cacaban

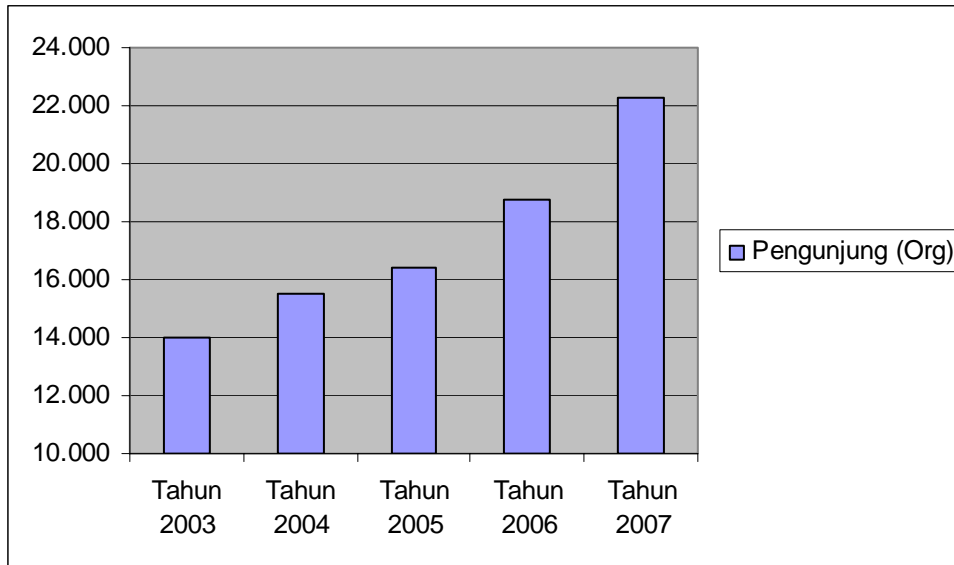
Pengembangan kawasan wisata tidak dapat terlepas dari jumlah kunjungan wisatawan dan minat wisatawan. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Tegal arus wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata waduk Cacaban mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Data pengunjung waduk Cacaban sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 19. Data Jumlah Pengunjung

	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007
Pengunjung (Org)	14.024	15.510	16.446	18.736	22.274

Sumber : Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Tegal (2007).

Peningkatan jumlah pengunjung pada obyek wisata waduk Cacaban juga akan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha di kawasan tersebut. Peningkatan jumlah pengunjung sebesar berturut-turut sebesar 11 % pada tahun 2004, 6 % pada tahun 2005, 14 % pada tahun 2006 dan 19 % pada tahun 2007. Jumlah pengunjung diprediksi tetap meningkat dengan semakin bertambahnya fasilitas dan ragam wisata yang ada di kawasan waduk Cacaban. Gambar peningkatan jumlah pengunjung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Sumber : Diolah dalam Penelitian (2008)

Gambar 28. Peningkatan Jumlah Pengunjung Waduk Cacaban

Peningkatan jumlah pengunjung di kawasan waduk Cacaban juga disertai dengan tingginya minat pengunjung terhadap konservasi. Minat pengunjung terhadap konservasi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 20. Minat Wisatawan terhadap Konservasi

No.	Minat Terhadap Konservasi	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	91	91
2	Tidak Setuju	7	7
3	Ragu-ragu	2	2
	Jumlah	100	100

Sumber : Penelitian (2008)

Berdasarkan data di atas hampir seluruh responden setuju terhadap upaya-upaya konservasi guna memulihkan kondisi lingkungan di sekitar waduk cacaban. Hal ini menunjukkan upaya konservasi di kawasan waduk cacaban tidak akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke waduk cacaban.

Antusiasme wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Waduk Cacaban juga didukung oleh aktivitas masyarakat lokal yang mendukung kegiatan wisata. Aktivitas masyarakat dalam mendukung kegiatan wisata antara lain menyediakan jasa parkir, jasa penyewaan perahu, pedagang asongan makanan kecil dan menyediakan warung-warung makan.

Masyarakat di sekitar waduk Cacaban sebagian juga tidak setuju dengan adanya alih fungsi lahan di sekitar waduk cacaban. Berikut petikan wawancara dengan masyarakat desa Penujah :

“Saya tidak setuju dengan penggundulan hutan di sekitar waduk cacaban. Penggundulan hutan mengakibatkan lumpur masuk ke waduk. Air disekitar waduk juga semakin sulit malah ada yang kekeringan.”

Upaya konservasi telah dilakukan namun hingga saat ini belum maksimal. Hal ini digambarkan dari pernyataan seorang pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Tegal dalam wawancara sebagai berikut :

“Untuk kegiatan konservasi di kawasan wisata waduk cacaban kita terkait dengan dinas/instansi lain seperti Tanbunhut, Dinas LHKP dan PSDA. Kalau tugas dinas pariwisata lebih pada pengembangan wisatanya, mas.”

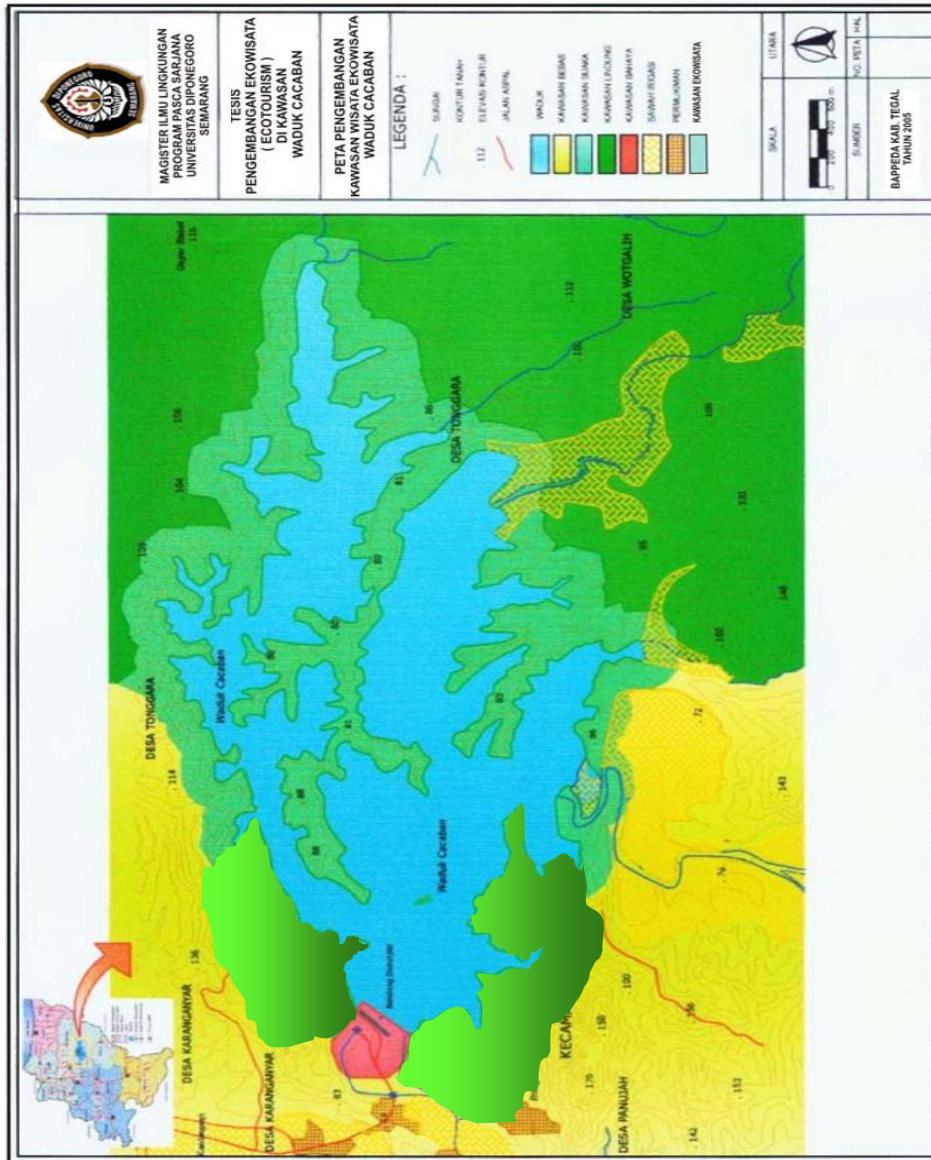
Konservasi seharusnya menjadi perhatian bagi semua pihak termasuk didalamnya Dinas Perhubungan dan Pariwisata selaku dinas yang mengelola kawasan wisata waduk cacaban. Hal ini senada dengan pernyataan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam wawancara berikut :

“Banyak pihak yang peduli kepada cacaban tetapi *actionnya* belum ada. Masing-masing pihak punya kegiatan yang tidak berkesinambungan. Harusnya konsep pengelolaan cacaban dilakukan bersama-sama. Selama ini masing-masing dinas lepas tangan. Sebagai contoh untuk urusan hutan yang disalahkan selau perhutani, air waduk surut juga disalahkan perhutani. Tentunya perhutani tidak mau menjadi tumpuan kesalahan. Padahal air di cacaban yang memanfaatkan adalah dinas pengairan. Dinas tanbunhut telah beberapa kali melaksanakan program penghijauan tetapi selalu gagal, karena tidak pernah melibatkan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan penghijauan dominan pada kegiatan bibit tanpa diikuti upaya pemeliharaan.”

Pengembangan kawasan wisata waduk Cacaban lebih tepat dilaksanakan secara lintas sektor dan mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih tinggi. Hal ini merupakan konsep dasar pengembangan ekowisata di waduk cacaban.

Daerah tangkapan air waduk Cacaban dengan topografi berbukit dan didominasi dengan hutan sangat sesuai untuk pengembangan ekowisata. Pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban sekaligus sebagai upaya konservasi.

Berdasarkan pola pemanfaatan lahan yang saat ini dilakukan, upaya konservasi tanah dan air masih sangat kurang. Upaya konservasi tanah dan air di kawasan waduk Cacaban dapat dilakukan dengan pengembangan ekowisata. Selain adanya peran aktif wisatawan juga adanya upaya konservasi dari masyarakat setempat dan pengelola. Pengembangan ekowisata dapat dilakukan di daerah pengembangan pariwisata intensif, daerah penyangga pariwisata dan daerah lindung. Peta pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Gambar 29. Kawasan Pengembangan Ekowisata

Sesuai dengan kondisi di kawasan waduk Cacaban yang merupakan kombinasi daerah darat dan perairan dapat dikembangkan beberapa potensi ekowisata. Potensi ekowisata yang dapat dikembangkan diantaranya *agroforest*, perikanan, budaya dan edukasi. Masing-masing potensi tersebut diuraikan dalam sub bab berikut :

a. Potensi Agroforest

Pola pemanfaatan lahan sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya didominasi oleh terjadinya alih fungsi hutan menjadi ladang terutama di kawasan lindung yang dilakukan oleh masyarakat penggarap di sekitar kawasan waduk Cacaban atau lebih dikenal dengan sebutan pesanggem. Keberadaan pesanggem ada di setiap desa yang memiliki kawasan hutan dan masuk dalam daerah tangkapan air waduk Cacaban. Pembukaan lahan hutan menjadi lahan pertanian sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Sumber : Penelitian (2008)

Gambar 30. Pembukaan Lahan Hutan menjadi Lahan Pertanian

Pola pemanfaatan lahan dengan membuka lahan hutan dan merubahnya menjadi lahan pertanian tidak sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air. Dimana upaya konservasi tanah dan air merupakan hal utama yang harus dilakukan untuk menjamin kelestarian waduk Cacaban.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu upaya pengelolaan hutan yang sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air sekaligus dapat bermanfaat secara ekonomis bagi penggarap atau pesanggem.

Salah satu konsep yang dapat diterapkan adalah konsep *agroforest* (wanatani).

Agroforest merupakan salah satu sistem pengelolaan lahan yang dapat meminimalisir masalah lingkungan yang diakibatkan oleh terjadinya proses alih fungsi lahan hutan. Selain itu *agroforest* merupakan salah satu sistem pertanian yang berkelanjutan. Beberapa definisi *agroforest* digunakan oleh Lembaga Penelitian Agroforestri Internasional (ICRAF : *International Centre for Research in Agroforestry*) salah satunya adalah pendapat Huxley (1999), *agroforest* adalah sistem penggunaan lahan yang dikombinasikan tanaman berkayu (pepohonan, perdu, bambu, rotan dan lainnya) dengan tanaman tidak berkayu atau dapat pula dengan rerumputan/pasture, kadang dengan komponen ternak atau hewan lainnya (lebah, ikan) sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antara tanaman berkayu dengan komponen lainnya

Keberadaan hutan jati di daerah tangkapan air dan adanya pembukaan lahan untuk pertanian merupakan hal yang bertolak belakang. Keberadaan lahan pertanian dengan membuka lahan hutan akan mengurangi luasan hutan yang ada. Namun demikian berbagai program rehabilitasi lahan yang di daerah tangkapan air waduk Cacaban , salah satunya Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan dan Hutan belum cukup berhasil. Hal ini tidak terlepas dari belum terakomodirnya kepentingan petani penggaap (pesanggem) dalam gerakan tersebut.

Melalui pendekatan *agroforest*, dimana tanaman keras ditanam dalam lokasi yang sama dengan tanaman semusim melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dengan melibatkan para pesanggem dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang telah ada di desa-desa, maka tujuan konservasi tanah dan air secara vegetatif dapat tercapai. Selain tercapainya tujuan konservasi, budidaya tanaman semusim yang dilakukan oleh para petani penggarap (pesanggem) juga tetap dapat dilaksanakan.

Berdasarkan observasi di daerah tangkapan air waduk Cacaban terdapat beberapa alternatif kombinasi *agroforest* yang dapat diterapkan diantaranya :

- *Agrisilvikultur* : Kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan dengan komponen pertanian.
- *Agrosilvopastura* : Kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan kehutanan dan peternakan.
- *Silvopastura* : Kombinasi antara komponen kegiatan kehutanan dengan peternakan.

Penerapan kombinasi *agroforest* dapat disesuaikan dengan jenis tanaman yang sesuai untuk dikembangkan dan kondisi lokasi. Beberapa jenis tanaman keras yang dapat dikembangkan antara lain jati, mangga dan durian (Bapeda, 2005). Sedangkan tanaman semusim yang dapat dikembangkan diantaranya tanaman palawija dan berbagai jenis tanaman buah-buahan, dimana salah satu potensi yang ada adalah tanaman nanas dan pisang. Peternakan juga merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan, salah satunya adalah peternakan kambing dimana di Kabupaten Tegal permintaan ternak kambing relatif tinggi dibanding dengan daerah lain. Potensi peternakan juga didukung dengan adanya lahan yang memadai untuk ketersediaan pakan ternak yang berasal dari berbagai jenis rumput. Potensi pengembangan *agroforest* sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Sumber : Penelitian (2008).

Gambar 31. Potensi Pengembangan Agroforest (Wanatani)

Kombinasi *agroforest* dapat diterapkan pada masing-masing daerah peruntukan. Daerah lindung lebih sesuai dikembangkan *agroforest* dengan kombinasi *agrisilvikultur*. Sedangkan daerah penyangga lebih sesuai dikembangkan dengan kombinasi *agrosilvopastura* atau *silvopastura*. Keberadaan pemukiman di daerah penyangga memungkinkan pengembangan ternak di kawasan tersebut lebih mudah dipantau.

Berdasarkan pertimbangan besarnya kontribusi pendapatan usaha pertanian yang dilakukan pesanggem serta upaya konservasi tanah dan air maka pendekatan *agroforest* dapat mengakomodir pertimbangan tersebut. Dengan dijadikannya *agroforest* sebagai salah satu potensi ekowisata juga akan meningkatkan kontribusi dari sektor pariwisata bagi penduduk setempat.

Potensi *agroforest* sangat mendukung konsep pengembangan ekowisata. Dengan pengembangan ekowisata selain hasil langsung dari

produk komponen *agroforest* juga adanya hasil dari komponen pariwisata dengan dibukanya akses wisata ke daerah-daerah *agroforest* yang akan dikembangkan. Pengembangan *agroforest* merupakan salah satu potensi ekowisata di kawasan waduk Cacaban

b. Potensi Perikanan

Kawasan waduk cacaban yang memiliki luas genangan 928,7 hektar mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan perikanan. Perikanan tangkap maupun budidaya dapat dikembangkan secara bersama-sama dengan memanfaatkan area perairan waduk. Pengembangan perikanan merupakan salah satu potensi pengembangan ekowisata dan sekaligus sebagai upaya konservasi sumberdaya perikanan di kawasan waduk Cacaban.

Pengembangan perikanan di kawasan waduk Cacaban mempunyai peluang yang sangat besar. Disamping tersedianya luasan lahan yang cukup juga tersedianya berbagai jenis benih ikan aiat tawar di Balai Pengembangan Benih Ikan (BPBI) Kabupaten Tegal yang terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng kurang lebih 3 kilometer dari kawasan waduk Cacaban. BPBI dikelola oleh Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tegal. Keberadaan BPBI sangat mendukung pengembangan perikanan di kawasan waduk Cacaban. Potensi pengembangan perikanan dan keberadaan BPBI sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Sumber : Penelitian (2008)

Gambar 32. Potensi Perikanan dan Balai Pengembangan Benih Ikan

Pengembangan perikanan sebagai upaya konservasi dan menjaga keanekaragaman hayati telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan menebar benih ikan di genangan waduk Cacaban. Upaya tersebut masih perlu dikembangkan dengan pola budidaya perikanan yang lebih intensif. Salah satu budidaya perikanan secara intensif yang mempunyai potensi dikembangkan adalah budidaya perikanan dengan tehnik keramba.

Balai Pengelolaan Sumberdaya Daya Air (PSDA) Pemali Comal telah mengakomodir rencana pengembangan keramba dengan mengalokasikan maksimal 5 % luas genangan waduk Cacaban. Namun demikian hingga saat ini rencana tersebut belum dapat terealisasi. Permasalahan utama pengembangan perikanan dengan tehnik keramba adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat setempat tentang budidaya perikanan dengan tehnik keramba . Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat sebagai berikut :

”Saya bersama teman-teman dari paguyuban Cacaban Indah Lestari pernah diundang ke balai pengembangan benih ikan, disana diajarkan ternak ikan dengan keramba. Setelah itu tidak adalagi tindakInjutnya hingga sekarang.”

c. Potensi Budaya ,Sejarah dan Edukasi

Masyarakat di kawasan waduk Cacaban memiliki jenis kesenian tradisional yaitu kesenian Calung. Kesenian Calung menggunakan alat musik yang berbahan dasar bambu. Kesenian ini seringkali ditampilkan dalam pertunjukan untuk memeriahkan acara resepsi di kalangan masyarakat setempat disamping itu juga ditampilkan dalam upacara-upacara tertentu seperti penyambutan tamu dan kegiatan ruwat bumi.

Selain mempunyai potensi budaya kesenian calung sebagian masyarakat setempat juga memiliki kearifan lokal dengan memanfaatkan pola *silvopastura* secara sederhana. Dimana dibawah tegakan tanaman

hutan dibangun kandang-kandang ternak kambing dan budidaya rumput sebagai pakan ternak. Kegiatan ini dilakukan di sekitar rumah-rumah penduduk. Kearifan lokal masyarakat lokal yang lain adalah adanya upacara ruwat bumi yang dilakukan setiap tahun pada setiap awal musim hujan sebagai rasa syukur melimpahnya sumberdaya air di kawasan waduk Cacaban.

Waduk Cacaban juga mempunyai potensi sejarah dimana waduk Cacaban merupakan salah satu waduk yang dibangun pada awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Waduk Cacaban direncanakan mulai tahun 1952, selanjutnya dibangun dan diresmikan oleh Presiden RI Pertama Ir. Soekarno pada tahun 1959. Waduk Cacaban berfungsi untuk menampung air di musim hujan, sekaligus sebagai sumber persediaan air irigasi teknis pada musim kemarau.

Wisata edukasi merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan di kawasan ekowisata waduk Cacaban. Wisata edukasi terkait dengan potensi ekowisata yang lain yaitu potensi *agroforest* dan budaya. Disamping itu wisata edukasi juga dapat dikembangkan untuk mengenal lebih jauh kegiatan operasional waduk. Berikut gambar beberapa obyek potensi wisata budaya, sejarah dan edukasi:



Sumber : Peneltian (2008)

Gambar 33. Obyek Wisata Budaya, Sejarah dan Edukasi

4. Kebijakan dan Peran Institusi dalam Pengembangan Ekowisata

Perencanaan pengembangan ekowisata di waduk Cacaban melibatkan banyak pengampu kepentingan (*stakeholder*). Guna mengakomodir luasnya kepentingan dalam pengembangan ekowisata di kawasan Waduk Cacaban perencanaan pengembangan ekowisata dilaksanakan dengan menggunakan 7 langkah perencanaan melalui beberapa tahapan yaitu : identifikasi masalah, perumusan tujuan, analisis kondisi, alternatif kebijakan, pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi. Masing-masing tahapan pengembangan ekowisata secara rinci akan diuraikan dalam beberapa sub bab berikut.

a. Identifikasi Masalah

Kawasan waduk Cacaban saat ini telah dikembangkan sebagai kawasan wisata. Wisata yang dikembangkan saat ini belum memberikan

kontribusi positif terhadap kelesatarian lingkungan. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dikembangkan suatu jenis wisata di kawasan waduk Cacaban dapat mendukung fungsi utama waduk Cacaban sebagai sumber irigasi.

b. Penetapan Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam pengembangan wisata di kawasan waduk Cacaban terutama pada aspek lingkungan maka perlu dilaksanakan pengembangan wisata berkelanjutan. Salah satu jenis wisata berkelanjutan adalah ekowisata. Sehingga pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban merupakan tujuan.

c. Analisis Kondisi

Analisis kondisi dalam perencanaan pengembangan ekowisata waduk cacaban menggunakan analisis SWOT. Pendekatan analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, Threat*) untuk rencana Pengembangan Kawasan Ekowisata Waduk Cacaban merupakan pendekatan yang didasarkan pada Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman pada kawasan waduk Cacaban. Tahapan analisis SWOT yang dilakukan meliputi : tahapan identifikasi dan penilaian faktor internal dan eksternal, analisis keterkaitan unsur SWOT dan tahapan penentuan alternatif rencana pengelolaan.

Dalam analisis potensi dan kelemahan serta kekuatan dan peluang, isu-isu yang terjadi dapat diidentifikasi menjadi dasar kajian antara lain :

1. Terjadinya degradasi lingkungan akibat pola pemanfaatan lahan yang kurang sesuai.
2. Belum tergalinya potensi wisata yang mendukung upaya konservasi.
3. Masih adanya kelemahan dalam aspek kebijakan dan peran institusi dalam pengembangan kawasan ekowisata waduk Cacaban.

c.1. Identifikasi dan Penilaian Faktor Internal dan Eksternal

Faktor internal yaitu Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weaknesses*), sedangkan faktor eksternal yaitu Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threat*). Analisis kekuatan yang

dimaksud adalah keunggulan yang dimiliki kawasan wisata waduk Cacaban dalam aspek pemanfaatan lahan, potensi ekowisata serta kebijaksanaan dan peran institusi. Kelemahan yang dimaksud, yaitu kondisi aspek pengelolaan dan kebijaksanaan, lingkungan serta sosial ekonomi yang dipandang dapat menghambat program pengelolaan kawasan ekowisata waduk Cacaban.

Peluang yang dimaksud adalah kondisi eksternal yang dapat mendatangkan keuntungan apabila dapat memanfaatkannya. Berbagai peluang yang tersedia dapat dikembangkan secara optimal berdasarkan potensi, hambatan dan rencana program pengelolaan sebagai kawasan ekowisata. Ancaman adalah keadaan eksternal yang apabila dibiarkan akan menjadi faktor penghambat terhadap keberhasilan program pengelolaan kawasan ekowisata waduk Cacaban. Ancaman ini perlu diwaspadai dan harus diatasi karena dapat memberikan pengaruh terhadap bisa atau tidaknya faktor-faktor peluang untuk dimanfaatkan.

c.2. Analisis Keterkaitan Unsur SWOT

Dibawah ini diuraikan analisis terhadap kondisi yang dihadapi dalam upaya pengembangan ekowisata di kawasan wisata waduk Cacaban berdasarkan observasi dan wawancara kepada para responden terhadap suatu bentuk Badan Pengelola Ekowisata Waduk Cacaban (BPEWC) diperoleh hasil sebagai berikut :

1). Analisis Kondisi Internal

Dalam analisis kondisi internal, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh kawasan wisata waduk Cacaban adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan

- Cakupan kawasan waduk Cacaban yang luas terdiri dari daerah daratan daerah perairan. Kawasan tersebut mempunyai fungsi sebagai daerah lindung, penyangga dan daerah budidaya.

- Potensi dan daya tarik ekowisata di kawasan waduk Cacaban sangat beragam meliputi potensi agroforest, perikanan, budaya, sejarah dan edukasi.
- Keterlibatan beberapa pengampu kepentingan (*stakeholder*) terutama beberapa kelompok masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Paguyuban Cacaban Indah Lestari (PCIL) mendukung proses perencanaan partisipatif dan pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban.

b. Kelemahan

- Pola pemanfaatan lahan yang bersifat monokultur dan didominasi oleh tanaman semusim belum sepenuhnya mendukung upaya konservasi tanah di kawasan waduk Cacaban dan pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban.
- Potensi ekowisata di kawasan waduk Cacaban belum dikembangkan secara optimal, dimana pengembangan wisata yang dilakukan saat ini lebih mengarah ke wisata massal (*mass tourism*) salah satu contohnya adalah pembanguna arena road race untuk menarik wisatawan yang dominan berusia muda.
- Keterlibatan beberapa pihak seperti Pemkab Tegal, Balai PSDA Pemali-Comal dan Perum Perhutani KPH Pemalang dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan waduk Cacaban masih kurang dan masih bersifat sektoral

2). Analisis Kondisi Eksternal

a. Peluang

- Pola pemanfaatan lahan dengan konsep agroforest sebagai potensi utama pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban sinergi dengan upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh berbagai pihak secara luas baik pemerintah, swasta antara lain melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan masyarakat yang dapat memanfaatkan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang saat ini sedang dikembangkan.

- Peluang investasi terhadap potensi ekowisata yang ada di kawasan waduk Cacaban salah satunya sebagaimana yang dicanangkan oleh PT. Palawi, satu anak perusahaan Perum Perhutani dengan program *Green Ecotourism*.
- Kebijakan pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban yang merupakan aset nasional akan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik Pemerintah Kabupaten Tegal, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

b. Ancaman

- Tingginya permintaan kayu jati sebagai komponen utama *agroforest* untuk mebel dan bahan bangunan dapat mengganggu pola pemanfaatan lahan dengan konsep *agroforest* dan upaya konservasi tanah di kawasan waduk Cacaban.
- Orientasi ekonomi dari investor yang lebih dominan terhadap pengembangan potensi wisata di kawasan waduk Cacaban ke arah *mass tourism* dapat menekan upaya pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban dapat menimbulkan kerugian terhadap aspek lingkungan.
- Adanya perubahan kebijakan dan kondisi makro baik perekonomian, sosial maupun politik sebagaimana terjadi pada awal masa reformasi dapat mengganggu upaya pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban pada khususnya dan upaya pelestarian lingkungan pada umumnya.

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan faktor eksternal tersebut selanjutnya disusun dalam suatu matrik SWOT. Adapun matrik SWOT pengembangan ekowisata di kawasan Waduk Cacaban sebagaimana tersaji di bawah ini :

<div>Faktor Eksternal</div> <div>Faktor Internal</div>	Opportunity (Peluang)			Threat (Ancaman)		
	Pengembangan ekowisata sinergi dengan upaya pelestarian lingkungan	Peluang Investasi terhadap pengembangan ekowisata	Pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban merupakan aset nasional	Tingginya permintaan jati dapat mengganggu pola pemanfaatan lahan	Orientasi ekonomi yang dominan ke arah pengembangan mass tourism	Perubahan kebijakan makro dapat mengganggu upaya pengembangan ekowisata
	1	2	3	1	2	3
Strenght (Kekuatan)		Strategi SO		Strategi ST		
Cakupan Kawasan wisata yang luas	1	1. Pemanfaatan kawasan ekowisata dengan menarik investasi dan menjadikan aset nasional (S1,2-O1,2,3)		1. Pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi ekowisata untuk meningkatkan kontribusi secara ekonomi bagi pengelola dan masyarakat (S1,2-T1,2,3)		
Ragam potensi dan daya tarik ekowisata	2	2. Pemberdayaan stakeholder untuk pengembangan ekowisata dan pelestarian lingkungan (S3, O1,3)		2. Peningkatan koordinasi lintas sektor (stake holder) dari proses perencanaan, implementasi dan evaluasi (S1-T1,2,3)		
Keterlibatan banyak pengampu kepentingan (stakeholder)	3					
Weakness (Kelemahan)		Strategi WO		Strategi WT		
Pola pemanfaatan lahan belum mendukung upaya konservasi tanah	1	1. Perubahan pola pemanfaatan lahan yang mendukung pengembangan ekowisata dan pelestarian lingkungan dengan melibatkan pengampu kepentingan (W1,2,3-O1,2,3)		1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata sebagai upaya antisipasi adanya ancaman terhadap pengembangan kawasan waduk Cacaban (W1,2,3 - T1,2,3)		
Belum berkembangnya potensi ekowisata	2					
Peran pangampu kepentingan bersifat sektoral	3					

Sumber : Penelitian (2008).

Gambar 34. Matrik SWOT

Rencana kegiatan pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban didasarkan kepada hasil analisis dari permasalahan dan kondisi yang ada. Hasil analisis SWOT dari peluang, kekuatan, kelemahan dan hambatan yang ada menunjukkan adanya pilihan strategi yang harus dilakukan antara lain.

- a. Rencana Kegiatan Pengelolaan
 - Pemantapan kawasan.

- Efektivitas pengelolaan kawasan.
 - Pengembangan konservasi jenis dan keragaman hayati.
 - Perlindungan dan pengamanan kawasan.
 - Pendukung kelembagaan.
 - Pemanfaatan kawasan
- b. Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana
- Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan.
 - Pengembangan sarana dan prasarana edukatif.
 - Pengembangan sarana dan prasarana penelitian

d. Alternatif Kebijakan

Berdasarkan analisis kondisi yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT dapat diperoleh beberapa alternatif kebijakan sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan kawasan ekowisata dengan menarik investasi dan menjadikan aset nasional.
- 2) Pemberdayaan stekholder untuk pengembangan ekowisata dan pelestarian lingkungan.
- 3) Pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi ekowisata untuk meningkatkan kontribusi secara ekonomi bagi pengelola dan masyarakat.
- 4) Peningkatan koordinasi lintas sektor dari proses perencanaan, implementasi dan evaluasi pengelolaan kawasan waduk Cacaban.
- 5) Perubahan pola pemanfaatan lahan yang mendukung pengembangan ekowisata dan pelestarian lingkungan dengan melibatkan pangampu kepentingan.
- 6) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata sebagai upaya antisipasi adanya ancaman terhadap pengembangan kawasan waduk Cacaban.

e. Pilihan Kebijakan

Pilihan kebijakan dilakukan dengan menyusun skala prioritas dari beberapa alternatif kebijakan yang ada. Berdasarkan alternatif kebijakan yang telah ditentukan pilihan kebijakan berdasarkan prioritas adalah sebagai berikut :

- 1). Perubahan pola pemanfaatan lahan dari monokultur ke agroforest dengan keterlibatan aktif para pesanggem dalam wadah LMDH.
- 2). Pengembangan potensi agroforest, perikanan, budaya, sejarah dan edukasi sesuai dengan pola peruntukan yang telah diatur dalam Masterplan Kawasan Waduk Cacaban Tahun 2005.
- 3). Pengembangan peran institusi dalam wadah organisasi Badan Pengelola Ekowisata Waduk Cacaban (BPEWC) dimana di dalamnya terakomodir kepentingan dari beberapa pihak pemerintah (Pemkab, Pemprov, Perum Perhutani), swasta dan masyarakat

f. Implementasi

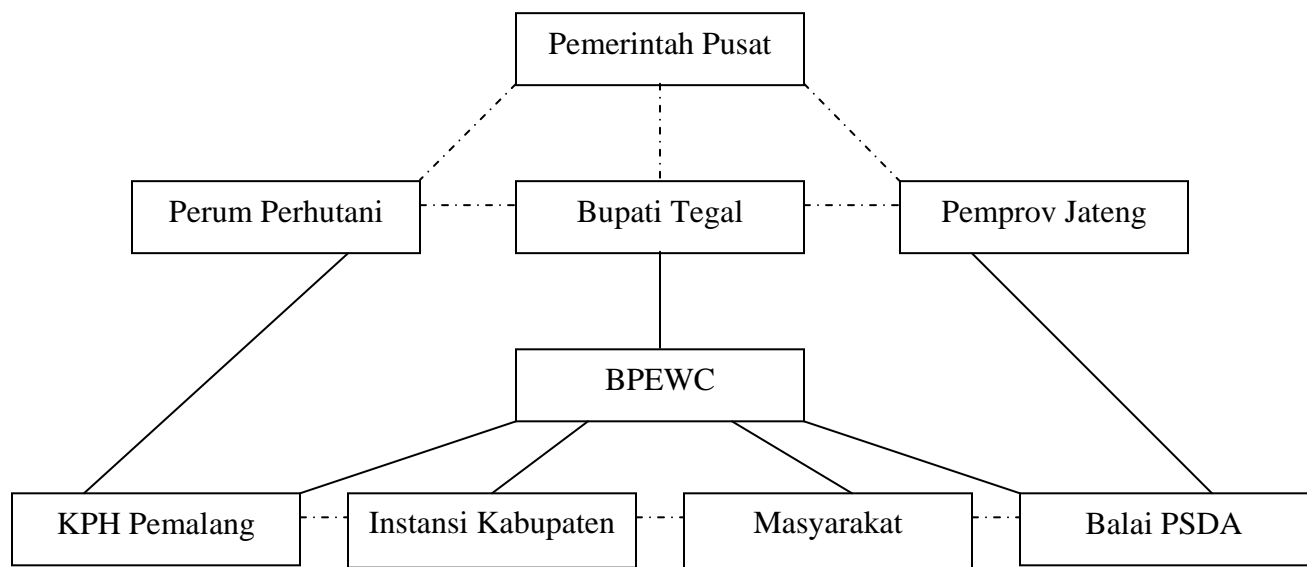
Implementasi dari kebijakan pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban memerlukan keterlibatan dan peran institusi serta pola hubungan antar institusi. Institusi terkait dalam pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban adalah sebagai berikut :

- 1). Balai PSDA Pemali Comal
- 2). Perum Perhutani KPH Pemalang
- 3). Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Tegal
- 4). LSM Wahana Karyatama
- 5). Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal
- 6). Bapeda Kabupaten Tegal
- 7). Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kota dan Pertamanan Kabupaten Tegal
- 8). Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal
- 9). Pemerintah Desa
- 10). Pemerintah Kecamatan
- 11). Akademisi
- 12). Komisi A DPRD Kabupaten Tegal
- 13). Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
- 14). Lembaga Masyarakat Desa Hutan

- 15). Paguyuban Cacaban Indah Lestari
- 16). Kelompok Sadar Wisata

Dari beberapa pengampu kepentingan sebagaimana tersaji di atas, berdasarkan inventarisasi ada 4 pengampu kepentingan yang mempunyai peranan langsung dalam pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban yaitu Perum Perhutani KPH Pemalang, Balai PSDA Pemali Comal, Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Tegal dan masyarakat di Kawasan waduk Cacaban (LMDH, PCIL dan Pokdarwis).

Secara struktural masing-masing pengampu kepentingan menjalankan perannya dalam pengembangan ekowisata di Kawasan Waduk Cacaban sebagai togas pokok dan fungsinya sebagaimana peraturan yang berlaku. Sedangkan secara fungsional kedudukan masing-masing pengampu kepentingan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Ekowisata Waduk Cacaban (BPEWC). Sebagai suatu bentuk badan pengelola ekowisata di kawasan waduk Cacaban, BPEWC memerlukan struktur organisasi dan pola koordinasi. Konsep struktur dan pola koordinasi Badan Pengelola Ekowisata Waduk Cacaban sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



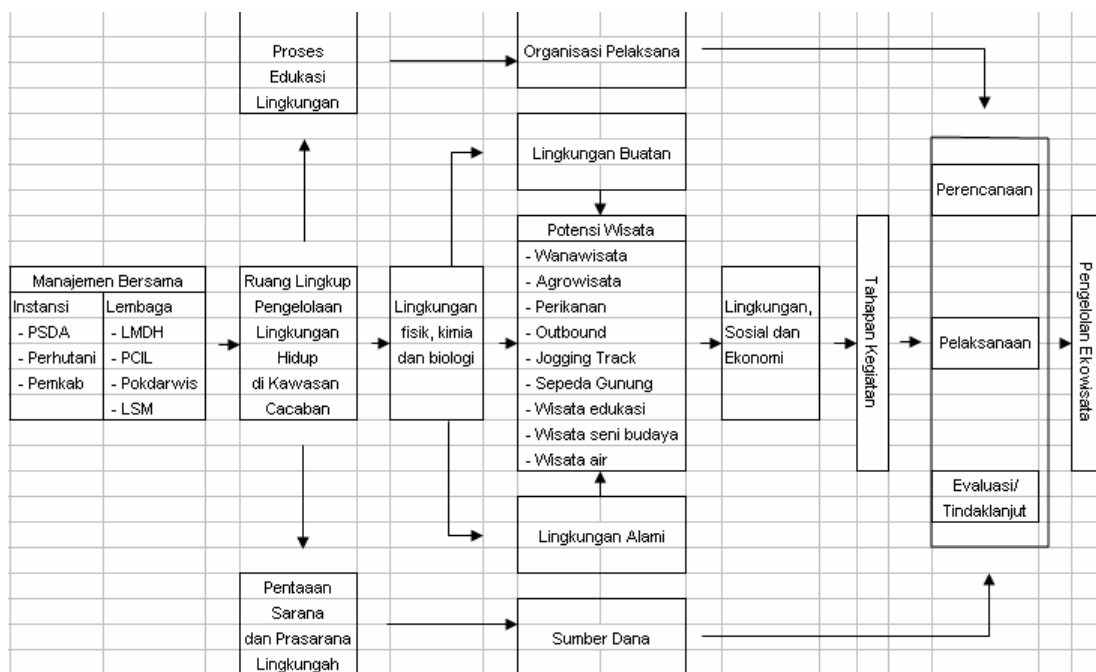
Keterangan :

————— : Garis Struktural
 - - - - - : Garis Koordinasi

Sumber : Penelitian (2008)

Gambar 35. Struktur Organisasi dan Pola Koordinasi BPEWC

BPEWC berada di bawah kewenangan Bupati Tegal dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPEWC membawahi KPH Pemalang, Instansi Kabupaten, Masyarakat dan Balai PSDA. Sedangkan hubungan lintas lembaga berbentuk hubungan koordinasi. Setiap pengampu kepentingan mempunyai pola dan peran masing-masing. Pola hubungan dan peran institusi sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :



Gambar 36. Diagram Model pengembangan Ekowisata

Kerangka isi model pengelolaan lingkungan hidup kawasan ekowisata waduk cacaban beberapa komponen pendukung yaitu : dasar pemikiran, visi dan misi pengelola, kebijakan pengelolaan, tujuan dan sasaran pengelolaan, program pengelolaan, ruang lingkup pengelolaan, pendidikan lingkungan hidup, sumberdaya dan dana, organisasi

pelaksana, tahapan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

g. Evaluasi

Kegiatan pengelolaan Kawasan Ekowisata Waduk Cacaban merupakan proses berkelanjutan, sehingga pemantauan dan evaluasi kegiatan merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dalam perjalanan waktu, isu-isu pengelolaan kawasan yang baru akan muncul, sehingga dalam aktivitas perencanaan lebih lanjut akan didapatkan beberapa strategi-strategi tertentu yang tidak relevan lagi. Oleh karena itu, prioritas kegiatan perlu dievaluasi dan dimodifikasi.

Secara umum melakukan kegiatan monitoring berarti melakukan dua hal, yaitu pertama pemantauan atas rencana-rencana yang telah dibuat, kedua membandingkan kinerja dengan ukuran yang telah di buat, memutuskan apakah perlu ada perubahan rencana dan membuat perbaikan-perbaikan. Tetapi, dalam sistem manajemen pengelolaan kawasan ekowisata, pengertian ini dimodifikasi untuk mengetahui perbedaan antara kejadian-kejadian alami, survei, pemantauan, pengamatan dan penelitian. Sedangkan evaluasi kegiatan pengembangan ekowisata berarti mengidentifikasi apa yang sudah dicapai dan mana yang belum serta apa yang harusnya dilakukan ke depan dengan melibatkan atau mengumpulkan umpan balik dari *stakeholder*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola pemanfaatan lahan di kawasan waduk Cacaban belum mendukung upaya konservasi tanah dan kelestarian waduk Cacaban. Pola pemanfaatan lahan untuk masing-masing daerah peruntukan adalah sebagai berikut :
 - a. Daerah peruntukan A atau kawasan lindung digunakan untuk pengembangan tanaman monokultur.
 - b. Daerah peruntukan B atau kawasan utama waduk digunakan sebagai pusat kegiatan wisata dan atraksi wisata.
 - c. Daerah peruntukan C atau kawasan perairan belum dimanfaatkan sebagai potensi perikanan secara optimal.
 - d. Daerah peruntukan D atau kawasan pengembangan wisata intensif cenderung mengarah peningkatan fasilitas wisata masal (mass tourism).
 - e. Daerah peruntukan E atau daerah penyangga belum dikembangkan secara optimal untuk mendukung pengembangan wisata.
2. Potensi pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban secara spesifik dibedakan sesuai dengan daerah peruntukan. Potensi pengembangan ekowisata adalah sebagai berikut :
 - a. Daerah peruntukan A atau kawasan lindung dikembangkan sebagai kawasan *agroforest* dengan kombinasi *agrisilvikultur* dengan tanaman utama jati
 - b. Daerah peruntukan B atau kawasan utama waduk dikembangkan sebagai pusat kegiatan sejarah dan edukasi dengan potensi utama edukasi tentang fungsi utama waduk.
 - c. Daerah peruntukan C atau kawasan perairan dikembangkan dengan konsep budidaya perikanan intensif dan wisata tirta
 - d. Daerah peruntukan D atau kawasan pengembangan wisata intensif dikembangkan sebagai kawasan *agroforest* dan budaya.

- e. Daerah peruntukan E atau daerah penyangga dikembangkan sebagai kawasan agroforest dengan kombinasi *agrosilvopastura* atau *silvopastura* dan budaya.
- 3. Kebijakan pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban secara intensif dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Tegal, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani dan masyarakat dalam bentuk Badan Pengelola Ekowisata Waduk Cacaban.

5.2. Saran

Dalam rangka pengembangan ekowisata di kawasan waduk Cacaban, terdapat beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pengembangan atraksi ekowisata dengan basis potensi agroforest, wisata tirta dan wisata budaya, sejarah serta edukasi di kawasan waduk Cacaban.
2. Perbaikan infrastruktur dan peningkatan pelayanan jasa wisata terutama oleh masyarakat local dalam mendukung pengembangan atraksi ekowisata.
3. Peningkatan promosi dan perluasan peluang pasar ekowisata.
4. Peningkatan ekonomi lokal dan penguatan sumberdaya masyarakat lokal.
5. Peningkatan dukungan kebijakan lintas sektor dalam pengembangan ekowisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Bapeda Kabupaten Tegal. 2003. RTRW Kabupaten Tegal. Bapeda. Slawi.
- Bapeda Kabupaten Tegal. 2005. Master Plan Kawasan Obyek Wisata Waduk Cacaban Kabupaten Tegal Tahun 2005. Bapeda. Slawi.
- Borong, P. R. 1999. Etika Bumi Baru. BPK Gunung Mulia. Jakarta.
- Boothroyd, P. 1991. Developing Community Planning Skills : Application of Seven-Step Model. UBC Centre for Human Settlements. Vancouver.
- Choy,D.L. 1997. Perencanaan Ekowisata. Belajar dari Pengalaman di South East Queensland. Proceedings on The Planning and Workshop of Planning Sustainable Tourism. Penerbit ITB Bandung.
- Damanik, J. dan Weber, H.F. 2006. Perencanaan Ekowisata – Dari Teori ke Aplikasi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Dirawan, G. D. 2003. Analisis Sosio-Ekonomi dalam Pengembangan Ekotourisme pada Kawasan Suaka Marga Satwa Mampie Lampoko. IPB. Bogor.
- Fandeli, C dan Mukhlison. 2000. Pengusahaan Ekowisata. UGM. Yogyakarta.
- Fandeli,C. Dan Nurdin,M. 2005. Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi di Taman Nasional. UGM. Yogyakarta.
- Faulkner, B. 1997. Tourism Development in Indonesia. In Big Prespective. Proceeding on the Training and Workshop of Planning Sustainable Tourism. Penerbit ITB. Bandung.
- Gibson, R. B. 1993. Environmental Assessment Design : Lesson From The Canadian Experiance. Enviromental Profesional 15 (1).
- Grumbine, R. E. 1994. What is ecosystem management?Conservation Biologi 8 (1).
- Gunawan M.P. dkk. 2000. Agenda 21 Sektoral : Agenda Pariwisata untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan. UNDP-Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Hadi, S. P. 2005¹. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

- Hadi, S. P. 2005². Aspek Sosial Amdal - Sejarah, Teori dan Metode. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hadi, S. P. 2005³. Metodologi Penelitian Kualitatif : Kuantitatif, Kualitatif dan Kaji Tindak. Bahan Kuliah. MIL Undip. Semarang.
- Hadi, S. P. 2007. Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*). Makalah Seminar Sosialisasi Sadar Wisata "Edukasi Sadar Wisata bagi Masyarakat di Semarang.
- Huxley P. 1999. Tropical Agroforestry. Blackwell Science Ltd, UK.
- Ishak, A. 2000. Metodologi Pembelajaran Orang Dewasa . Andira. Bandung.
- IUCN. 1994. Guidlines for Protected Area Management Categories IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge,UK.
- Kaplan, D dan Manners, A.A. 2000. Teori Budaya. Terjemahan oleh Landung Simatupang. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kartamihardja, E.S. 1993. Perencanaan Pengelolaan Perikanan Terpadu di Waduk Kedungumbo, Jawa Tengah. Prosiding Simposium Perikanan Indonesia I Tanggal 25 – 27 Agustus 1993. Jakarta.
- Keraf,A.S.,2001. Etika Lingkungan.Penerbit Buku Kompas.Jakarta.
- Khadiyanto,P. 2005. Tata Ruang Berbasis pada Kesesuaian Lahan. BP Undip. Semarang
- Koentjaraningrat. 1980. Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan. Gramedia. Jakarta.
- Krawetz, N. Dan Adiwoso R. 1988. Introduction to Aspek Sosial Amdal. Halifax, NS : School for Resources dan Enviromental Studies. Dalhousie University.
- Krismono, 1995. Penataan Ruang Perairan Umum untuk Mendukung Agribisnis dan Agroindustri. Prosiding Simposium Perikanan Indonesia I Tanggal 25-27 Agustus 1995. Jakarta.
- Kuswara, E. 2007. Peningkatan Sadar Wisata dalam Pengembangan Pariwisata Indonesia. Makalah Seminar Sosialisasi Sadar Wisata "Edukasi Sadar Wisata bagi Masyarakat di Semarang.
- Lang, R. and Armour, A. 1980. The Assessment dan Review of Social Impact. Federal Environmental Assessment Review Office. Ottawa.

- Lundgren BO and JB Raintree. 1982. Sustained Agroforestry. ISNAR. Netherlands.
- Mitchell, B., Setiawan, B dan Rahmi, D. H. 2000. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Nazir, M. 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Nugroho, I. 2004. *Ecotourism*. Universitas Widya Gama. Malang.
- Puslitbang SDA, 2008. Pengelolaan Waduk dan Danau di Indonesia.
- Ramly, N. 2007. Pariwisata Berwawasan Lingkungan. Grafindo Khazanah Ilmu. Jakarta.
- Rangkuti, F. 1997. Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Salim, E. 1990. Sustainable Development : *An Indonesian Prepective. Paper presented at AISEC*. Jakarta
- Sarnita, A. 1986. Perairan Umum di Indonesia sebagai salah satu Sumberdaya Alam. Prosiding Seminar Perikanan Perairan Umum. Tanggal 1 September 1986. Jakarta.
- Soelaiman,M.M. 1998. Dinamika Masyarakat Transisi, Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soemarwoto, O. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Djambatan. Jakarta.
- Soerjani, M. 1997. Pembangunan dan Lingkungan. IPPL. Jakarta.
- Sudjana, D. 2000. Pendidika Luar Sekolah, Wawasan Sejarah, Perkembangan Falsafah dan Teori Pendukung. Falah Production. Bandung
- Sugandhy, A. 1999. Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Suparjan dan Suyatno, H. 2003. Pengembangan Masyarakat. Aditya Media. Yogyakarta.
- Suripin. 2002. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Andi. Yogyakarta.

Susetiawan. 2001. Desa di Era Reformasi : Masihkah Disebut Komunitas Tak Berdaya. STPMD. Yogyakarta.

Suwantoro, G. 2002. Dasar-dasar Pariwisata. Andi. Yogyakarta.

www.freewebs.com.

www.perumperhutani.co.id.

Ziffer. 1989. Ecotourism : : the Uneasy Alliance , Conservation International, Ernst and Young. NY.